

2021

LAPORAN KINERJA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
GORONTALO

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada KPPN Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2021. LAKIN KPPN Gorontalo Tahun 2021 disusun guna memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri keuangan Nomor 14/KMK.09/2017.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi KPPN Gorontalo serta Rencana Strategis KPPN Gorontalo. Pada LAKIN KPPN Gorontalo ini dijelaskan upaya dalam meraih keberhasilan, mengatasi hambatan serta jalannya pelaksanaan program/kegiatan KPPN Gorontalo selama tahun 2021. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2021 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan tahun 2021 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja KPPN Gorontalo tahun 2022.

Gorontalo, 21 Januari 2022
Kepala KPPN



Toni Rediyansyah

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Gorontalo 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis KPPN Gorontalo dan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penyusunan LAKIN KPPN Gorontalo Tahun 2021 ini pada hakikatnya merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian tugas/sasaran strategis instansi selama tahun 2021.

Maksud dan tujuan pembuatan LAKIN adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya (*good governance*) yang dilandasi tugas dan fungsi KPPN Gorontalo sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya. Laporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang dilakukan selama kurun waktu satu tahun. Dalam organisasi pemerintah, proses penyusunan Laporan Kinerja tersebut harus dilakukan secara integral.

Dalam mencapai sasaran agar kebijakan, program, dan seluruh kegiatan dapat terarah diperlukan suatu visi. KPPN Gorontalo mempunyai visi yaitu: “Menjadi Pengelola Perbendaharaan di Daerah yang Profesional, Modern, Transparan, dan Akuntabel”.

Untuk mewujudkan visi tersebut KPPN Gorontalo menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Layanan Perbendaharaan yang Profesional, Modern, dan Transparan
2. Mewujudkan Pengelolaan Kas yang *Prudent*, Efisien, dan Optimal
3. Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu
4. Mengembangkan Kapasitas Pendukung Sistem Perbendaharaan yang Andal, Profesional, dan Modern

KPPN Gorontalo mempunyai tujuan yaitu menatausahakan dana APBN secara cepat, tepat, dan akurat dengan pelayanan prima melalui sistem informasi yang transparan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut KPPN Gorontalo mempunyai sasaran strategis antara lain: pelaksanaan belanja negara yang optimal dan proposional; pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; pemenuhan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi;

kepatuhan penggunaan layanan yang tinggi, pelayanan prima, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat, peningkatan pemahaman mitra kerja, optimalisasi monitoring dan evaluasi, pengembangan SDM yang berkompetensi tinggi, optimalisasi sistem pengelolaan kinerja.

Tingginya tingkat ekspektasi kepuasan pelanggan yang sering tidak berbanding lurus dengan tingkat pemahaman dan respon satker mitra kerja atas aturan dan aplikasi terbaru merupakan tantangan KPPN Gorontalo sehingga diperlukan perencanaan, koordinasi, dan komunikasi yang lebih intensif lagi antara KPPN Gorontalo, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, serta satker mitra kerja.

Pencapaian kinerja KPPN Gorontalo pada tahun 2021 dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

1. Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN terealisasi sebesar 99.379 dari target 94.
2. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN terealisasi sebesar 4.73 dari target 4.64.
3. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu terealisasi sebesar 99.95% dari target 99.4%.
4. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 92.29 dari target 87.5.
5. Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan terealisasi sebesar 30.23% dari target 30%.
6. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI terealisasi sebesar 100% dari target 100%.
7. Persentase akurasi perencanaan kas terealisasi sebesar 100% dari target 82%.
8. Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas terealisasi sebesar 4 dari target 3.15.
9. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 93.28 dari target 89.
10. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa terealisasi sebesar 99.64 dari target 90.
11. Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker terealisasi sebesar 98.6 dari target 89.
12. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal terealisasi sebesar 100% dari target 98.1%.
13. Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 98%.
14. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* terealisasi sebesar 88.3 dari target 84.

15. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 91.56 dari target 83.
16. Nilai rata-rata *hard competency* pegawai terealisasi sebesar 86.3 dari target 78.
17. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN terealisasi sebesar 98.36 dari target 95.5%.
18. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB terealisasi sebesar 92.86 dari target 82
19. Tingkat kualitas pengelolaan BMN terealisasi sebesar 104.76% dari target 100%
20. Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi terealisasi sebesar 100% dari target 80%

Dalam pembuatan Laporan Kinerja (LAKIN) menghasilkan laporan yang akurat, perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai yang kemudian hal tersebut dijadikan landasan/acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Peran Strategis	4
D. Sistematika Laporan	10
Bab II Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis	11
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	14
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	20
Capaian Kinerja Organisasi	20
1. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2021	20
2. Nilai Kinerja Setiap Perspektif.....	21
3. Tabel Menyeluruh atas Nilai Kinerja Organisasi	23
4. Sasaran Strategis	27
5. Penjelasan Capaian IKU	34
6. Inisiatif Strategis.....	90
Realisasi Anggaran.....	91
Kinerja Lainnya	91
1. Inovasi Manajemen/Pelayanan	91
2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi	103
3. Penghargaan	103
Bab IV Penutup	102
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

1.1 Bagan Organisasi KPPN Tipe A1	2
2.1 Peta Strategi dan Sasaran Strategis KPPN Gorontalo Tahun 2021	15
3.1 Peta Strategi KPPN Gorontalo 2021	28
3.2 Aplikasi Telegram	92
3.3 Aplikasi Manjo	93
3.4 Aplikasi Manjo	93
3.5 Aplikasi Mini KPPN	94
3.6 Aplikasi Mini KPPN	94
3.7 Si Weruh	96
3.8 Si Jaga	97
3.9 <i>Treasury Classroom</i> KPPN Gorontalo	97
3.10 Kopen	98
3.11 Sareo	99
3.12 Rombukiya	100
3.13 Rombukiya	100
3.14 LosDol.....	101
3.15 Call me KPPN Gorontalo	101
3.16 Motivasi pagi Gorontalo Pasti	102
3.17 Penandatanganan Pakta Integritas	103
3.18 Perolehan Penghargaan Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Terbaik	104

DAFTAR TABEL

1.1 Statistik Pegawai KPPN Gorontalo	3
2.1 Target Kinerja Kinerja KPPN Gorontalo	13
2.2 Tabel Perjanjian Kinerja KPPN Gorontalo Tahun 2021	15
2.3 Inisiatif Strategis KPPN Gorontalo Tahun 2021	18
3.1 Bobot Perspektif	20
3.2 Rekapitulasi Nilai Perspektif KPPN Gorontalo	20
3.3 <i>Stakeholder Perspective</i>	22
3.4 <i>Customer Perspective</i>	22
3.4 <i>Stakeholder Perspective</i>	22
3.5 <i>Internal Process Perspective</i>	21
3.6 <i>Learning and Growth Perspective</i>	24
3.7 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo 2021	25
3.8 IKU SS Pengelola Perbendaharaan Yang Akuntabel	29
3.9 IKU SS Birokrasi dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif dan Efisien	29
3.10 IKU SS Perumusan Regulasi dan Otorisasi Yang Kredibel	30
3.11 IKU SS Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi Yang Berkesinambungan	30
3.12 IKU SS Pengelolaan Kas Optimal	31
3.13 IKU SS Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien	31
3.14 IKU SS Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara Yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu	32
3.15 IKU SS Pengelolaan Organisasi dan SDM Yang Optimal dan Berkinerja tinggi	33
3.16 IKU SS Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Optimal	33
3.17 IKU SS Sistem informasi dan teknologi yang andal	34
3.18 Perbandingan Target dan Realisasi IKU LK	35
3.19 Penjelasan Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN	37
3.20 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN	38
3.21 Penjelasan Capaian IKU Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	40
3.22 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Penyelesaian SP2D Tepat Waktu	40
3.23 Penjelasan Capaian IKU tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	44

3.24 Penjelasan Capaian SAKTI	46
3.25 Penjelasan Capaian akurasi perencanaan kas KPPN	49
3.26 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Akurasi Perencanaan Kas	46
3.27 Penjelasan Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Kas	51
3.28 Penjelasan Capaian IKU IKPA	53
3.29 Perbandingan Target dan Realisasi IKU IKPA	54
3.30 Penjelasan Capaian IKU kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	61
3.31 Penjelasan Capaian IKU Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	64
3.32 Penjelasan Capaian IKU Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	66
3.33 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Rekonsiliasi UAKPA	67
3.34 Penjelasan Capaian IKU LPJ	68
3.35 Perbandingan Target dan Realisasi LPJ Bendahara	69
3.36 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Edukasi dan Komunikasi	71
3.37 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tugas Kepatuhan Internal	73
3.38 Penjelasan Capaian IKU <i>Hard Competency</i>	74
3.39 Perbandingan Target dan Realisasi IKU <i>Hard Competency</i>	75
3.40 Penjelasan Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	77
3.41 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	74
3.42 Penjelasan Capaian IKU LK UAKPA/UAKPB	79
3.43 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Pengelolaan BMN	87
3.44 Pagu dan Realisasi Belanja KPPN Gorontalo 2017-2021	91

DAFTAR GRAFIK

3.1 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo 2016-2020.....	19
3.2 Capaian IKU LK UAKPA 2017-2021.....	35
3.3 Capaian IKU Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN 2017-2021	37
3.4 Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN 2017-2021.....	40
3.5 Capaian IKU SAKTI 2018-2021.....	45
3.6 Capaian IKU Akurasi Perencanaan Kas 2017-2021.....	46
3.7 Capaian IKU IKPA 2017-2021	54
3.8 Capaian IKU DAK dan Dana Desa KPPN 2018-2021	61
3.9 Capaian IKU Rekonsiliasi UAKPA 2017-2021	66
3.10 Capaian IKU LPJ Bendahara 2017-2021	69
3.11 Capaian IKU <i>Strategy Focused Organization</i> 2017-2021.....	70
3.12 Capaian IKU Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 2017-2021	73
3.13 Capaian IKU <i>Hard Competency</i> 2017-2021	75
3.14 Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran 2017-2021	77
3.15 Capaian IKU Pengelolaan BMN 2017-2021	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/KMK.09/2017. LAKIN disusun berdasarkan realisasi capaian IKU Kemenkeu-Tree sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Kinerja tahun 2021. LAKIN juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis KPPN sebagai instansi vertikal DJPb yang sepenuhnya dan benar-benarnya menunjukkan kinerja KPPN.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Perbendaharaan dan Bendaharawan Umum Negara (BUN), Penyaluran Pembiayaan atas Beban Anggaran, serta Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

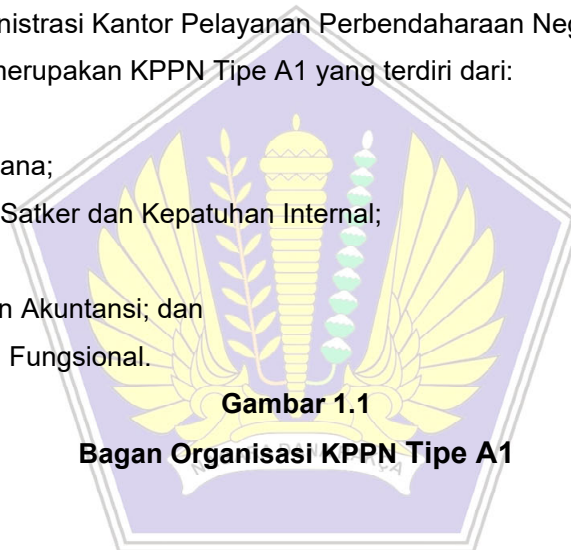
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut KPPN Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara;
5. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. pelaksanaan manajemen mutu layanan;

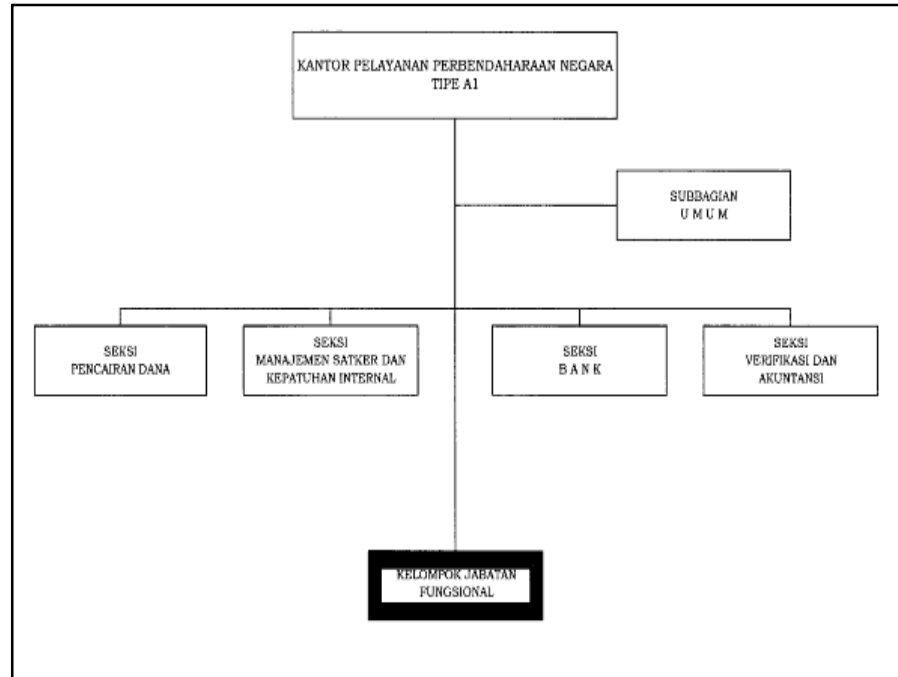
10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
11. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (*treasury management representative*);
12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. pengelolaan rencana penarikan dana;
14. pengelolaan rekening pemerintah;
15. pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. pelaksanaan layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara;
17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
19. pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (PIK); dan
20. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

KPPN Gorontalo merupakan KPPN Tipe A1 yang terdiri dari:

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Seksi Pencairan Dana;
- 3) Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal;
- 4) Seksi Bank;
- 5) Seksi Verifikasi dan Akuntansi; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1
Bagan Organisasi KPPN Tipe A1



Pada 31 Desember 2021, jumlah pegawai KPPN Gorontalo sejumlah 23 orang yang terdiri dari 8 perempuan dan 15 laki-laki.

Tabel 1.1
Statistik Pegawai KPPN Gorontalo

Seksi		Jenis Kelamin	Jumlah
Kepala Kantor		Laki-Laki	1
Fungsional		Laki-Laki	2
Subbagian Umum	Kepala Subbagian	Laki-Laki	1
	Pelaksana	Laki-Laki	2
		Perempuan	1
Seksi Pencairan Dana	Kepala Seksi	Laki-Laki	1
	Pelaksana	Laki-Laki	1
		Perempuan	5
Seksi MSKI	Kepala Seksi	Laki-Laki	1
	Pelaksana	Laki-Laki	2
		Perempuan	0
Seksi Bank	Kepala Seksi	Laki-Laki	1
	Pelaksana	Laki-Laki	0
		Perempuan	2
Seksi Vera	Kepala Seksi	Laki-Laki	1

	Pelaksana	Laki-Laki	1
		Perempuan	1
TOTAL PEGAWAI			23

Berdasarkan data Analisis Beban Kerja, ABK KPPN Gorontalo seharusnya berjumlah 24 orang, akan tetapi kurangnya pegawai tidak membuat kinerja KPPN Gorontalo menurun. KPPN Gorontalo terus meningkatkan kinerjanya baik dengan pelatihan formal seperti *e-learning*, *focus group discussion*, maupun sosialisasi-sosialisasi dan pelatihan informal seperti *capacity building* untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama seluruh pegawai.

C. Peran Strategis KPPN Gorontalo

Peran strategis KPPN Gorontalo selaras dengan tugas yang diembannya yaitu :

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN);
2. Melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran; dan
3. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan yang dijalankan oleh KPPN Gorontalo juga merupakan implementasi dari kebijakan yang merupakan turunan dari kebijakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penjabaran dari kebijakan dan strategi tersebut meliputi:

1. Aspek Pelaksanaan Anggaran
 - a. Ditinjau dari aspek pelaksanaan anggaran, KPPN merupakan garda terdepan dalam implementasi kebijakan fiskal, khususnya belanja pemerintah. Dengan demikian, baik buruknya kualitas pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan di KPPN akan ikut mempengaruhi tingkat penyerapan serta pola penyerapan belanja pemerintah. Dengan adanya SPAN dan menyusul segera diimplementasikan SAKTI maka seluruh prosedur pencairan dana menjadi modern, sederhana, aman, dan terintegrasi. Hal berikutnya yang menjadi krusial adalah kesiapan dari para pengelola keuangan di satker. Peningkatan Fungsi manajemen satker di KPPN merupakan strategi yang tepat. Jika kompetensi dan kapasitas satker cukup baik maka risiko perubahan yang telah dicanangkan semakin berkurang.
 - b. Dampak dari pola penyerapan anggaran yang tidak proporsional dan tidak sesuai dengan perencanaan akan sangat berpengaruh tidak hanya pada kekokohan fiskal, namun juga terhadap stabilitas keuangan serta pergerakan roda perekonomian di sektor riil. Pada akhirnya, hasil dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran ini dapat berfungsi

sebagai masukan dalam proses perencanaan anggaran periode berikutnya maupun dalam rangka *reward* dan *punishment* kepada kementerian/lembaga.

2. Aspek Pengelolaan Kas

- a. Di bidang pengelolaan kas, peran Ditjen Perbendaharaan sangat signifikan karena dapat menentukan besaran beban utang pemerintah, arah, dan strategi pembiayaan dan utang, keputusan dan kebijakan lain terkait transaksi Surat Berharga Negara (SBN) termasuk *issuance*, *buyback*, *swap*, *debt switch*, dan lainnya. Dengan konsep *Asset Liability Management* (ALM) maka keterkaitan antara *Debt Management* dan *Cash Management* semakin konkrit dan jelas.
- b. Dalam hal perencanaan kas, Ditjen Perbendaharaan berperan dalam menentukan aliran kas keluar sehingga dapat menentukan dan merencanakan dengan baik kebutuhan untuk membiayai kekurangan kas yang mungkin terjadi.
- c. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu sehingga dapat memperkirakan terjadinya surplus atau defisit sedini mungkin.

3. Aspek Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah

- a. Peranan yang tidak kalah penting yang dilaksanakan oleh KPPN adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan terkait penggunaan dana APBN, baik laporan keuangan kementerian/lembaga selaku pengguna anggaran, maupun laporan keuangan pemerintah selaku Bendahara Umum Negara bendahara umum negara.
- b. Sesuai pasal 1 Undang-Undang 15 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Peran ini dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dari tingkat KPPN (Satuan Kerja), tingkat Kantor Wilayah, sampai tingkat Kantor Pusat (Eselon I).
- c. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standard Akuntansi Pemerintahan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, maka tahun 2014 adalah tahun terakhir penerapan akuntansi berbasis cash toward accrual. Mulai tahun 2015 pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah harus sudah menggunakan akuntansi berbasis akrual. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi motor penggerak penyusunan laporan sekaligus pembina kementerian negara/lembaga untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual.

4. Aspek Modernisasi Pengelolaan Keuangan Negara

- a. Dengan diimplementasikannya Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN) awal Januari 2015 sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang modern dengan dukungan informasi teknologi yang terkini menjadikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pionir terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang efisien, transparan, dan akuntabel.
- b. Kemudahan dan percepatan layanan terkait pencairan/realisasi APBN menjadikan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan penting dalam percepatan pembangunan.

Berdasarkan data peran strategis DJPB, KPPN Gorontalo telah melakukan langkah-langkah strategis dan inovasi pada tahun 2021 untuk meningkatkan perekonomian dan mempermudah satker-satker dalam melakukan pelayanan di KPPN, seperti:

1. Penyaluran DAK dan Dana Desa

KPPN Gorontalo selaku Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa melaksanakan penyaluran DAK Fisik, Dana Desa dan Dana BOS di wilayah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo. Pada tahun 2021, KPPN Gorontalo menyalurkan DAK Fisik sebesar Rp505.300.825.573 atau 88% dari pagu DAK Fisik sebesar Rp574.204.042.000. Penyaluran Dana Desa sebesar Rp456.990.085.000 atau 100% dari pagu dan Dana BOS (DAK Non Fisik) sebesar Rp246.281.874.000 atau 98,22% dari pagu Dana BOS sebesar Rp250.743.230.000.

Secara keseluruhan, KPPN Gorontalo telah menyalurkan DAK Fisik, Dana Desa, dan Dana BOS sebesar Rp1.208.572.784.573 atau 94,28% dari total pagu sebesar Rp1.281.937.357.000. Untuk memastikan penyaluran sesuai dengan prinsip akuntabilitas, syarat-syarat penyaluran sudah melalui Reviu APIP oleh masing-masing Pemda Daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah.

Di tahun 2021 Dana Desa dan Dana BOS yang disalurkan melalui KPPN Gorontalo, langsung disalurkan ke rekening desa dan rekening sekolah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat realisasi belanja guna mendukung percepatan pembangunan yang menyeluruh. Dengan disalurnkannya Dana Desa dan Dana Bos langsung ke tujuan, desa maupun sekolah dapat langsung menggunakan dana tersebut sesuai dengan rencana kegiatan maupun pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN Gorontalo selama tahun 2021 tergolong sangat baik dan menorehkan prestasi diantaranya adalah KPPN Gorontalo memperoleh predikat sebagai KPPN dengan Kinerja Penyaluran DAK Fisik

dan Dana Desa terbaik untuk kategori KPPN Besar se-Indonesia pada acara Treasury Award 2021. Selain itu, Penyaluran Dana Desa oleh KPPN Gorontalo ke rekening Desa di kabupaten Gorontalo Utara pada Januari 2021 juga tercatat sebagai salah satu penyaluran Dana Desa tercepat di seluruh Indonesia.

Tantangan di tahun 2021 tidaklah mudah, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung yang disertai kebijakan pembatasan aktivitas menjadikan KPPN Gorontalo harus menyiapkan sistem monitoring online untuk mengakomodir penyerahan syarat penyaluran serta untuk menginput progress output yang telah selesai. Sistem monitoring sudah tersinkron mulai dari level dinas, pemda maupun KPPN, sehingga data tersaji secara update dan real time. Diharapkan penyaluran yang mudah dapat mempercepat pembangunan guna membantu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

2. Inovasi Konfirmasi Penerimaan Negara (KOPEN)

Pada tahun 2021 kinerja APBN kita mengalami peningkatan setelah dihantam badai pandemi covid-19 sejak 2020 silam. Dampak dari pandemi covid-19 tidak menyurutkan semangat dalam terus memperbaiki kinerja. Target penerimaan negara mencapai 100% bahkan sebelum tutup tahun. Penerimaan negara tidak hanya dari penerimaan pajak saja, namun didorong juga oleh penerimaan cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). KPPN Gorontalo berkontribusi dalam memonitoring penerimaan melalui aplikasi OMSPN dengan menerbitkan nota konfirmasi penerimaan. Bukan hanya penerimaan yang berasal dari belanja APBN saja, termasuk penerimaan yang berasal pajak pusat yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Umum Daerah/Beban APBD.

KPPN Gorontalo memberikan layanan Kopen, Konfirmasi Penerimaan Negara Online yang mempermudah mitra satuan kerja dalam melakukan konfirmasi penerimaan pajak maupun PNBP. Satuan kerja dapat mengirimkan pengajuan konfirmasi setoran penerimaan negara secara online tanpa harus datang ke KPPN melalui formulir online yang dibuat oleh KPPN Gorontalo.

Sejak ditetapkan sebagai salah satu inovasi KPPN Gorontalo 2020, mitra kerja sebanyak 223 satuan kerja telah merasakan dampak kemudahan dari pelayanan ini. Contohnya, jika masih terdapat kesalahan ADK, satuan kerja diharuskan memperbaiki dan menyampaikan dokumen ataupun ADK yang salah tanpa harus ke KPPN Gorontalo. Ada beberapa satuan kerja yang harus menempuh waktu lebih dari 3 (tiga) jam menuju KPPN Gorontalo.

Tujuan layanan ini selain mempermudah mitra satuan kerja terkait efisiensi biaya, tenaga dan waktu adalah penatausahaan dokumen konfirmasi secara digital dengan mengurangi penggunaan kertas.

Dilihat dari aspek proses bisnis akan sangat memudahkan pengguna layanan, sebagai contoh untuk pelayanan, akan sangat menghemat karena tidak ada lagi biaya perjalanan dinas yang diperlukan untuk melakukan konfirmasi penerimaan. Efisiensi dari sisi waktu tunggu satuan kerja juga akan meningkat karena seluruh proses konfirmasi tidak perlu antrian fisik di KPPN yang dapat menimbulkan kerumuman mengingat pandemi masih ada.

3. Penghematan Anggaran Efisiensi Birokrasi

Efisiensi atas belanja birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan fokus pada belanja bahan dan konsumsi serta belanja perjalanan dinas. Total pagu dana KPPN Gorontalo setelah revisi penghematan ke-2 tanggal 14 Juli 2021 pada ketiga jenis belanja tersebut (seluruh output) adalah sebesar Rp 442.725.000. Angka penghematan tersebut telah ditetapkan oleh kantor pusat melalui Nota Dinas yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

4. Penyelenggaraan EUT SAKTI

Tahun Anggaran 2022 adalah tahun implementasi penuh penerapan aplikasi SAKTI diseluruh Kementerian Negara / Lembaga. Aplikasi SAKTI merupakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi berbasis web yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis mulai dari modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul asset tetap, modul piutang, serta modul akuntansi dan pelaporan. Dengan demikian seluruh proses bisnis terkait pengelolaan APBN telah termuat dalam 1 aplikasi single database yang dinamakan SAKTI. SAKTI menggantikan aplikasi existing seperti RKAKL, aplikasi SAS, aplikasi SIMAK BMN, Persediaan dan SAIBA. Tidak ada lagi proses backup yang dilakukan masing-masing user sebagaimana pada aplikasi berbasis desktop. Tidak ada lagi proses transfer data antar beberapa aplikasi, semuanya telah terintegrasi dalam single database dan compatible serta terkoneksi langsung dengan SPAN.

Pelaksanaan SAKTI pada tahun 2021 dilakukan melalui 13 tahapan dan ketiga belas tahapan tersebut telah dilakukan oleh KPPN Gorontalo. Mulai dari tahapan pertama yaitu membentuk tim trainer SAKTI yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-20/WPB.29/KP.01/2021 sampai dengan tahapan terakhir yaitu pendampingan pembuatan SPM gaji induk Januari TA. 2022.

Sebagai langkah awal dalam memulai perjalanan penggunaan aplikasi SAKTI adalah pendaftaran user-user SAKTI. Registrasi user seharusnya segera didaftarkan keseluruhan perannya termasuk aktivasi OTP oleh para pejabat perbendaharaan. Dalam kondisi pandemi saat ini, terdapat banyak tantangan yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan demi tujuan yang harus dicapai. Hal tersebut tidaklah mudah, para trainer SAKTI harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mentransfer knowledge terkait SAKTI dengan kondisi yang cukup terbatas. Mulai dari waktu EUT yang dibatasi hanya 2 pekan saja untuk menggunakan server latihan pandu sakti, sementara seluruh tahapan latihan sesuai modul pelatihan harus diselesaikan kepada seluruh stakeholder mitra kerja KPPN Gorontalo sebanyak 223 satker. Juga akses server latihan yang kurang memadai menjadi tantangan tersendiri dalam proses EUT SAKTI. Selain itu, patut disadari pula bahwa EUT Sakti dengan metode online via zoom dan google meet, terdapat banyak kekurangan yang mesti terjadi. Puncaknya adalah kehadiran satker yang kurang memadai dan minim antusias juga menjadi faktor tantangan terberat yang dialami oleh para trainer SAKTI.

Namun demikian, pada bulan November 2021 memanfaatkan kondisi pandemi yang sudah mulai berangsur pulih, KPPN Gorontalo menyelenggarakan EUT SAKTI tatap muka sesuai jadwal yang ditetapkan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Proses transfer knowledge pada EUT SAKTI kali ini berjalan sangat baik jika dibandingkan dengan EUT SAKTI metode online via zoom dan google meet. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti tahapan demi tahapan kegiatan ini. Terlihat banyaknya diskusi yang terjadi antara peserta dan para trainer, sehingga waktu yang diberikan selama sehari itu pun seolah tidak cukup untuk memaparkan keseluruhan materi pelatihan pada hari itu.

Selanjutnya memasuki masa penghujung tahun 2021 yaitu bulan Desember 2021, adalah masa ujian yang sesungguhnya terhadap keberhasilan implementasi SAKTI tahun 2022. Yaitu proses pembuatan gaji induk bulan Januari tahun 2022, dan penghasilan PPNPN Induk bulan Januari tahun 2022. Pada tahapan ini para trainer masih tetap setia untuk mendampingi para user sakti untuk membuat SPP/SPM gaji induk tersebut hingga proses SPP/SPM tersebut berhasil dan diterbitkan SP2Dnya. Pada proses ini, terlihat perjuangan para trainer dan para user SAKTI telah berbuah manis dengan berhasilnya seluruh proses SPM gaji Januari 2022 menjadi SP2D. Dengan demikian SAKTI ini terbukti tetap SAKTI karena berhasil melalui berbagai hantaman pandemi yang berimbas pada seluruh aspek bidang pemerintahan dan kehidupan masyarakat diseluruh belahan dunia.

D. Sistematika Laporan

LAKIN Tahun 2021 KPPN Gorontalo mempunyai sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan kinerja lainnya.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, baik kinerja utama maupun kinerja lainnya serta menyajikan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagai implementasi dari Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah ditetapkan, yaitu “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia”, maka visi KPPN Gorontalo menyesuaikan dengan ruang lingkup, tugas pokok dan fungsi yang ada. Secara spesifik bahwa tugas KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah dan menjadi kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atau kuasanya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Visi ini disusun untuk memberi arah yang jelas dan fokus kepada KPPN Gorontalo sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan organisasi. Visi ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh unsur dalam organisasi sehingga mampu menggerakkan seluruh elemen dari organisasi secara sinergi ke satu arah yang sama.

Visi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo yaitu:

“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang Profesional, Modern, Transparan dan Akuntabel”

Pengelola perbendaharaan negara di daerah artinya KPPN Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sesuai peran dan fungsinya selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.

Profesional memiliki makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai di lingkungan KPPN Gorontalo melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Modern artinya dukungan kemajuan Teknologi Informasi digunakan untuk mendukung jalannya proses bisnis untuk memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan.

Transparan dan Akuntabel artinya selalu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan yang dilandasi dengan komitmen dan integritas yang tinggi.

Untuk mewujudkan visinya, KPPN Gorontalo akan mempunyai misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi:

1. Mewujudkan Layanan Perbendaharaan yang Profesional, Modern, dan Transparan

Layanan perbendaharaan yang professional ditujukan untuk memberikan kualitas layanan terbaik dengan dukungan sumberdaya dan sarana/prasarana terbaik. Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggung jawaban dan jaminan dari profesionalitas layanan perbendaharaan yang telah disampaikan. Ukuran profesional, transparan, dan akuntabel tentu harus ditetapkan dengan standar yang jelas dengan kinerja yang terukur.

2. Mewujudkan Pengelolaan Kas yang *Prudent*, Efisien, dan Optimal

Sebagai pengelola kas negara (*fund manager*), maka penguatan kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif untuk menghindari *cash mismatch*; dan penata usahaan penerimaan negara yang efektif dan akuntabel.

3. Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu

Akuntansi dan pelaporan keuangan diwujudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan negara sejak proses penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta mendukung pengambilan kebijakan strategis organisasi. Pengelolaan keuangan dan kekayaan, utang dan aset pemerintah yang baik tercermin di dalam laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu, dan akurat menggunakan standar akuntansi berbasis akrual, sehingga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat serta internasional.

4. Mengembangkan Kapasitas Pendukung Sistem Perbendaharaan yang Andal, Profesional, dan Modern

Mengimplementasikan peraturan-peraturan di bidang perbendaharaan serta memberikan dukungan teknis di bidang teknologi informasi perbendaharaan dan basis data sesuai *best practice* yang andal, terotomasi, terintegrasi, mudah diterapkan (*applicable*), dan memenuhi aspek keamanan melalui implementasi SPAN, serta penyelenggaraan jabatan fungsional yang mendukung terselenggaranya fungsi-fungsi perbendaharaan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Untuk mewujudkan visi dan misi, KPPN Gorontalo menetapkan Proyeksi Target Kinerja mengikuti target kinerja yang telah ditetapkan dalam Restra Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020-2024, yaitu:

Tabel 2.1
Target Kinerja KPPN Gorontalo

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			2021	UIC
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94	Seksi Vera
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,64 (skala 5)	Semua Seksi
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.4%	Seksi PD Seksi Bank
4.	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87.5	Seksi MSKI
		Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30%	Seksi MSKI
		Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	Seksi MSKI
5.	Pengelolaan kas yang optimal	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	82%	Seksi MSKI
		Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15 (skala 4)	Seksi PD Seksi Bank
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	Seksi MSKI
		Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	Seksi Bank Seksi Vera
		Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89	Seksi MSKI

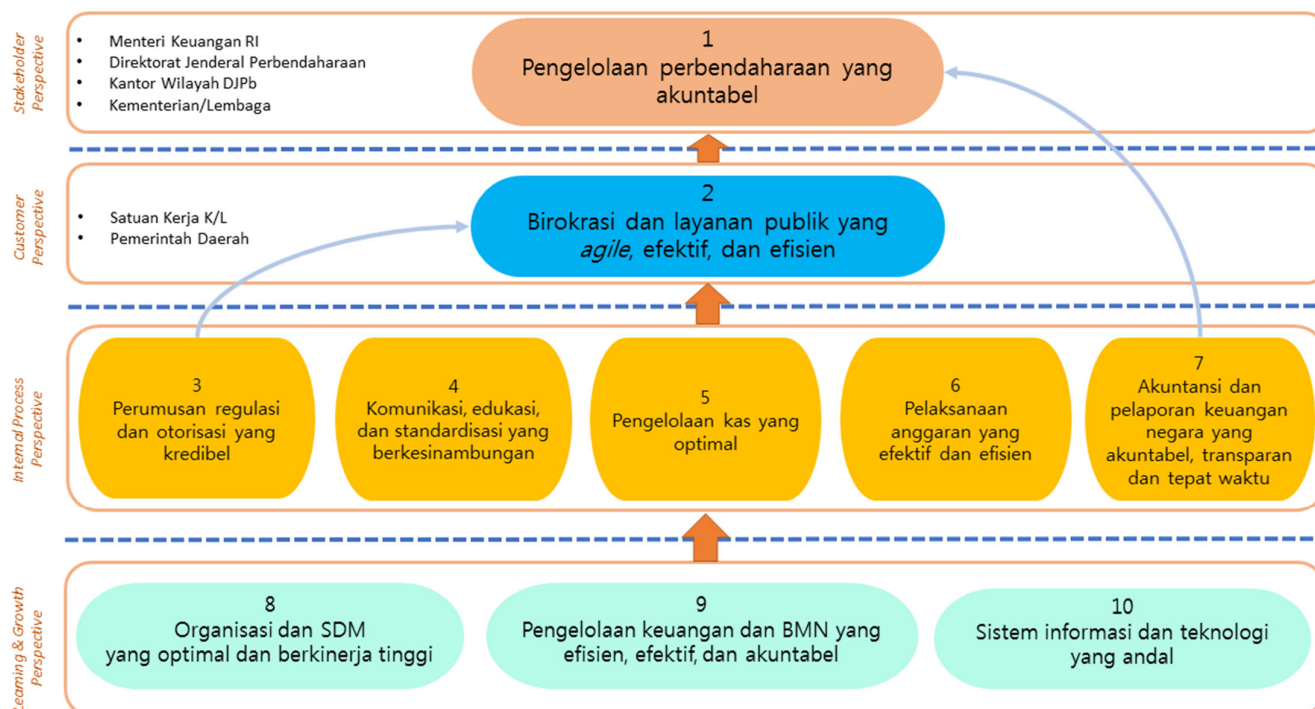
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.1%	Seksi Vera
		Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%	Seksi Vera
8.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84	Subbagian Umum
		Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	Seksi MSKI
		Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Seluruh Pegawai
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.5%	Subbagian Umum
		Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82	Subbagian Umum
		Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%	Subbagian Umum
10.	Sistem informasi dan teknologi yang andal	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%	Subbagian Umum

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penetapan kinerja KPPN Gorontalo telah dibuat awal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program yang ditetapkan dan indikator keberhasilan pencapaiannya. Rencana kinerja tersebut merupakan target yang harus dilaksanakan dan akan menjadi ukuran kerja unit masing-masing serta pertanggungjawaban dalam Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Gorontalo pada akhir tahun anggaran, sebagaimana tabel berikut.

Gambar 2.1
Peta Strategi dan Sasaran Strategis KPPN Gorontalo Tahun 2021



Tabel 2.2
Tabel Perjanjian Kinerja KPPN Gorontalo Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	1a-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,64 (skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5
		4b-N Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30%
		4c-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	82%
		5b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (skala 4)
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		6b-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
		6c-N Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	7a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
		7b-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%
8.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
		8c-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82
		9c-N Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%
10.	Sistem informasi dan teknologi yang andal	10a-N Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%

Program/Kegiatan

1. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan resiko
2. Dukungan manajemen

Anggaran**Rp. 324.222.000,00****Rp. 1.988.468.000,00**

Pada tahun 2021, terdapat Indikator Kinerja Utama Baru antara lain:

1. Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan.

Standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan yaitu pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada satker pengelola APBN sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tingkat implementasi diukur berdasarkan persentase jumlah PPK dan PPSPM (termasuk calon PPK dan PPSPM) yang mengikuti pelaksanaan penilaian kompetensi sampai dengan tahap selesai diverifikasi oleh KPPN sebagai Unit Pelaksana penilaian kompetensi dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Ruang lingkup pengukuran IKU ini di tahun 2021 adalah jumlah sisa pejabat perbendaharaan K/L yang belum melaksanakan penilaian kompetensi sampai dengan tahun 2020 (sebagaimana keterangan terlampir) serta para pejabat perbendaharaan yang baru ditetapkan pada tahun 2021.

2. Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker.

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang di dalamnya memuat informasi kinerja yang hendak dicapai Satker dalam satu tahun anggaran. Informasi kinerja

tersebut di antaranya berupa target Rincian Output (RO) yang mencantumkan target kuantitatif dari produk akhir berupa barang/jasa yang akan dihasilkan dari berbagai aktivitas belanja Satker. Untuk mendukung peran BUN dalam mengawal ketercapaian RO dan outcome belanja pemerintah, diperlukan mekanisme pelaporan dan pengumpulan data capaian output Satker. Proses pelaporan tersebut dilakukan melalui aplikasi OMSPAN yang dilaksanakan secara bulanan.

3. Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah sistem manajemen yang meliputi kebijakan, organisasi, perencanaan, penanggung jawab, proses, dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, mengevaluasi, mengelola, dan meningkatkan keamanan informasi. IKU Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi mengukur tingkat penerapan keamanan informasi di lingkungan Kanwil DJPb dan KPPN dengan berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-1/PB/2021 tentang Kebijakan SMKI di lingkungan DJPb. Pengukuran dilakukan melalui penilaian atas pemenuhan checklist kegiatan Rencana SMKI di lingkup Kanwil DJPb dan KPPN yang didukung dengan dokumentasi sebagai bukti dukung telah dilaksanakannya kegiatan keamanan informasi di lingkup Kanwil DJPb dan KPPN.

Tabel 2.3

Inisiatif Strategis KPPN Gorontalo Tahun 2021

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
				Kegiatan	Output		
1.	SS: Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i> pada Unit Kerja	Pemenuhan indikator-indikator pengukuran tingkat implementasi <i>Learning Organization</i> dengan metode <i>self assessment</i> Target: Pemenuhan minimal masing-masing	Q2: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q2: 40%	Januari s.d. Desember 2021	Kepala Kantor
				Q3: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q3: 60%		
				Q4: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q4: 80%		

			indikator <i>self assessment</i> 80%				
2.	SS: Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan IKU: Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Optimalisasi transaksi pembayaran non tunai di tingkat KPPN	Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan transaksi pembayaran non tunai tingkat KPPN Target: Minimal 100 transaksi melalui <i>marketplace</i> pada tahun 2021	Q1: Pendampingan kepada satker Q2: Pendampingan kepada satker Q3: Pendampingan kepada satker Q4: Pendampingan kepada satker	Q1: Transaksi melalui <i>marketplace</i> Q2: Transaksi melalui <i>marketplace</i> Q3: Transaksi melalui <i>marketplace</i> Q4: Transaksi melalui <i>marketplace</i>	Januari s.d. Desember 2021	Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
3.	SS: Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien IKU: Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Laporan Monev penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Target: Transfer ke Daerah dan Dana Desa kabupaten/kota wilayah kerja KPPN Gorontalo tersalur 100%	Q1: Monitoring dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Q2: Monitoring dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Q3: Monitoring dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Q4: Monitoring dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Q1: Laporan monev Q2: Laporan monev Q3: Laporan monev Q4: Laporan monev	Januari s.d. Desember 2021	Seksi Bank

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2021

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi. Perhitungan NKO mengacu pada Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun dan memperhatikan adanya addendum KK.

Formula menghitung NKO:

$$NKO = \sum (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

Bobot perspektif di lingkungan Kementerian Keuangan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Bobot Perspektif

Perspektif	Bobot
Stakeholder	25%
Customer	15%
Internal Process	30%
Learning and Growth	30%

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2021 adalah 107,24% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rekapitulasi Nilai Perspektif KPPN Gorontalo

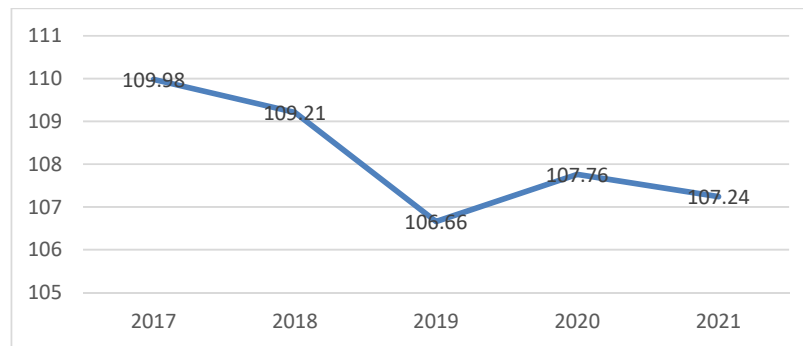
Perspektif	Nilai	Bobot	Hasil
Stakeholder	105.72	25%	26.43
Customer	101.94	15%	15.29
Internal Process	106.53	30%	31.96
Learning and Growth	111.85	30%	33.56
Nilai Kinerja Organisasi			107.24%

Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 sebesar 109.8. Tahun 2018, NKO KPPN Gorontalo sebesar 109,21%. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,55% menjadi 106,66%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.1% menjadi 107.76% dan mengalami penurunan kembali pada tahun ini 2021 sebesar 0.52% menjadi 107.24%.

Grafik 3.1

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2017 - 2021



2. Nilai Kinerja Setiap Perspektif

Peta Strategi terdiri dari sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif. Perspektif adalah cara pandang yang digunakan dalam *Balance Score Card* (BSC) untuk mengelola kinerja organisasi. Ada 4 perspektif dalam BSC Kemenkeu yaitu:

a. Perspektif *Stakeholder*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder. Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

Tabel 3.3
Stakeholder Perspective

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
I	Stakeholder Perspektif (25%)								105.72%
1	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif								105.72%
1	1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94.00	99,38	Max	PM	14%	100%	105.72%

b. Perspektif Customer

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

Tabel 3.4
Customer Perspective

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
II	Customer Perspektif (15%)								101.94%
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien								101.94%
2	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,64	4,73	Max	EM	21%	100,00%	101.94%

c. Perspektif Internal Process

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

Tabel 3.5
Internal Process Perspective

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
III	Internal Process (30%)								106.53%

3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel								100.55%
3	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	99.95%	Max	PM	14%	100,00%	100.55%
4	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan								101.77%
4	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,50%	91,50%	Max	PM	14%	33.33%	104,57%
5	4b-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30.00	30.23	Max	PM	14%	33.33%	100.77%
6	4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100.00	100.00	Max	PM	14%	33.33%	100.00%
5	Pengelolaan kas yang optimal								120.00%
7	5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82,00	100.00	Max	PM	14%	50,00%	120.00%
8	5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	4.00	Max	PM	14%	50,00%	120.00%
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien								108,33%
9	6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89,00	93.27	Max	PL	19%	40.43%	104.79%
10	6b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90,00	99.58	Max	PM	14%	29,79%	110.64%
11	6b-CP	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89,00	98.61	Max	PM	14%	29,79%	110.80%
7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu								101.99
12	7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat	98.10	100.00	Max	PM	14%	50.00%	101.94

		UAKPA secara tepat waktu dan andal							
13	7a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00	100.00	Max	PM	14%	50.00%	102.04

d. Perspektif *Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

Tabel 3.6
Learning and Growth Perspective

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
IV	Learning and Growth Perspektif (30%)								111.85%
8	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi								108.68%
14	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84,00	88.3	Max	PM	14%	33.33%	105.12%
15	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83.00	91.56	Max	PM	14%	33.33%	110.31%
16	8c-N	Nilai rata –rata hard competency pegawai	78,00	86.3	Max	PM	14%	33.33%	110.64%
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel								106,87%
17	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,50	98.01	Max	PM	14%	33,33%	102,63%
18	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82,00	92.86	Max	PM	14%	33,33%	113,24%

19	9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100.00	104.00	Max	PM	14%	33,33%	104.76
10	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel								120.00%
20	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80.00	100.00	Max	PM	14%	100.00%	120.00

3. Tabel Menyeluruh atas Nilai Kinerja Organisasi

Tabel 3.7

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo 2021

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
I	Stakeholder Perspektif (25%)								105.72%
1	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif								105.72%
1	1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94.00	99,38	Max	PM	14%	100%	105.72%
II	Customer Perspektif (15%)								101.94%
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien								101.94%
2	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,64	4,73	Max	EM	21%	100,00%	101.94%
III	Internal Process (30%)								106.53%
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel								100.55%
3	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	99.95%	Max	PM	14%	100,00%	100.55%
4	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan								101.77%
4	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,50%	91,50%	Max	PM	14%	33.33%	104,57%
5	4b-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi	30.00	30.23	Max	PM	14%	33.33%	100.77%

		kompetensi pejabat perbendaharaan							
6	4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100.00	100.00	Max	PM	14%	33.33%	100.00%
5	Pengelolaan kas yang optimal								120.00%
7	5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82,00	100.00	Max	PM	14%	50,00%	120.00%
8	5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	4.00	Max	PM	14%	50,00%	120.00%
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien								108,33%
9	6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89,00	93.27	Max	PL	19%	40.43%	104.79%
10	6b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90,00	99.58	Max	PM	14%	29,79%	110.64%
11	6b-CP	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89,00	98.61	Max	PM	14%	29,79%	110.80%
7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu								101.99
12	7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10	100.00	Max	PM	14%	50.00%	101.94
13	7a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00	100.00	Max	PM	14%	50.00%	102.04
IV	Learning and Growth Perspektif (30%)								111.85%
8	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi								108.68%
14	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan	84,00	88.3	Max	PM	14%	33.33%	105.12%

		kinerja berbasis Strategy Focused Organization							
15	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83.00	91.56	Max	PM	14%	33.33%	110.31%
16	8c-N	Nilai rata –rata hard competency pegawai	78,00	86.3	Max	PM	14%	33.33%	110.64%
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel								106,87%
17	9a- CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,50	98.01	Max	PM	14%	33,33%	102,63%
18	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82,00	92.86	Max	PM	14%	33,33%	113,24%
19	9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100.00	104.00	Max	PM	14%	33,33%	104.76
10	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel								120.00%
20	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80.00	100.00	Max	PM	14%	100.00%	120.00

4. Sasaran Strategis

a. Definisi Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi.

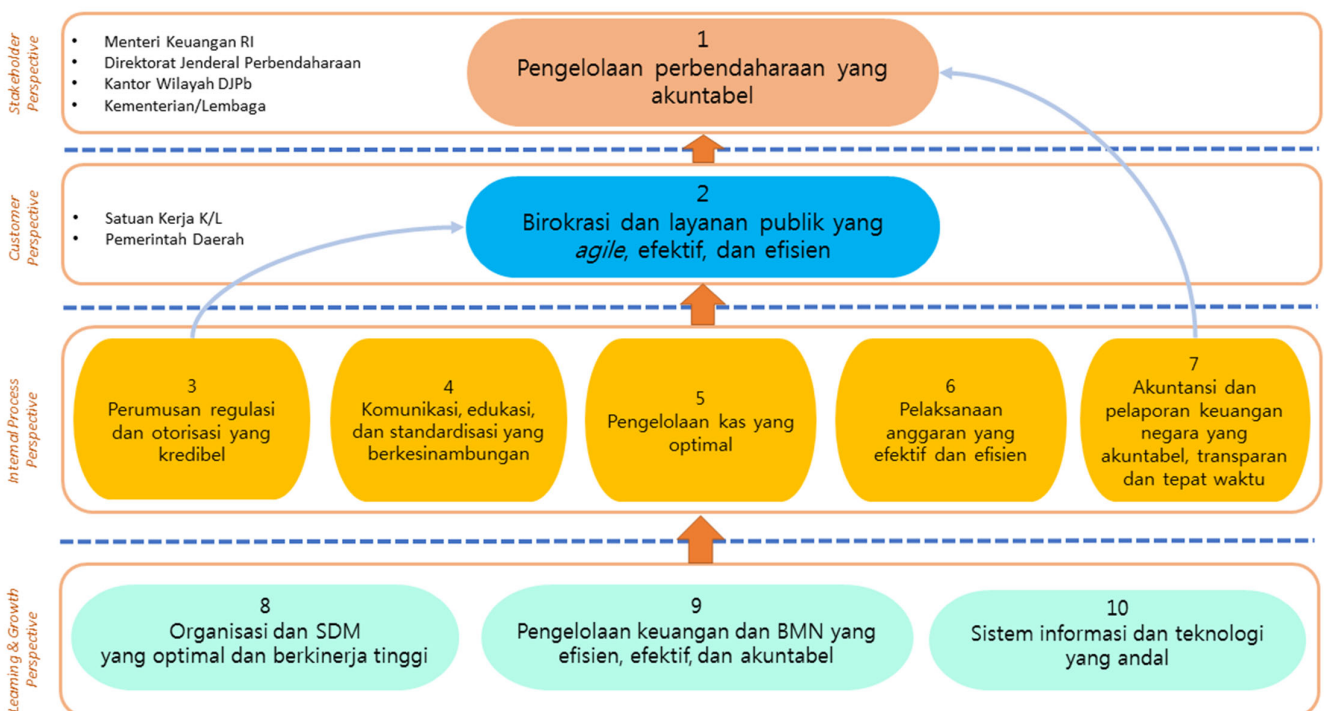
Sasaran Strategis hanya disusun pada unit yang memiliki peta strategi. SS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Singkat dan jelas

Pernyataan SS tidak berupa paragraf atau kalimat. Penjelasan terhadap uraian SS dapat dijelaskan dalam manual IKU. Pernyataan SS tidak memiliki pemahaman ganda dan selaras dengan deskripsi SS pada manual IKU.

- 2) Merefleksikan kondisi ideal dan realistis yang ingin dicapai
Pernyataan SS menggambarkan kondisi seharusnya yang ingin dicapai sesuai potensi.
- 3) Dituliskan dalam bentuk pernyataan kondisional.
Pernyataan SS bersifat kualitatif (bukan kuantitatif).

Gambar 3.1
Peta Strategi KPPN Gorontalo 2021



b. IKU dalam Capaian Sasaran Strategis Beserta Target dan Realisasi

1) Pengelola Perbendaharaan Yang Akuntabel

Pengelolaan perbendaharaan artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengelolaan perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan juga untuk mendukung pengelolaan pembiayaan dalam rangka mencukupi kebutuhan kas dalam pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas wajib dikelola secara akuntabel, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, pengelolaan perbendaharaan juga diharapkan dilakukan secara produktif, yaitu dapat menjadi nilai tambah dalam membangun pondasi kokoh atas fundamental ekonomi negara Indonesia.

Namun demikian, pengelolaan perbendaharaan dan risiko tersebut harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efektif, dan efisien.

Tabel 3.8

IKU SS Pengelola Perbendaharaan Yang Akuntabel

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94,00	99,379

2) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara negara.

Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

Tabel 3.9

IKU SS Birokrasi dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif dan Efisien

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,64	4,73

3) Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh DJPb dan unit kerja dibawahnya dalam rangka pengelolaan perbendaharaan.

Kredibel adalah dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan serta merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif, dan akuntabel.

Tabel 3.10

IKU SS Perumusan Regulasi dan Otorisasi Yang Kredibel

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%	99.95%

4) Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman *stakeholders* atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi dan edukasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

Tabel 3.11

IKU SS Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi Yang Berkesinambungan

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
----------	-----	--------	-----------

4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5	92.29
4b-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30%	30.23%
4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	100%

5) Pengelolaan kas yang optimal

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden.

Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan maupun dalam melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah.

Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal.

Tabel 3.12
IKU SS Pengelolaan kas yang optimal

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82%	100%
5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	4

6) Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah Kemampuan BUN untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran pada BA Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

Tabel 3.13
IKU SS Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	98.60
6b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	99.64

6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89	98.60
------	--	----	-------

- 7) Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

Tabel 3.14

IKU SS Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara Yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.1%	100%
7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%	100%

- 8) Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu memwadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

Tabel 3.15

IKU SS Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84	88.3
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	91.56
8c-N	Nilai rata –rata hard competency pegawai	78	86.3

9) Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkannya adalah melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Tabel 3.16

IKU SS Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Optimal

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.5%	98.36%
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82	92.86
9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%	104.76%

10) Sistem informasi dan teknologi yang andal

Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang andal adalah sistem informasi terintegrasi yang mengelola dan mengolah berbagai jenis input data dan

informasi (resources) keuangan menjadi hasil keluaran (output) real time data dan informasi keuangan yang konsisten dalam rangka membantu para pengambil kebijakan pada unit-unit organisasi lingkup Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Tabel 3.17

IKU SS Sistem informasi dan teknologi yang andal

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
10-aN	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%	100%

c. Penjelasan Capaian IKU**1. Nilai Kualitas LK Kuasa BUN KPPN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.

LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas

Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) akurasi data (70%); (2) ketepatan waktu (2%); kelengkapan (3%); dan (4) Tingkat Partisipasi (25%). Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb.

Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat Daerah adalah sebagai berikut:

Level 4 = 95-100 (Sangat Baik)

Level 3 = 80-94 (Baik)

Level 2 = 65-79 (Cukup)

Level 1 = 0-64 (Kurang)

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2021, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat UAKBUN-D KPPN tahun 2020.

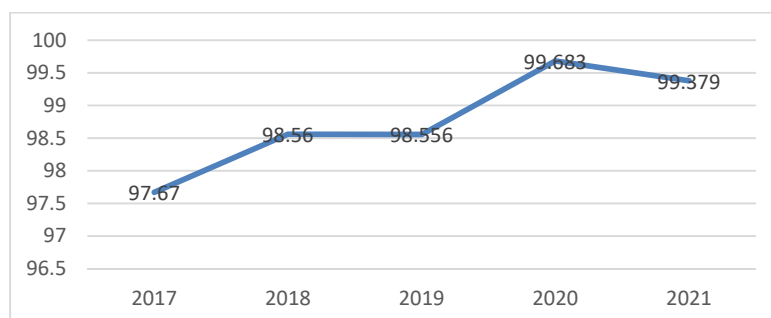
Formula : Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2021, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN tahun 2020.

Untuk capaian IKU ini pada tahun 2016 adalah 94.38, pada tahun 2017 sebesar 97.67, 2018 adalah 98.56, pada tahun 2019 sebesar 98.56, nilai 2020 atas penilaian LK Kuasa Bun pada tahun 2019 yaitu 99,683. Pada tahun 2021 atas penilaian LK Kuasa BUN pada tahun 2020 yaitu 99.379

Grafik 3.2

Capaian IKU LK UAKPA 2017-2021



Tabel 3.18
Perbandingan Target dan Realisasi IKU LK

IKU	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	93	97.67	94	98.56	93	97.67	94	99.683	94	99.379

Tujuan IKU:

Mewujudkan kualitas penyusunan LK Kuasa BUN KPPN DJPb

Isu Utama:

Nilai LK Kuasa BUN KPPN dipengaruhi oleh validitas data transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Pelaksanaan rekonsiliasi internal harian.
- Monitoring data suspend atas penerimaan negara pada Aplikasi OM SPAN, dan menghubungi satker untuk melakukan perbaikan/koreksi penerimaan jika terdapat transaksi suspend
- Pelaksanaan analisis Neraca Percobaan dan Neraca lajur detil segmen satker. Memastikan tidak terdapat penggunaan akun/CoA yang salah pada transaksi di satker.
- Membuat Nota Dinas ke Seksi terkait, jika di temukan kesalahan penggunaan akun/CoA

Rekomendasi Rencana Aksi

- Pelaksanaan rekonsiliasi internal
- Monitoring data suspend atas penerimaan negara pada Aplikasi OM SPAN.
- Membuat Nota Dinas ke Seksi terkait, jika di temukan kesalahan penggunaan akun/CoA.

2. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan memanfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana .

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :

5 = Sangat Puas

4 = Puas

3 = Cukup Puas

2 = Kurang Puas

1 = Tidak Puas

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan tahunan. Adapun capaian indeks kepuasan layanan KPPN merupakan rata-rata atas indeks kepuasan pada 5 (lima) kinerja layanan di KPPN, yaitu:

Tabel 3.19

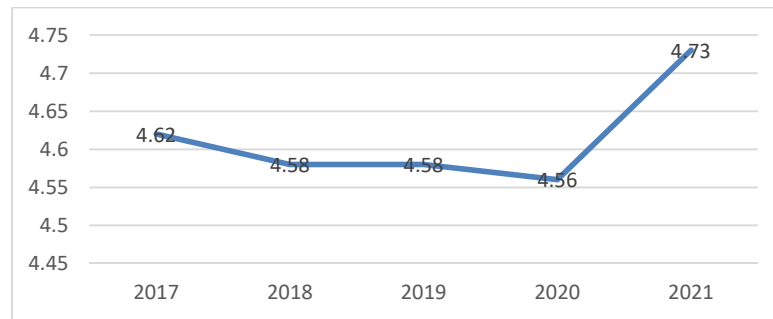
Penjelasan Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN

1. Layanan Kinerja Pencairan Dana	4,7
2. Layanan Kinerja Bimbingan dan Konsultasi	4,72
3. Layanan Kinerja Konfirmasi Surat Setoran	4,75
4. Layanan Kinerja Rekonsiliasiliasi	4,72
5. Layanan Kinerja Sarana dan Prasarana	4,74
Rata-rata / indeks kepuasan layanan KPPN	4,73

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara capaian IKU ini pada tahun 2016 sebesar 4.39, tahun 2017 sebesar 4.62, 2018 sebesar 4,58; pada tahun 2019 4,58; pada tahun 2020 sebesar 4.56, serta di tahun 2021 sebesar 4.73

Grafik 3.3

Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN 2017-2021



Tabel 3.20
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN

IKU	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.08	4.62	4.09	4.58	4.10	4.58	4.55	4.56	4.64	4.73

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPPN kepada mitra kerja.

Isu Utama:

Tingkat kepuasan satker terhadap layanan KPPN tidak hanya ditentukan oleh kualitas layanan KPPN namun juga terkait berbagai aspek misalnya kehandalan sistem aplikasi dan kebijakan lain yang berada diluar wewenang KPPN, akibatnya tingkat kepuasan atas layanan KPPN juga dipengaruhi oleh kepuasan stakeholder atas kebijakan-kebijakan yang berada diluar kewenangan KPPN (misalnya kehandalan sistem SPAN, dll).

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan analisa atas hasil survey untuk memetakan kelemahan pelayanan dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan pada masing-masing unit.
- Melakukan evaluasi terhadap hasil survei periode sebelumnya.

- Melaksanakan/melengkapai sarana dan informasi sebagai tindakan perbaikan atas hasil survei periode sebelumnya yang masih kurang
- Meminta konfirmasi/masukan dari satker atas hal-hal masih kurang dalam layanan sesuai hasil survey sebelumnya.
- Melakukan peningkatan layanan dengan memeriksa seluruh adk rekon yang sudah diupload di jam kerja.
- Membantu satker dalam menghadapi permasalahan rekon.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan Sosialisasi inovasi-inovasi pelayanan yang diberikan KPPN dalam bentuk Aplikasi
- Melakukan publikasi yang lebih intensif terkait kebijakan dan capaian kinerja KPPN.

3. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018.

SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Front Office Seksi Pencairan Dana dan diteruskan ke Middle Office Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank.

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- a) Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji
- b) ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
- c) Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- d) Tidak termasuk SPM dengan penerima >100
- e) Data supplier, KOntrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM
- f) Tidak dalam keadaan force majeure

Formula perhitungan capaian IKU ini adalah

$$\frac{\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN}}{\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN}} \times 100\%$$

Ket : Kriteria SP2D sebagaimana prasyarat kondisi yang disebutkan di Definisi.

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat direktorat jenderal perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 20121 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.21

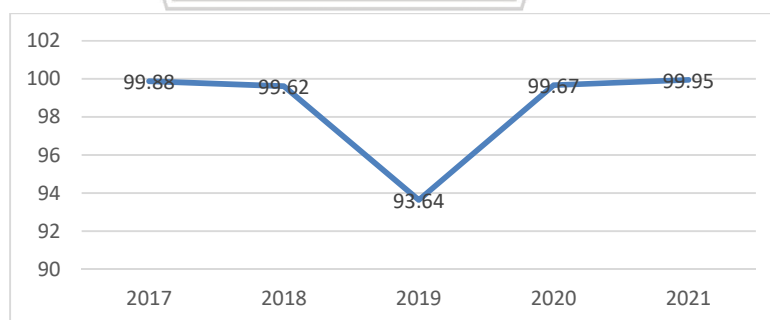
Penjelasan Capaian IKU Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
$\sum$ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN	1419	3196	3765	3524
$\sum$ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN	1422	3196	3765	3524
Persentase	99.79%	100%	100%	100%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 99.88%, 2018 sebesar 99,62%, pada 2019 sebesar 93.64%, dan pada tahun 2020 sebesar 99.67% dan pada tahun 2021 sebesar 99,95%.

Grafik 3.4

Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN 2017-2021



Tabel 3.22

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Penyelesaian SP2D Tepat Waktu

IKU	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.

Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	98%	99.88%	98%	99,62%	98%	93.64%	99.4%	99.67%	99.4%	99.95 %
--	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-------	--------	-------	---------

Tujuan IKU:

Mengukur tingkat penyelesaian SPM yang diajukan oleh Satker.

Isu Utama:

Capaian IKU Presentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu telah mencapai target yang ditentukan, namun demikian masih perlu dicermati ketika jumlah spm yang disampaikan overload.

Implikasi:

Apabila SPM yang masuk dalam jumlah banyak target IKU belum tentu akan tercapai.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Membangun komunikasi antar petugas terkait Pengumuman PPR di grup whatsapp kantor
- Mengatur tahapan proses validasi SPM untuk memberikan waktu dalam proses penyelesaian SPM

Rekomendasi Rencana Aksi

- melakukan evaluasi atas pelaksanaan proses penyelesaian SP2D 1 jam untuk perbaikan ke depan.

4. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi

pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Formula IKU:

Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi

$0 < x \leq 20$	= tidak efektif
$21 < x \leq 40$	= kurang efektif
$41 < x \leq 60$	= cukup efektif
$61 < x \leq 80$	= efektif
$81 < x \leq 100$	= sangat efektif

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat direktorat jenderal perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2021 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama dua semester.

Capaian IKU semester I merupakan hasil penilaian pada tanggal 10 Maret 2021 di aula KPPN Gorontalo dengan responden sebanyak 23 peserta mendapatkan capaian sebesar 90.70. Sementara capaian IKU semester II merupakan hasil penilaian satker peserta EUT SAKTI pada tanggal 3 September 2021 dengan responden sebanyak 72 peserta mendapatkan capaian sebesar 93.88.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2021 sebesar 92.29.

Tujuan IKU:

Untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis perbendaharaan.

Isu Utama dan Implikasi:

Efektivitas edukasi dan komunikasi diukur melalui pengisian kuesioner atau pelaksanaan pretest dan post test pada saat dilaksanakan kegiatan sosialisasi ataupun bimtek. Hal tersebut menggambarkan efektif atau tidaknya edukasi dan komunikasi yang telah dilakukan. Sosialisasi maupun bimtek yang dilaksanakan oleh KPPN saat ini banyak ragam/jenisnya sehingga menyulitkan narasumber untuk fokus pada materi/bahasan tertentu sehingga kedalaman materi berkurang dan tingkat pemahaman peserta juga dikhawatirkan berkurang.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan penyamaan persepsi atas bahan-bahan/materi yang akan disampaikan sebelum dilakukan sosialisasi atau bimtek melalui GKM/diskusi narasumber.
- Memberikan diklat kepada pegawai terkait dengan pengembangan komunikasi melalui media online.
- Melakukan GKM yang narasumbernya dari setiap pegawai secara bergantian.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Pelatihan/GKM terkait komunikasi yang efektif kepada semua pegawai.
- Memberikan hadiah/souvenir kepada peserta yg mendapatkan hasil evaluasi terbaik saat pelatihan

5. Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan

Standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan yaitu pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada satker pengelola APBN sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tingkat implementasi diukur berdasarkan persentase jumlah PPK dan PPSPM (termasuk calon PPK dan PPSPM) yang mengikuti pelaksanaan penilaian kompetensi sampai dengan tahap selesai diverifikasi oleh KPPN sebagai Unit Pelaksana penilaian kompetensi dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Ruang lingkup pengukuran IKU ini di tahun 2021 adalah jumlah sisa pejabat perbendaharaan K/L yang belum melaksanakan penilaian kompetensi sampai dengan tahun 2020 (sebagaimana keterangan terlampir) serta para pejabat perbendaharaan yang baru ditetapkan pada tahun 2021.

Formula Capaian =

$$\frac{\sum \text{Sisa PPK/PPSPM tahun 2020 yang telah melakukan penilaian kompetensi} + \sum \text{PPK/PPSPM tahun 2021 yang telah melakukan penilaian kompetensi}}{\sum \text{Sisa PPK/PPSPM tahun 2020 yang belum melakukan penilaian kompetensi}} \times 100\%$$

IKU ini merupakan IKU Baru dan bersifat progresif sehingga perhitungan capaian akhirnya diambil pada akhir periode penilaian. Berikut Tabel realisasi IKU ini:

Tabel 3.23
Penjelasan Capaian IKU tingkat implementasi standarisasi kompetensi
pejabat perbendaharaan

	Semester I	Semester II	Capaian
Σ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN	36	107	107
Σ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN	354	354	354
Persentase	16%	30.23%	30.23%

Tujuan :

Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah terukur dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada satker pengelola APBN melalui pemenuhan implementasi standarisasi kapasitas pejabat perbendaharaan.

Isu Utama :

Standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan yaitu pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada satker pengelola APBN sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Baru diperkenalkan pada tahun 2020. Media pelatihan (khususnya PPSPM) yang menjadi syarat sertifikasi masih sangat terbatas.

Implikasi :

Banyak pejabat perbendaharaan yang belum bisa memenuhi syarat untuk di sertifikasi

Tindakan yang telah dilaksanakan :

Menyampaikan pengumuman setiap ada pembukaan pelatihan Pejabat perbendaharaan

Rekomendasi Rencana Aksi :

- Proaktif mendampingi pejabat perbendaharaan saat pelatihan PPK dan PPSPM dibuka oleh BPPK/Kantor Pusat DJPb
- Membuka layanan konsultasi online via Google meet terkait prosedur sertifikasi kompetensi pejabat perbendaharaan

6. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2019 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkupnya ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI.

Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2021, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut :

- a) Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan untuk periode semester I dan II tahun 2021 secara tepat waktu (sesuai target dalam Tabel A), dan;
- b) Pencapaian atas jumlah satker yang mengimplementasikan SAKTI tahun 2021 secara nasional (sesuai target dalam Tabel B).

Formula IKU:

Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2021

Total jumlah satker yang ditetapkan mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2021

X 100% X Proporsi Tahapan

➤ Tahapan kegiatan implementasi SAKTI tahun 2021

No	Kegiatan Utama	Target Waktu Pelaksanaan			Bobot (% Tertimbang)
		Mulai	Selesai	Durasi (hari)	
A	B	C	D	E	F
Tahap 1	Penunjukan Trainers Modul SAKTI KPPN (kelompok modul pelaksanaan dan pelaporan)	01-Jan-21	31-Mar-21	89	3%
Tahap 2	Sosialisasi SAKTI <i>Web Full Module</i> kepada Satker Non Piloting	01-Jan-21	31-Mar-21	89	6%
Tahap 3	Pendampingan transaksi awal dan Migrasi Saldo Awal SAKTI Satker Piloting tahap V	01-Jan-21	30-Jun-21	180	6%
Tahap 4	Pendaftaran pengguna SAKTI Satker non piloting	01-Mar-21	30-Jun-21	121	12%
Tahap 5	FGD SAKTI KL dengan Kategori Mega (Kemenag, MA, Polri, Kemenkumham) dan DK/TP	01-Apr-21	30-Jun-21	90	8%

Tahap 6	Publikasi tahap 1 SAKTI	01-Apr-21	30-Jun-21	90	5%
Tahap 7	Fasilitasi <i>Change Readiness Survey</i> Satker Non Piloting	01-Apr-21	31-Oct-21	213	7%
Tahap 8	Monev Implementasi SAKTI Satker Piloting SAKTI Tahap I s.d. V	01-Jul-21	30-Sep-21	91	5%
Tahap 9	Workshop/Rakor SAKTI manajerial (KPA Satker non piloting)	01-Jul-21	30-Sep-21	91	6%
Tahap 10	EUT SAKTI Satker Non Piloting	01-Jul-21	31-Oct-21	122	20%
Tahap 11	Publikasi tahap 2 SAKTI	01-Oct-21	31-Dec-21	91	5%
Tahap 12	Pemutakhiran data pengguna SAKTI Satker <i>rollout</i>	01-Oct-21	31-Dec-21	91	7%
Tahap 13	Pendampingan Pembuatan SPM Gaji Induk Januari TA 2022	01-Dec-21	31-Dec-21	30	10%

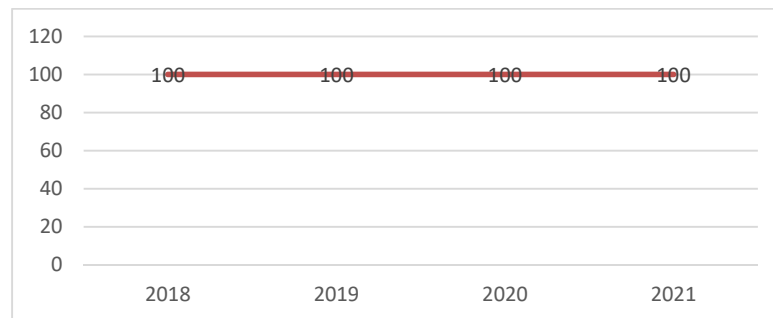
Tabel 3.24
Penjelasan Capaian SAKTI

Periode	Tahapan	Tahapan Kegiatan	Target	Capaian
Semester I	Tahap 1	Penunjukan Trainers Modul SAKTI KPPN (kelompok modul pelaksanaan dan pelaporan)	3%	3%
	Tahap 2	Sosialisasi SAKTI <i>Web Full Module</i> kepada Satker Non Piloting	6%	6%
	Tahap 3	Pendampingan transaksi awal dan Migrasi Saldo Awal SAKTI Satker Piloting tahap V	6%	6%
	Tahap 4	Pendaftaran pengguna SAKTI Satker non piloting	12%	12%
	Tahap 5	FGD SAKTI KL dengan Kategori Mega (Kemenag, MA, Polri, Kemenkumham) dan DK/TP	8%	8%
	Tahap 6	Publikasi tahap 1 SAKTI	5%	5%
	Tahap 7	Fasilitasi <i>Change Readiness Survey</i> Satker Non Piloting	7%	7%
Semester II	Tahap 8	Monev Implementasi SAKTI Satker Piloting SAKTI Tahap I s.d. V	5%	5%
	Tahap 9	Workshop/Rakor SAKTI manajerial (KPA Satker non piloting)	6%	6%
	Tahap 10	EUT SAKTI Satker Non Piloting	20%	20%
	Tahap 11	Publikasi tahap 2 SAKTI	5%	5%

	Tahap 12	Pemutakhiran data pengguna SAKTI Satker <i>rollout</i>	7%	7%
	Tahap 13	Pendampingan Pembuatan SPM Gaji Induk Januari TA 2022	10%	10%

Capaian IKU ini baru ada pada tahun 2018 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 sebesar 100,00%.

Grafik 3.5
Capaian IKU SAKTI 2018-2021



Tujuan IKU:

Mengetahui tingkat keberhasilan implementasi Aplikasi SAKTI tahun 2021 pada seluruh satker Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam PMK Implementasi SAKTI Tahun 2021.

Isu Utama:

Implementasi SAKTI merupakan salah satu upaya dalam rangka menjamin kondisi pelayanan prima kepada satker. Piloting implementasi SAKTI tahap V telah tertuang dalam KMK No 537/KMK.05/2020 sehingga harus dipastikan dapat berjalan sesuai tahapan/rencana.

Implikasi:

Dalam tahap-tahap selanjutnya harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai tahapan yang telah direncanakan

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan EUT SAKTI untuk semua Modul SAKTI kepada satker Piloting
- Melaksanakan publikasi SAKTI kepada seluruh satker
- Melakukan sosialisasi Tahap I mengenai Review SAKTI kepada seluruh satker sebagai salah satu bagian dalam Bimtek Aplikasi kepada satker
- Training modul admin dan penganggaran SAKTI berbasis web

- Melakukan publikasi dan komunikasi SAKTI tahap III untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK

Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan persiapan pelaksanaan pemdampingan SAKTI tahap berikutnya ke seluruh satker
- Melaksanakan FGD SAKTI level eksekutif kepada satker-satker Mega

7. Persentase akurasi perencanaan kas KPPN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, perencanaan kas akumulasi RPD Harian, Rencana Penerimaan Dana, dan proyeksi pengeluaran/penerimaan unit eselon I Kementerian Keuangan selama periode tertentu untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dituangkan dalam perencanaan kas pemerintah pusat.

Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi Rencana Penarikan Dana Satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan sebagai penarikan dana yang akurat dalam formulasi akurasi RPD Satker.

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

Formula perhitungan capaian IKU

$$100\% - (\text{Rata - Rata Deviasi RPD harian KPPN per periode})$$

Keterangan:

Tingkat deviasi RPD diperoleh dari Laporan Deviasi dari Modul Renkas pada Aplikasi OMSPAN untuk kemudian disesuaikan dengan penyesuaian deviasi RPD.

Penyesuaian deviasi adalah:

- Pemberian dispensasi RPD atas pengajuan SPM, deviasinya dihitung 0%.
- Penyesuaian RPD satker BA BUN yang tidak terealisasi SPM-nya.
- Penyesuaian RPD atas SPM-KP yang SPM-nya melebihi batas waktu update RPD Harian (4 hari kerja).

- d. Penghapusan deviasi pada RPD harian akibat satker tidak mengajukan SPM sesuai RPD harian yang telah disampaikan.
- e. Penghapusan deviasi pada beberapa RPD Harian yang nilainya sama di beberapa tanggal yang berurutan, tapi satker hanya mengajukan 1 SPM
- f. Sepanjang belum ada update aplikasi terkait RPD Harian (a.l. SAKTI / SAS / Konversi), deviasi atas pengajuan SPM dengan nilai 1 miliar rupiah sampai dengan 4,9 miliar rupiah dihitung 0%.

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat direktorat jenderal perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2021 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.25

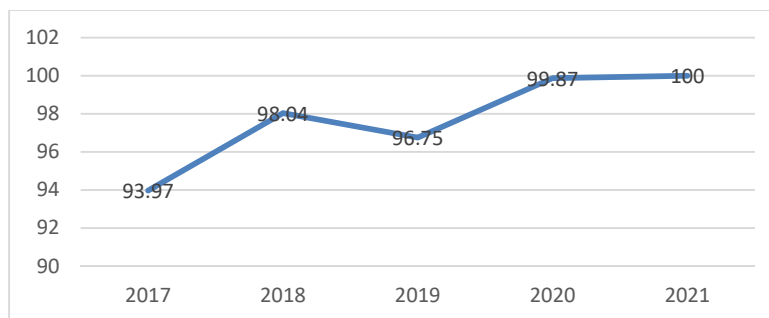
Penjelasan Capaian akurasi perencanaan kas KPPN

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Persentase Rata-rata Deviasi RPD Satker	0%	0.006%	0%	0%
Capaian	100%	99.99%	100%	100%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 93.97%, 2018 sebesar 98.04%, pada tahun 2019 sebesar 96.75%, pada tahun 2020 sebesar 99.87%, dan pada tahun 2021 sebesar 100%

Grafik 3.6

Capaian IKU Akurasi Perencanaan Kas 2017-2021



Tabel 3.26
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Akurasi Perencanaan Kas

IKU	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	85	93.97	85	98.04	85	96.75	80	99.87	82	100

Tujuan IKU:

Untuk mengoptimalkan peran KPPN dalam melakukan pembinaan dan supervisi terhadap akurasi perencanaan kas satker.

Isu Utama:

Ketepatan penyampaian RPD oleh satker wujud garansi kualitas perencanaan satuan kerja. Sesuai ketentuan baru tentang RPD (PMK 197/PMK.05/2017) penyampaian/pelaksanaan RPD telah banyak diberikan kemudahan-kemudahan bagi satker, antara lain penyampaian SPM tanpa RPD namun dilengkapi adanya Surat Pernyataan KPA ttg penundaan pencairan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan RPD, baik di satker maupun KPPN.

Implikasi:

RPD dapat lebih akurat.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Sosialisasi tentang ketentuan baru RPD (PMK 197/PMK.05/2017).
- Sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2020, salah satu materinya terkait perencanaan kas
- Sosialisasi dan bimtek secara intensif
- Perlu dilakukan kegiatan pendampingan khususnya terhadap satker dengan pagu besar
- Menyampaikan teguran kepada satker yang tidak memenuhi RPD sesuai yang telah disampaikan

Rekomendasi Rencana Aksi

Secara aktif melakukan updating data perencanaan kas yg disampaikan oleh satker

8. Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas

Efektivitas pengeluaran kas KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder.

IKU ini memiliki formula (70% nilai indeks A) + (30% Nilai Indeks B)

Dimana Indeks A

$$\frac{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan} - \sum \text{penerima pada SP2D yang diretur oleh BO}}{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Dan Indeks B

$$\frac{\{[n \text{ SP2D} - P \text{ I1} * 1] + [n \text{ SP2D} - P \text{ I2} * 2] + [n \text{ SP2D} - P \text{ I3} * 3] + [n \text{ SP2D} - P \text{ I4} * 4]\}}{\sum n \text{ SP2D} - P}$$

IKU ini ditetapkan dengan target 3,15 dari skala 4 dan penilaian dilakukan setiap triwulan.

Tabel 3.27

Penjelasan Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Kas

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Penyaluran SP2D Yang Akurat	4	4	4	4
SP2D yang diterbitkan	85740	89912	79915	127589
SP2D yang Diretur	44	91	592	360
Kecepatan Penyelesaian Retur	4	4	4	4
SP2D pengganti sesuai indeks 1	4	4	4	4
SP2D pengganti sesuai indeks 2	-	-	-	-
SP2D pengganti sesuai indeks 3	-	-	-	-

SP2D pengganti sesuai indeks 4	-	-	-	-
Total SP2 pengganti	44	44	44	44
Konversi Indeks A (70%)	2.8	2.8	2.8	2.8
Konversi Indeks B (30%)	1.2	1.2	1.2	1.2
Nilai Konversi	4	4	4	4

IKU ini pada tahun 2021 sendiri capaiannya adalah 4.

Tujuan IKU

Meningkatkan efektifitas pengelolaan pengeluaran kas melalui akurasi penyaluran dana SP2D dan penyelesaian retur SP2D

Isu Utama

Masih banyaknya retur yang terjadi pada SPM yang diajukan satker.

Implikasi

Penyaluran dana terlambat masuk ke rekening satker sehingga menghambat realisasi satker

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan

- Mengirim surat pemberitahuan retur secara tepat waktu dan berkoordinasi dengan satker untuk mempercepat penyelesaian retur
- Menyampaikan upaya pencegahan SP2D retur kepada satuan kerja melalui baik melalui sarana rapat/sosialisasi atau pada saat satker melakukan konsultasi/koordinasi dengan KPPN
- Mendorong perbaikan SP2D retur oleh satker dilakukan sebelum jatuh tempo

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan sosialisasi tentang alur retur SP2D kepada satker sebagai langkah preventif untuk tahun selanjutnya.

9. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus

dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan
2. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran
3. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
4. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi

Setiap aspek memiliki beberapa variabel yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan satker K/L.

Jumlah dan rincian variabel untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Formula perhitungan IKU ini adalah

Hasil penilaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN

Metode penilaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN adalah sebagai berikut:

$$IKPA = \sum (\text{Bobot} \times \text{Nilai Variabel}) \times 100$$

Keterangan:

1. IKPA adalah Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L.
2. Tata cara perhitungan nilai IKPA diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan.

Target IKU ini telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat *average* dan triwulanan, sehingga realisasi tahun 2021 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.28

Penjelasan Capaian IKU IKPA

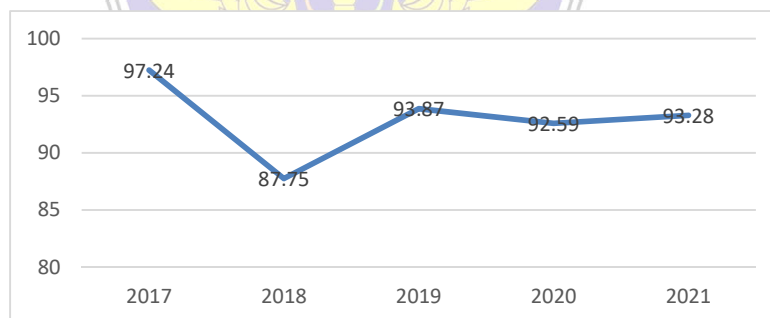
Keterangan	Bobot (%)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Nilai	Nilai Akhir	Nilai	Nilai Akhir	Nilai	Nilai Akhir	Nilai	Nilai Akhir
REV	5	100	5	100	5	100	5	100	5
HAL3	5	70.98	0	91.45	4.57	86.89	4.34	85.75	4.29
MIN	5	99.16	4.96	99.16	4.96	99.16	4.96	99.16	4.96

REAL	15	87.34	8.73	88.1	8.81	94.78	9.48	98.82	9.88
TAG	12	96.92	7.75	91.73	7.34	93.25	7.46	92.29	7.38
KCO	10	98.79	4.94	99.09	4.95	99.09	4.95	98.48	4.92
RTR	5	100	5	100	5	100	5	100	5
RPD	5	100	15	100	15	100	15	100	15
SPM	5	98.73	9.87	95.19	9.52	99.13	9.91	98.48	9.85
KTR	15	48.24	0	66.27	11	80.28	14	77.23	13
PUP	8	99.52	4.98	99.53	4.98	99.63	4.98	99.82	4.99
LPJ	5	100	5	100	5	100	5	100	5
DSPM	5	80	4	85	4.25	85	4.25	85	4.25
Nilai Total		75.23		90.95		93.36		93.65	
Konversi Bobot		78%		100%		100%		100%	
Nilai Akhir		94.65		90.95		93.36		93.65	

Capaian IKU ini merupakan hasil penilaian IKPA pada menu Monev PA Sub menu Capaian IKU IKPA (BETA) di aplikasi OMSPAN.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 97.24%, 2018 sebesar 87,75%, pada tahun 2019 sebesar 93.87, pada tahun 2020 sebesar 92.59%, dan pada tahun 2021 sebesar 93.28%

Grafik 3.7
Capaian IKU IKPA 2017-2021



Tabel 3.29
Perbandingan Target dan Realisasi IKU IKPA

IKU	2017		2018		2019		2020		2021	
	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Real.	Target	Real.
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	75	97.24	75	87.75	80	93.87	88	92.59	89	93.28

Tujuan IKU:

Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L.

Isu Utama:

Kualitas kinerja satker yang dinilai dari aspek perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dengan variabel retur SP2D, aspek efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi perlu dijaga konsistensinya. IKPA K/L merupakan salah satu komponen dalam kinerja KPPN yang dapat mempengaruhi persepsi stakeholders dalam melakukan penilaian atas kinerja KPPN secara keseluruhan

Implikasi:

Persepsi penilaian stakeholders, terutama Kantor Pusat DJPb kurang baik efektivitas edukasi dan komunikasi.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan reviu pelaksanaan anggaran setiap bulan
- Mengadakan sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2021 diawal tahun
- Sebagai pengganti Monev IKPA akan dibuat reminder bagi satker yang belum memaksimalkan IKPA
- Membentuk task force untuk mengawal kinerja pelaksanaan anggaran satker
- Reminder satker pada saat batas-batas akhir pengajuan SPM

Rekomendasi Rencana Aksi

- Mengoptimalkan penggunaan Sosial Media KPPN Gorontalo dengan menyajikan informasi dan tutorial bagi satker
- Aktif menyampaikan pentingnya pengelolaan anggaran yang baik yang diukur dari capaian IKPA

10. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN (PROYEKSI).
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)
5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

Formula IKU ini adalah

$$\text{NKP DDD} = [0,10 (\text{SYARAT}) + (0,20 (\text{PROYEKSI}) + 0,30 (\text{SPPSPM}) + 0,20 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA})] \times 100$$

Keterangan:

NKP TKDD adalah adalah Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik, DAK non fisik (BOS), dan Dana Desa.

SYARAT adalah rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian (dhi. pengunggahan/upload melalui aplikasi omSPAN) dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik oleh pemda per bidang/subbidang dengan mengacu pada ketentuan mengenai petunjuk teknis penyaluran DAK Fisik pada Ditjen Perbendaharaan. Penentuan nilai indeks ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang per tahap penyaluran (Nilai Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan DAK Fisik) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
100 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 2 bulan (60 hr kalender) sebelum batas waktu yang ditentukan.

95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 1 bulan (30 hr kalender) sebelum batas waktu yang ditentukan.

90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 1 bulan (30 hari) sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

75 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi)

SYARAT = Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian = $\sum \text{NIKWPDP DAK F} / \text{Jumlah penyaluran DAK F per bidang per tahap penyaluran yang siap disalurkan.}$

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SYARAT" bersifat data kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait.

PROYEKSI Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PasalKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan Penyaluran DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.

Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa adalah setiap 5 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir dengan menggunakan aplikasi SAKTI.

% Akurasi = $100\% - (\text{Rata - Rata Deviasi Proyeksi Penyaluran DAKDD per periode})$

$$\text{Deviasi} = \left[\frac{\text{RPD Bulanan} - \text{Realisasi Penyaluran}}{\text{RPD Bulanan}} \right] \times 100\%$$

Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari:

Penentuan nilai indeks proyeksi penyaluran DAKDD dihitung dengan ketentuan sistem layering deviasi sebagai berikut:

100 = deviasi per periode 0%;

90 = deviasi per periode 1 % sd 15%

80 = deviasi per periode 16% sd 30%

0,00 = deviasi per periode di atas 30%.

Cetakan proyeksi pada aplikasi SAKTI disampaikan kepada Koordinator KPA pada alamat <http://10.242.231.124> dalam bentuk softfile (pdf) yang telah ditandatangani KPA paling lambat 5 HK sebelum akhir bulan berkenaan.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "PROYEKSI" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya

SPPSPM

adalah indeks ketepatan waktu penyaluran dana transfer DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran, dengan kriteria sebagai berikut:

a. penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran dilakukan paling lambat 5 HK setelah dokumen persyaratan telah diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa dengan lengkap dan benar (bobot: 0,8)

b. Ketepatan waktu penyelesaian retur SP2D penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (bobot: 0,2)

$$SPPSPM = ((\text{Jumlah tagihan DAKDD yang diselesaikan proses pembayarannya tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tagihan DAKDD yang diproses KPPN}) \times 0,8) + ((\text{Jumlah retur yang diselesaikan tepat waktu} / \text{jumlah total retur}) \times 0,2)$$

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SPPSPM" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan

berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

MONEV adalah nilai indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Kanwil dan tembusan Koordinator KPA Penyaluran sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dan/atau Nota Dinas yang diterbitkan oleh Kantor Pusat. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa oleh KPA Penyaluran disampaikan kepada Kanwil DJPb dan Koordinator KPA Penyaluran melalui Nadine dan portal <http://10.242.231.124> paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir dan/atau sesuai dengan Nota Dinas Kantor Pusat.

Penentuan nilai indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa oleh KPPN dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
100 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

95 = dokumen laporan monev disampaikan 3-1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

90 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.

65 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat sesudah batas waktu yang ditentukan.

0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan sampai dengan akhir triwulan penilaian.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "MONEV" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).

LK-UAKPA adalah Nilai kelengkapan, pengungkapan laporan keuangan yang memadai dan ketepatan waktu penyampaian LK BUN tingkat UAKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PMK 221/PMK.05/2016 serta PMK 83/PMK.05/2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN adalah sebagai berikut:

- a. LK Bulanan berupa LRA dan Neraca disampaikan paling lambat tanggal 13 bulan berikutnya.
- b. LK Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli TA berjalan.
- c. LK Triwulan III disampaikan pada bulan 15 Oktober TA berjalan
- e. LK Tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 23 April TA berikutnya.

$$LK-UAKPA = \{(nilai\ ketepatan\ waktu \times 0,1) + (nilai\ kelengkapan\ dan\ pengungkapan\ laporan\ keuangan\ yang\ memadai \times 0,9)\}$$

LK tingkat UAKPA BUN disampaikan kepada UAKKPA melalui Nadine dan Portal <http://10.242.231.124/> sesuai ketentuan batas waktu yang ditentukan di atas atau ditentukan lain oleh surat Dirjen Perbendaharaan/ Direktur APK.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka hanya digunakan data pada periode triwulan berkenaan dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).

Dalam kondisi normal, batas waktu mengacu pada PMK 221/PMK.05/2016 dan kelengkapan mengacu pada PMK 83/PMK.05/2018. Namun dalam kondisi tertentu batas waktu penyampaian LK dapat juga diatur dengan Nota Dinas/Surat yang diterbitkan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi

tahun 2021 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.30

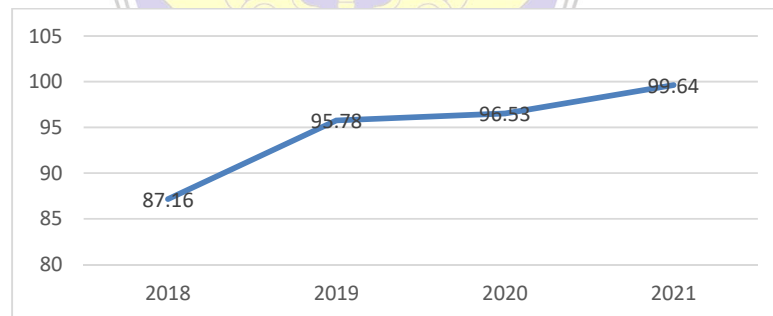
Penjelasan Capaian IKU kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
SYARAT	N/A	9.69	9.58	N/A
PROYEKSI	20	20	20	20
SSPSPM	30	30	30	30
MONEV	20	20	20	20
LK-UAKPA	20	20	20	19.80
NKP DFDD	90	99.69	99.58	99.03

Capaian IKU ini baru ada pada tahun 2018 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2018 sebesar 87,16; pada tahun 2019 sebesar 95.78; tahun 2020 sebesar 96.53, dan pada tahun 2021 sebesar 99.64

Grafik 3.8

Capaian IKU DAK dan Dana Desa KPPN 2018-2021



Tujuan IKU:

Untuk mengetahui kinerja Pemda, serta KPA penyaluran DAK dan Dana Desa dalam kegiatan pelaksanaan anggaran penyaluran transfer ke daerah secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Isu Utama:

Terdapat retur pada dana bos (dak non fisik) karena kesalahan rekening dari dinas serta Masih ada kontrak yang berjalan sehingga belum bisa dilakukan proses penginputan SP2D bud dak fisik oleh dinas/opd

Implikasi:

Masih ada dana bos yang belum tersalur ke rekening sekolah serta lambatnya proses penginputan SP2D bud untuk mengetahui realisasi dan sebagai syarat penyaluran dak fisik tahun berikutnya

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dit PA dan SITP untuk penyelesaian retur BOS
- Berkoordinasi dengan pemda dan dinas untuk penginputan SP2D BUD.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Aktif berkoordinasi dengan Dit.PA, Dit SITP, dan Pemerintah Daerah
- Mempush pemda dan opd untuk selalu mengupdate kontrak yang sudah selesai

11. Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang di dalamnya memuat informasi kinerja yang hendak dicapai Satker dalam satu tahun anggaran. Informasi kinerja tersebut di antaranya berupa target Rincian Output (RO) yang mencantumkan target kuantitatif dari produk akhir berupa barang/jasa yang akan dihasilkan dari berbagai aktivitas belanja Satker. Untuk mendukung peran BUN dalam mengawal ketercapaian RO dan outcome belanja pemerintah, diperlukan mekanisme pelaporan dan pengumpulan data capaian output Satker. Proses pelaporan tersebut dilakukan melalui aplikasi OMSPAN yang dilaksanakan secara bulanan.

Formula IKU

Metode penilaian tingkat partisipasi pelaporan data capaian output Satker pada Aplikasi OMSPAN adalah sebagai berikut:

Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output = Rata-Rata Tingkat Partisipasi Pelaporan Bulanan dalam satu triwulan.

Tingkat Partisipasi Pelaporan Bulanan = $\left[\frac{(\text{Jumlah Satker Yang Melaporkan data di open period reguler} \times 1,0) + (\text{Jumlah Satker yang Melaporkan data di open period tambahan} \times 0,5)}{\text{Jumlah Satker yang Wajib Melaporkan Data Capaian Output}} \right]$

Keterangan:

- Tingkat Partisipasi Pelaporan Bulanan adalah Persentase yang menunjukkan tingkat kepatuhan seluruh Satker lingkup wilayah kerja KPPN dalam melaporkan seluruh data capaian outputnya sesuai periode pelaporan yang ditentukan.
- Jumlah Satker yang Melaporkan data di open period regular adalah jumlah Satker yang telah melaporkan seluruh data capaian outputnya pada aplikasi OMSPAN pada open period regular. Open period regular adalah periode pelaporan yang ditentukan secara otomatis oleh sistem (OMSPAN) mulai tanggal 1 s.d. 10 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 adalah hari libur, maka batas akhir pelaporan open period regular adalah hari kerja pertama setelah tanggal 10 bulan berikutnya.
- Jumlah Satker yang melaporkan data di open period tambahan adalah jumlah Satker yang memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh data capaian outputnya pada aplikasi OMSPAN pada periode tertentu. Satker yang memiliki kewajiban untuk melaporkan data capaian outputnya adalah (1) Satker K/L dan Satker BUN pengelola DAK Fisik/Dana Desa yang mengelola DIPA aktif pada periode/bulan tertentu, dan (2) Satker K/L dan Satker BUN pengelola DAK Fisik/Dana Desa pengguna aplikasi SAS atau SAKTI yang telah menunjuk pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.

IKU ini merupakan IKU Baru di tahun 2021 yang targetnya telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2021 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.31
Penjelasan Capaian IKU Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output
satker

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Jumlah Satker Yang Melaporkan data di open period reguler	411%	647	664	664
Jumlah Satker yang Melaporkan data di open period tambahan	0	12	4	2
umlah Satker yang Wajib Melaporkan Data Capaian Output	429	659	668	666
Capaian	95.8%	99.9%	99.7%	99.8%

Capaian pada tahun 2021 sebesar 98.6%.

Tujuan IKU:

Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja belanja pemerintah melalui pelaporan data capaian output Satker pada aplikasi OMSPAN.

Isu utama:

- Redesain sistem penganggaran membuat satker belum familier dengan nomenklatur rincian output.
- Banyak satker yang belum melakukan pencairan anggaran sehingga belum ada realisasi RO.
- Target RO pada DIPA banyak yang tidak rasional (kualitas perencanaan nya perlu diperbaiki)

Implikasi :

- Banyak satker belum berhasil melakukan pengisian data capaian RO
- Terjadi misspersepsi bahwa realisasi anggaran nol tidak wajib menyampaikan data capaian RO
- Menyulitkan pada saat akan dilakukan perhitungan capaian RO

Tindakan yang telah dilakukan:

- Sosialisasi mekanisme penyampaian data capaian RO

- Melakukan monev penyampaian data capaian RO

Rekomendasi rencana aksi:

Menyampaikan surat kepada KPA untuk lebih aware dengan pelaporan data capaian output.

12. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan:

- (1) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%)
- (2) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan. Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki Suspen Belanja (ambang batas suspen 0%) dan Kas di BP (ambang batas 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Triwulan 1 2021 = Desember 2020 - Februari 2021

Triwulan 2 2021 = Maret - Mei 2021

Triwulan 3 2021 = Juni - Agustus 2021

Triwulan 4 2021 = September - November 2021

Formula perhitungan capaian IKU sebagai berikut

$$\text{Capaian IKU} = 50\% \left(\frac{a}{c} \right) + 50\% \left(\frac{b}{c} \right)$$

- Keterangan :
- a= Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu
 - b= Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas suspen dan status BAR sudah ditandatangani oleh KPA dan Kepala Seksi Vera
 - c= Jumlah satker aktif pada periode berkenaan

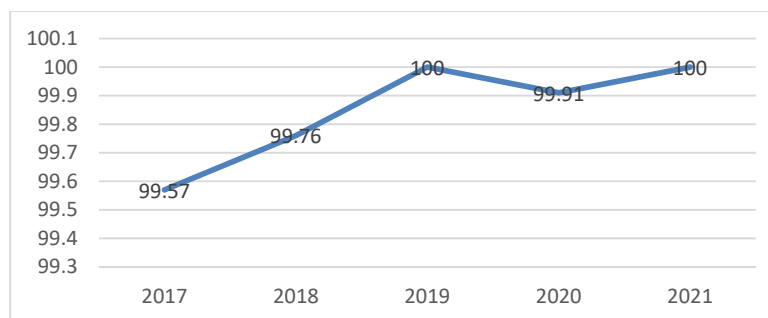
Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2021 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.32
Penjelasan Capaian IKU Rekonsiliasi Tingkat UAKPA

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu	227	N/A	669	669
Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas suspen	-	N/A	669	669
Jumlah satker aktif pada periode berkenaan	227	N/A	669	669
Persentase	100%	N/A	100%	100%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 99.57%, 2018 sebesar 99,76%, 2019 sebesar 100%, 2020 sebesar 99.91%, dan 2021 sebesar 100%.

Grafik 3.9
Capaian IKU Rekonsiliasi UAKPA 2017-2021



Tabel 3.33
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Rekonsiliasi UAKPA

IKU	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	97	99.57	98	99.76	98.1	100	98.1	99.91	98.1	100

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mendorong KPPN agar selalu melakukan upaya terus menerus dalam pelaksanaan rekonsiliasi seluruh UAKPA lingkup wilayah kerjanya.

Isu Utama:

Masih terdapat satker yang kurang paham/tidak tahu jadwal periode open dan closed period upload e-rekon SAIBA

Implikasi:

Keterlambatan akan berpengaruh pada capaian IKU

Tindakan yang telah dilaksanakan

Penerbitan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat meng-upload data e-rekon SAIBA dan Mengingatkan kepada satker melalui surat, telepon, dan telegram mengenai batas waktu / open period upload data e-rekon SAIBA bulan berkenaan

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan monitoring dan Evaluasi kepada satker

13. Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Bendahara pada Satuan

Kerja Pengelola APBN yang menggunakan aplikasi pengelolaan rekening yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

Berdasar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3303/PB/2018, pengelolaan rekening tersebut menggunakan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) sejak 2018.

Sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2021 merupakan rata-rata data bulan Desember 2020, bulan Januari dan Februari tahun 2021. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2021 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April dan Mei tahun 2021. dst.

Formula IKU

$$\frac{\sum \text{LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN}} \times 100 \%$$

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2021 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.34

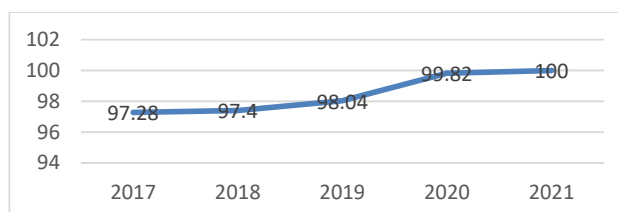
Penjelasan Capaian IKU LPJ

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
$\sum$ LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	789	772	773	774
$\sum$ LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN	789	772	773	774
Persentase	100%	100%	100%	100%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 97.28%, 2018 sebesar 97,4; pada tahun 2019 sebesar 98.04, tahun 2020 sebesar 99.82%, dan tahun 2021 sebesar 100%

Grafik 3.10

Capaian IKU LPJ Bendahara 2017-2021



Tabel 3.35

Perbandingan Target dan Realisasi LPJ Bendahara

IKU	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	95	97.28	95	97.4	95	98.04	98	99.82	98	100

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas dan tingkat kepatuhan Bendahara Satker dalam menyusun dan menyampaikan LPJ Bendahara.

Isu Utama:

Masih ada beberapa satker yang terlambat menyampaikan LPJ Bendahara.

Implikasi:

Berpengaruh kepada capaian IKU.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Penerbitan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat menyampaikan LPJ ke KPPN.
- Mengingatkan kepada satker melalui surat dan telegram mengenai penegasan kewajiban satker dalam penyampaian LPJ Bendahara

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan monitoring dan evaluasi kepada satker.

14. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO). Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2021.
- b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2020.

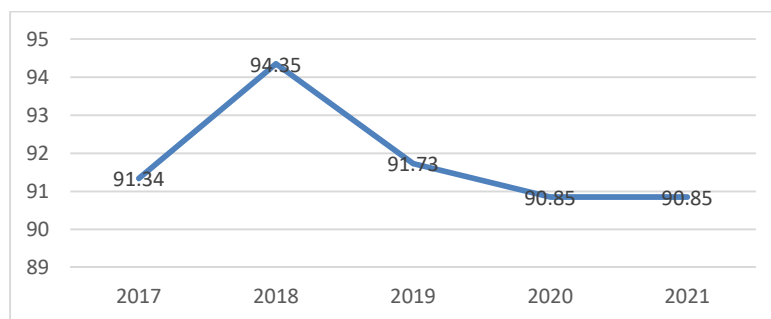
Formula IKU ini adalah nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan tahunan. Capaian IKU ini berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-330/PB/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020, KPPN Gorontalo mendapatkan nilai 88,3.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 91,34, 2018 sebesar 94,35, tahun 2019 sebesar 91,73 , tahun 2020 sebesar 90,85 dan tahun 2021 sebesar 88,3.

Grafik 3.11

Capaian IKU *Strategy Focused Organization* 2017-2021



Tabel 3.36

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Edukasi dan Komunikasi

IKU	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	79	91.34	81	94.35	83	91.73	83	90.85	84	88.3

Tujuan:

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di setiap unit lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Isu Utama:

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di KPPN Gorontalo dilakukan langkah-langkah peningkatan kualitas kinerja. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas kinerja di lingkungan ditjen perbendaharaan, kantor pusat ditjen perbendaharaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit-unit masing-masing.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Pelaksanaan dialog kinerja organisasi dan individu
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan matriks SFO

Rekomendasi Rencana Aksi

Merutinkan pelaksanaan dialog kinerja organisasi.

15. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal.

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada Kanwil DJPb, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi (bobot: 55%)
3. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

Formula IKU ini adalah hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

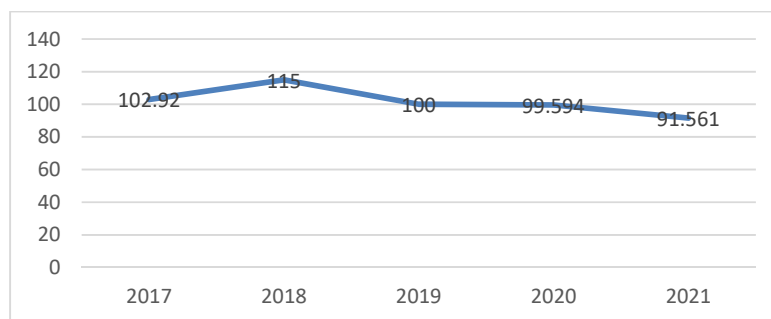
Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan tahunan.

Capaian IKU ini berdasarkan nota dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor ND-1151/WPB.29/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2021 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo KPPN Gorontalo mendapatkan nilai 91.561.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 102.92, 2018 sebesar 115, tahun 2019 sebesar 100, pada tahun 2020 sebesar 99,594 dan pada tahun 2021 sebesar 91,561.

Grafik 3.12

Capaian IKU Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 2017-2021



Tabel 3.37

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tugas Kepatuhan Internal

IKU	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	90	102.92	90	115	90	100	80	99.594	83	91.561

Tujuan:

Untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Kanwil DJPb

Isu Utama:

Pelaporan/evaluasi atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern bersifat dinamis sehingga penyesuaian-penyesuaian terkait dengan format, mekanisme dan periode harus segera dilakukan secara konsisten karena akan berdampak pada hasil penilaian evaluasi. Penilaian hasil evaluasi penerapan PPI dilakukan oleh Kanwil DJPb.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Menyusun laporan dan menyampaikannya secara tepat waktu.
- Menyusun laporan PPI dengan format baru sesuai KMK 940
- Melakukan update ketentuan terkait pemantauan pengendalian intern

Rekomendasi Rencana Aksi

Membuat kalender pelaporan KI

16. Nilai rata-rata hard competency pegawai

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai.

Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan.

Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing.

Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available).

Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol).

Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.

Formula IKU ini adalah

**Jumlah nilai hasil tes *hard competency* yang
diperoleh pegawai**

**Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes *hard
competency***

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan tahunan.

Rincian IKU ini adalah :

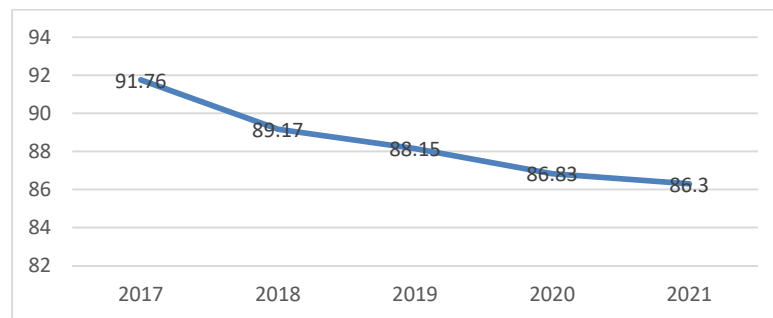
Tabel 3.38

Penjelasan Capaian IKU *Hard Competency*

Total Nilai	1122
Total Pegawai	13
Rata-rata	86.3

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 91.76, 2018 sebesar 89,17; 2019 sebesar 88.15; 2020 sebesar 86.83 dan 2021 sebesar 86,3.

Grafik 3.13
Capaian IKU *Hard Competency* 2017-2021



Tabel 3.39
Perbandingan Target dan Realisasi IKU *Hard Competency*

IKU	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	75	91.76	77	89.17	77	88.15	77	86.83	78	86.3

Tujuan:

IKU ini bertujuan mendorong Kepala KPPN sebagai pimpinan unit agar secara berkelanjutan selalu melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi para pegawai.

Isu Utama:

Kurangnya pemahaman proses bisnis dan aturan secara merata/menyeluruh bagi pegawai di satu seksi dapat mengakibatkan rendahnya capaian IKU ini.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Penyelenggaraan GKM secara periodik dan intensif.
- Mempelajari aturan yang berlaku pada masing-masing seksi

Rekomendasi Rencana Aksi

- Mengadakan diskusi dan sharing sessions secara berkala di satu seksi untuk membahas aturan dan SOP di seksi lain serta review soal-soal tahun sebelumnya sebagai bahan referensi pembelajaran.
- Meningkatkan pengetahuan untuk mendapatkan nilai yang memenuhi standar IKU.

17. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Formula perhitungan realisasi IKU=

Capaian IKU PKPA
Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret

Capaian IKU PKPA
Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni

Capaian IKU PKPA
Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September

Capaian IKU PKPA
Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60%
Capaian SMART

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average dan triwulanan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.40

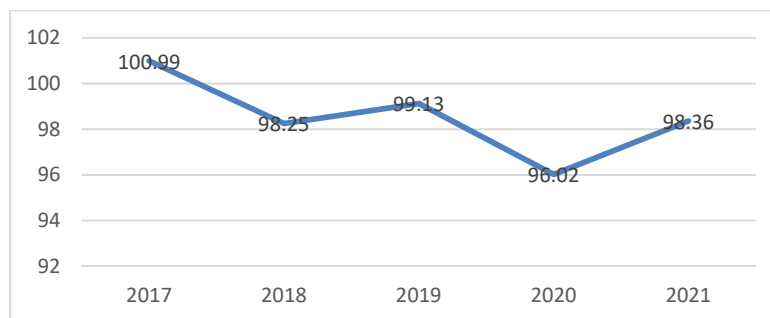
Penjelasan Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator IKU kualitas pelaksanaan anggaran	Bobot	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Nilai	Hasil	Nilai	Hasil	Nilai	Hasil	Nilai	Hasil
Revisi DIPA	5%	100	5	75	3.75	83.33	4.17	87.5	4.38
Hal III DIPA	5%	0	0	97.17	4.86	98.58	4.93	98.94	4.95
Pagu Minus	5%	99.41	4.97	100	5	100	5	100	5
Data Kontrak	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan UP	8%	100	8	100	8	95	7.6	96	7.68
LPJ Bendahara	5%	67	3.35	100	5	100	5	100	5
Dispensasi SPM	5%	100	5	100	5	100	5	100	5
Penyerapan Anggaran	15%	100	15	100	15	100	15	100	15
Penyelesaian Tagihan	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
Konfirmasi Capaian Output	17%	0	0	100	17	100	17	100	17
Retur SP2D	5%	100	5	100	5	100	5	100	5
Renkas	5%	0	0	0	0	0	0	0	0
Kesalahan SPM	5%	100	5	100	5	100	5	100	5
Capaian			99,94		98,14		98,26		97,09

Target IKU ini ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2016 sebesar 101.25%, 2017 sebesar 100.99%, 2018 sebesar 98,25%, pada tahun 2019 sebesar 99.13%, 2020 sebesar 96.02% dan pada tahun 2021 sebesar 98,36%

Grafik 3.14

Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran 2017-2021



Tabel 3.41
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95	100.99	95	98.25	95	99.13	95	96.02	95,5	98,36

Tujuan:

Mengukur kualitas pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan IKPA dan SMART.

Isu Utama

Capaian IKU ini mencerminkan capaian output terkait kinerja pelaksanaan anggaran KPPN sebagai satker. Unsur yang diukur pada IKU ini dilihat dari penilaian komponen hasil dari SMART dan komponen proses dari IKPA.

Implikasi

Capaian output, kinerja anggaran serta realisasi satker sesuai yang direncanakan dan optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Menyusun rencana kegiatan tahunan satker selama tahun 2021
- Melaksanakan dan mengontrol realisasi satker sesuai RPD Halaman III DIPA

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dalam rangka kontrol kesesuaian RPD

18. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Ditjen Perbendaharaan. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

- a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
- b) keakuratan data laporan keuangan
- c) kepatuhan pelaksanaan anggaran
- d) Penyajian Laporan Keuangan
- e) Partisipasi dan
- f) Laporan BMN.

Formula dari IKU ini adalah total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB.

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pada tahun 2021 KPPN Gorontalo memperoleh nilai 92,86 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor KEP-143/WPB.29/2021 tentang Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Tabel 3.42

Penjelasan Capaian IKU LK UAKPA/UAKPB

No	Penilaian	KPPN Gorontalo
A	Nilai UAKPA	
	Ketepatan penyampaian LK UAKPA	10
	Keakuratan data LK UAKPA	20
	Kepatuhan pelaksanaan anggaran UAKPA	10

	Penyajian LK UAKPA	9,5
	Beban kerja UAKPA	3
	Partisipasi UAKPA terkait penyelesaian LK	14
	Jumlah	66,5
B	Nilai UAKPB	
	Ketepatan waktu penyampaian laporan	5
	Kebenaran kodefikikasi BMN	5
	Kejelasan dan akurasi kertas kerja	4
	Kejelasan CaLK BMN	8,83
	Kebenaran dan kelengkapan lampiran	3,53
	Jumlah	26,36
C	Jumlah nilai UAKPA dan UAKPB	92,86

Tujuan

IKU ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tingkat UAKPA/UAKPB

Isu Utama

alah satu indikator kualitas Laporan Keuangan yang akuntabel adalah mewujudkan penyajian seluruh transaksi keuangan yang mempengaruhi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah. Sebagaimana kondisi perekonomian global tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, banyak negara di dunia yang terkena dampaknya termasuk Indonesia.. Oleh karena itu, perlu penyajian informasi atas kebijakan keuangan yang dilakukan dimasa Pandemi Covid-19.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

- Melakukan revisi anggaran untuk pengalokasian akun penanganan Covid-19 (bulan Maret 2021)
- Menyajikan informasi pada CaLK atas penggunaan belanja Covid-19 beserta format lampirannya pada Laporan Keuangan TA 2021

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan monitoring atas belanja penanganan COVID

19. Tingkat kualitas pengelolaan BMN

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2021 berfokus Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan, Penertiban administrasi rumah negara dan digitalisasi pengelolaan BMN. IKU ini diukur melalui beberapa komponen yakni persentase kesesuaian pelaksanaan RP4 (Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan), Indeks ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN, Persentase penyelesaian penertiban rumah negara, Indeks Kelengkapan Data Rumah Negara pada Profil Master Aset, Persentase Digitalisasi Pengelolaan BMN, Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan yang Ditindaklanjuti, dan Indeks Kepatuhan Pengisian RUP.

1. Kesesuaian pelaksanaan RP4

Kesesuaian pelaksanaan RP4 diukur dari Persentase pelaksanaan Penggunaan atas Rencana Penggunaan, persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana Pemanfaatan, persentase pelaksanaan Pemindahtanganan atas Rencana Pemindahtanganan, dan Persentase pelaksanaan Penghapusan atas Rencana Penghapusan. Realisasi pelaksanaan pemingdahtanganan dan penghapusan diukur ketika penyampaian usulan pelaksanaan Pemindahtanganan dan Penghapusan dari satuan kerja kepada Unit Eselon I yang ditembuskan kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Realisasi penggunaan dan pemanfaatan diukur ketika satuan kerja mengajukan usulan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan kepada Unit Eselon I atau Pengelola Barang yang ditembuskan kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Rencana penggunaan yang diukur selain rencana Penggunaan BMN untuk digunakan sendiri sesuai tugas dan fungsi.

2. Indeks ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN

Penyusunan RP4 BMN dilaksanakan untuk mewujudkan Perencanaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan yang terarah. RP4 BMN meliputi Rencana Penggunaan, Rencana Pemanfaatan, Rencana Pemindahtanganan, dan Rencana Penghapusan. Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan BMN diperlukan agar tersedianya waktu yang cukup dan optimal dalam penelitian dan revidi atas usulan Perencanaan BMN untuk dapat dihasilkannya Perencanaan yang efektif dan efisien. Penyampaian RP4 BMN setiap Unit Eselon I kepada Biro Madan. Target waktu berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Pengguna Barang sesuai dengan KMK nomor 855/KM.1/2018 tentang

Perencanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Persentase penyelesaian penertiban rumah negara

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan rumah negara yang tertib, terarah, dan akuntabel, serta sejalan dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Periode 2020-2024. Penertiban Rumah Negara meliputi tiga aspek yaitu : (1) Aspek Administrasi, (2) Aspek Hukum, dan (3) Aspek Fisik. Implementasi kegiatan tahun 2020 Penertiban Rumah Negara dari Aspek Administrasi ini adalah penyelesaian kelengkapan administrasi yang meliputi Surat Keputusan Penetapan Status Golongan (PSG) Rumah Negara, Penetapan Huruf Daftar Nomor (HDNo) Rumah Negara.

Realisasi PSG diukur pada saat draft penetapan status golongan rumah negara disampaikan kepada Biro Hukum (apabila aturan terkait pelimpahan wewenang pengelolaan BMN telah ditetapkan, realisasi IKU diukur sampai dengan penetapan oleh Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan).

Realisasi HDNo diukur pada saat Unit Eselon I/Biro Umum maupun pejabat yang ditunjuk mendaftarkan rumah negara kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini (apabila aturan terkait pelimpahan wewenang pengelolaan BMN telah ditetapkan, realisasi IKU diukur sampai dengan permohonan dari Kuasa Pengguna Barang):

- a) Direktur Bina Penataan Bangunan untuk rumah negara yang terletak di wilayah JABODETABEK;
- b) Direktur Bina Penataan Bangunan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara di provinsi untuk rumah negara yang terletak di luar wilayah

4. Persentase Completeness Master Aset

Master Aset di aplikasi SIMAN berisi data-data informasi manajemen terkait BMN. Data-data ini kemudian digunakan oleh berbagai plugin di SIMAN seperti sensus BMN, RKBMN, Wasdal, dsb. Pencatatan BMN yang tertib atas aset tersebut penting perannya dalam mendukung pengambilan keputusan dan monitoring.

Profil BMN yang yang perlu dilengkapi untuk Rumah Negara yaitu

- a. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan),
- b. foto,
- c. dokumen berupa SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada)

- d. batas dan GPS,
 - e. fasilitas, dan
 - f. konstruksi
5. Persentase jumlah tindak lanjut terhadap BMN Dihentikan Penggunaannya
Biro Manajemen Barang Milik Negara dan pengadaan selaku Pengguna Barang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Kuasa Pengguna Barang yang berada di wilayah kerjanya atas pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Pemindahtanganan Barang Milik Negara merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Jika suatu Barang Milik Negara dijual, maka Barang Milik Negara tersebut akan diserahkan kepada pembeli Barang Milik Negara setelah pembeli menyetorkan harga Barang Milik Negara yang bersangkutan tersebut ke Kas Negara. Penghapusan merupakan tindakan administratif dari Barang Milik Negara yaitu mengeluarkan data Barang Milik Negara dari catatan yang dibuat. Sehingga tidak terlihat lagi di dalam neraca. IKU diukur dari data BMN yang dihentikan penggunaannya berdasarkan Laporan Barang Pengguna Tahun 2020 unaudited.
6. Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan
Pengelolaan BMN yang efektif dan efisien apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.
Dalam rangka melaksanakan optimalisasi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas nomor ND-325/PB.1/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Rekomendasi pelaksanaan Optimalisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Satuan Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai rekomendasi optimalisasi BMN terindikasi idle. Penyelesaian tindak lanjut sampai dengan dikeluarkannya produk pengelolaan bmn berupa usulan/persetujuan yang menjadi kewenangan pengguna barang.
7. Indeks Kepatuhan Pengisian RUP
Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Salah satu informasi yang terdapat pada RUP adalah rencana

pelaksanaan pengadaan. Informasi rencana pelaksanaan pengadaan akan membantu rencana penganggaran Kementerian. Oleh karena itu, satuan kerja wajib untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikembangkan oleh LKPP sebelum dilakukan pelaksanaan pengadaannya. Bagian Perencanaan melakukan pemantauan terhadap pengumuman RUP yang dilakukan satuan kerja. Standar ketentuan pengisian RUP dari LKPP yakni paling lambat sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan. Sehingga fokus pemantauan yang dilakukan yaitu kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki belanja modal dan belanja barang tahun anggaran 2022. Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang menjadi target pengisian RUP berdasarkan pada Nota Dinas dari Biro Manajemen BMN dan Pengadaan setelah penetapan pagu alokasi anggaran Tahun 2022.

Formula IKU :

Pengukuran tingkat kualitas pengelolaan BMN diukur dari beberapa komponen yakni:

1. Kesesuaian pelaksanaan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan

a. Persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana Pemanfaatan (target: 100%)

$$\text{Realisasi a} = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan sewa BMN}}{\text{Jumlah BMN dalam rencana pemanfaatan}} \times 100\%$$

b. Persentase pelaksanaan Penggunaan atas Rencana Penggunaan (target: 100%)

$$\text{Realisasi b} = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan penggunaan BMN}}{\text{Jumlah BMN dalam rencana penggunaan}} \times 100\%$$

c. Persentase Pelaksanaan Pemindahtanganan atas Rencana Pemindahtanganan (target: 100%)

$$\text{Realisasi c} = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan pemindahtanganan BMN}}{\text{Jumlah BMN dalam rencana pemindahtanganan}} \times 100\%$$

d. Persentase Pelaksanaan Penghapusan atas Rencana Penghapusan (target: 70%)

$$\text{Realisasi d} = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan penghapusan BMN}}{\text{Jumlah BMN dalam rencana penghapusan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi 1} = \frac{\text{Realisasi a} + \text{Realisasi b} + \text{Realisasi c} + (\text{Realisasi d} / 70\%)}{4^*} \times 100\%$$

*: disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang menjadi target. Apabila unit tidak memiliki salah satu subkomponen, penyebut disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang ditargetkan pada unit tersebut. Contoh jika unit A tidak memiliki rencana penghapusan maka realisasi 1 diukur dengan formula (realisasi a+realisasi b)/2 x 100%

2. Persentase ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN (target 100%)

Tabel indeks ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN Tahun 2022 s.d 2024

Waktu Penyampaian	Indeks realisasi
Lebih cepat dua hari dan seterusnya	120%
Lebih cepat sehari	110%
Tepat waktu	100%
Terlambat satu hari	90%
Terlambat dua hari dan seterusnya	80%

3. Persentase Penyelesaian Penertiban Rumah Negara (target 65%)

$$\text{Realisasi PSG} = \frac{\text{Jumlah Pengajuan PSG}}{\text{Jumlah Rumah Negara}} \times 70\%$$

$$\text{Realisasi HDNo} = \frac{\text{Jumlah Pengajuan HDNo}}{\text{Jumlah Rumah Negara}} \times 30\%$$

$$\text{Realisasi 3} = \frac{\text{Realisasi PSG} + \text{Realisasi HDNo}}{65\%}$$

4. Persentase Completeness Master Aset (target : 100%)

$$\text{Persentase profil yang telah diisi lengkap} = \frac{\text{Jumlah Profil Master Aset Rumah Negara yang diisi lengkap}}{\text{Jumlah Profil Master Aset Rumah Negara}} \times 100\%$$

5. Persentase tindak lanjut BMN Kemenkeu yang Dihentikan Penggunaannya (target 100%)

$$\text{Persentase tindak lanjut BMN Kemenkeu yang Dihentikan Penggunaannya} = \frac{\text{jumlah nilai perolehan BMN yang dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2020 unaudited yang ditindaklanjuti dengan usulan pemindahtanganan / penghapusan}}{\text{jumlah nilai perolehan BMN dihentikan penggunaan yang tercantum pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2020 unaudited}} \times 100\%$$

6. Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi *Idle* Kementerian Keuangan (target 100%)

$$\text{Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi optimalisasi BMN terindikasi idle}} \times 100\%$$

7. Persentase Kepatuhan Pengisian RUP (target: 100%)

$$\text{Persentase kepatuhan Pengisian RUP} = \frac{\text{Total RUP Belanja Barang dan Belanja Modal}}{\text{Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang Menjadi Target}} \times 100\%$$

Realisasi IKU :

$$\begin{aligned} \text{Semester I} &= \frac{\text{Realisasi 1 + Realisasi 3 + Realisasi 4 + Realisasi 5 + Realisasi 6}}{5^{**}} \\ \text{Semester II} &= \frac{\text{Realisasi 1 + Realisasi 2 + Realisasi 3 + Realisasi 4 + Realisasi 5 + Realisasi 6 + Realisasi 7}}{7^{**}} \end{aligned}$$

** : disesuaikan dengan jumlah komponen yang menjadi target. Apabila unit tidak memiliki salah satu komponen, penyebut disesuaikan dengan jumlah komponen yang ditargetkan pada unit tersebut. Contoh jika unit A tidak memiliki target PNBPN maka realisasi IKU diukur dengan formula (realisasi 1+ realisasi 3 + realisasi 4)/3 x 100%

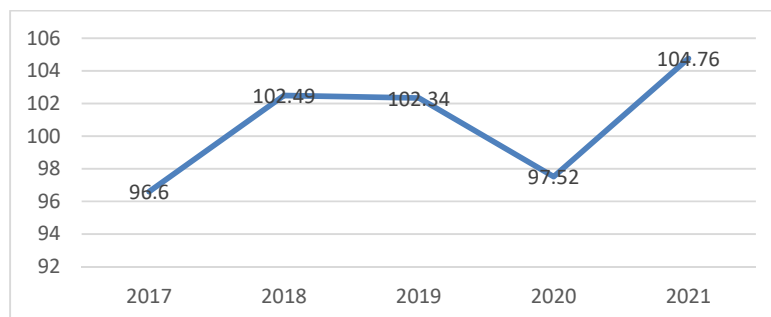
Catatan : Realisasi maksimal setiap komponen adalah 120%

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan semesteran.

Capaian IKU ini pada semester II berdasarkan nota Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-104/PB.1/2022 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penyampaian Nilai Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN Tahun 2021 Satker Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Gorontalo mendapat nilai 104,76.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 96.6%, 2018 sebesar 102,49%, tahun 2019 sebesar 102,34%, pada tahun 2020 sebesar 97.52%, dan pada tahun 2021 sebesar 104,76%.

Grafik 3.15
Capaian IKU Pengelolaan BMN 2017-2021



Tabel 3.43
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Pengelolaan BMN

IKU	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	90	96.6	92	102.49	92	102.34	92	97.52	100	104,76

Tujuan:

Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN Kementerian keuangan

Isu Utama:

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak. Strategi pengelolaan BMN secara optimal berpedoman pada SE-32/PB/2016.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap BMN yang ada sehingga menjadi sesuai dengan standar serta memastikan bahwa pengadaan BMN di masa yang akan datang telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Telah dilakukan penginputan pada aplikasi RP4 untuk penghapusan BMN yang rusak berat. Penghapusan dilakukan secara bertahap, mulai tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Pengadaan BMN sesuai standar
- Perbaikan dan penyesuaian atas BMN yang tidak sesuai dengan standar jika dimungkinkan, dan penghapusan untuk BMN yang rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan upgrade. Sesuai dengan RP4, penghapusan atas barang tersebut akan diusulkan secara bertahap pada tahun 2021, 2022 dan 2023.

20. Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah sistem manajemen yang meliputi kebijakan, organisasi, perencanaan, penanggung jawab, proses, dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, mengevaluasi, mengelola, dan meningkatkan keamanan informasi.

IKU Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi mengukur tingkat penerapan keamanan informasi di lingkungan Kanwil DJPb dan KPPN dengan berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-1/PB/2021 tentang Kebijakan SMKI di lingkungan DJPb.

Pengukuran dilakukan melalui penilaian atas pemenuhan checklist kegiatan Rencana SMKI di lingkup Kanwil DJPb dan KPPN yang didukung dengan dokumentasi sebagai bukti dukung telah dilaksanakannya kegiatan keamanan informasi di lingkup Kanwil DJPb dan KPPN. Summary Checklist Rencana SMKI sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Summary Checklist Rencana SMKI di lingkup KPPN Tahun 2021

No	Komponen Pengendalian	Jumlah Checklist	UIC
----	-----------------------	------------------	-----

1	Pengendalian Kebijakan Keamanan Informasi	1	Sub Bagian Umum
2	Pengendalian Organisasi Keamanan Informasi	1	Sub Bagian Umum
3	Pengendalian Keamanan Sumber Daya Manusia	1	Sub Bagian Umum
4	Pengendalian Pengelolaan Aset Informasi	1	Sub Bagian Umum
5	Pengendalian Akses	1	Sub Bagian Umum
6	Pengendalian Keamanan Fisik Dan Lingkungan	2	Sub Bagian Umum
7	Pengendalian Keamanan Komunikasi	1	Sub Bagian Umum
8	Pengendalian Hubungan Dengan Pihak Ketiga/ Pemasok	1	Sub Bagian Umum
Total		9	

Formula :

$$x = \frac{\sum \text{Checklist Rencana SMKI lingkup KPPN yang selesai dilaksanakan}}{\sum \text{Target Checklist Rencana SMKI lingkup KPPN}} \times 100\%$$

IKU baru muncul pada tahun 2021, target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan semesteran.

Capaian IKU pada Semester II berdasarkan Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi perbendaharaan Nomor ND-48/PB.8/2022 tentang Penyampaian Capaian IKU Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Periode Semester II 2021, KPPN Gorontalo memperoleh nilai 100%

Tujuan IKU:

Untuk menjamin penerapan Rencana SMKI melalui pengendalian keamanan informasi sesuai Per-1/PB/2021 di lingkup Kanwil DJPb dan KPPN telah dijalankan dengan baik.

Isu Utama:

Untuk mengukur tingkat penerapan keamanan informasi di lingkungan Kanwil DJPb dan KPPN dengan berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-1/PB/2021 tentang Kebijakan SMKI di lingkungan DJPb.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

Telah dilakukan perbaikan terhadap genset tersebut namun belum maksimal, mengingat keterbatasan teknisi yang cukup handal bisa menangani genset tersebut

Rekomendasi Rencana Aksi:

Upaya perbaikan akan terus dilaksanakan

5. Inisiatif Strategis**a. Tingkat Implementasi Learning Organization pada Unit Kerja**

- Sasaran Strategis/IKU : Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi
- Penjelasan

IS ini digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pegawai berupa kompetensi-kompetensi teknis dan non teknis melalui pendekatan-pendekatan kemitraan, melibatkan proses kreatif guna memaksimalkan potensi pegawai. Coaching dilakukan dengan metode/teknik mendengarkan, bertanya dan menggali agar individu/pegawai menemukan potensi dalam dirinya untuk mencapai tujuan tertentu. Counseling diperlukan dalam konteks untuk memelihara/menjaga hubungan yang serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan yang berorientasi pada masalah-masalah psikologis (bersifat pribadi) yang mengganggu kinerja pegawai, dengan teknik-teknik mendengarkan, bertanya, menggali masa lalu, dan memberikan solusi untuk peningkatan kinerja pegawai. Pada triwulan IV capainnya adalah 91,3%.

b. Optimalisasi Transaksi Pembayaran Non Tunai di Tingkat KPPN

- Sasaran strategis/IKU : Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan
 - Penjelasan
- Implementasi kebijakan non tunai di tingkat KPPN masih menemui kendala, diantaranya rendahnya realisasi pembayaran non tunai oleh satker dikarenakan belum adanya pemahaman yang memadai tentang prosedur transaksi dan kekhawatiran atas keamanan transaksi non tunai. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan melalui pelaksanaan bimtek dan sosialisasi. Sosialisasi terkait regulasi perpajakan untuk transaksi non tunai yang baru juga perlu untuk segera disosialisasikan. Kegiatan sosialisasi pembayaran non tunai melalui sitem digital payment-marketplace bersama Bank

BRI Kanca Gorontalo telah dilakukan pada bulan 22 Oktober 2021. KPPN Selaku satker sampai dengan triwulan IV telah melakukan 12 Transaksi melalui Digipay-marketplace.

c. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

- Sasaran Strategis/IKU : Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien
- Penjelasan

Pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik (BOS) dan Dana Desa diarahkan pada penyediaan informasi dan hambatan pelaksanaan penyaluran, penyediaan data analisis, identifikasi permasalahan dan rekomendasi atas permasalahan guna dapat menyusun kebijakan selanjutnya yang lebih efektif dan efisien.

Pada Triwulan I tahun 2021, KPPN Gorontalo telah melaksanakan monev DAK Fisik dan Dana Desa.

B. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Bruto KPPN Gorontalo dalam DIPA TA 2021 sebesar Rp 2,312,690,000. Pada tahun 2021 dilakukan penghematan sebesar Rp 442.725.000. Sehingga pagu anggaran setelah revisi penghematan menjadi sebesar Rp 1,869,965,000. Pagu program Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan resiko sebesar Rp 35.648.000 dan terealisasi sebesar Rp 34.958.551. Pagu program dukungan manajemen sebesar Rp 1.834.317.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.833.251.396

Realisasi Pagu Anggaran KPPN Gorontalo TA 2021 sebesar Rp 1,868,209,947 dengan rincian per jenis belanja sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.44

Pagu dan Realisasi Belanja KPPN Gorontalo 2017-2021

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Belanja Pegawai	1,601,680,000	1,550,716,819	383,100,000	366,025,000	341,485,000	326,655,000	332,380,000	331,209,000	369,600,000	369,597,000
Belanja Barang	1,660,180,000	1,659,458,983	1,638,155,000	1,637,850,843	1,980,181,000	1,979,664,795	1,673,543,000	1,652,065,073	1,464,365,000	1,462,681,947
Belanja Modal	876,301,000	876,223,850	446,863,000	446,833,000	32,124,000	31,385,000	191,664,000	191,557,000	36,000,000	35,931,000

Jumlah	4,138, 161,000	4,086, 399,652	2,468, 118,000	2,450, 708,843	2,353, 790,000	2,337, 704,795	2,197, 587,000	2,174, 831,073	1,869,9 65,000	1,868,20 9,947
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

C. Kinerja Lainnya

1. Inovasi Manajemen/Pelayanan

a) Solusi Pasti “Telegram”

KPPN Gorontalo mempunyai inovasi “Pemanfaatan Aplikasi Telegram sebagai Media Komunikasi dan *Support Group* Satker lingkup KPPN Gorontalo”.

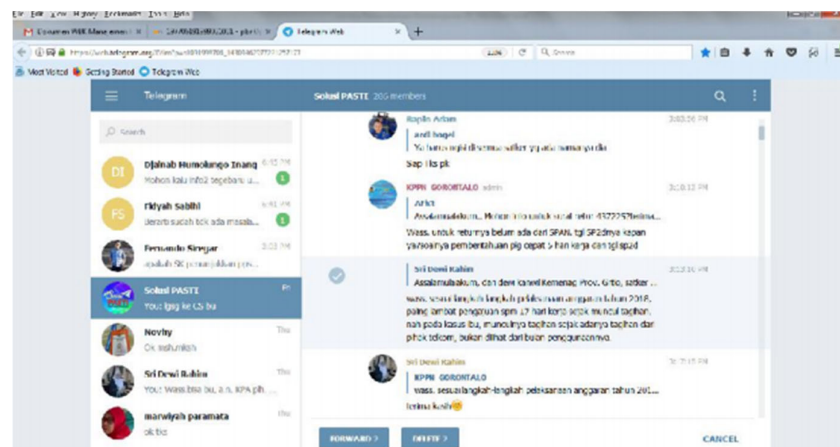
Pemanfaatan Aplikasi Telegram dilakukan untuk membuat grup “Solusi Pasti”. Grup ini beranggotakan seluruh pengelola keuangan satuan kerja mitra KPPN Gorontalo seperti KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan Operator Aplikasi. Grup ini bertujuan sebagai sarana komunikasi antara KPPN Gorontalo dengan satuan kerja. Bermotokan “cepat, tepat dan bermanfaat”, grup ini berusaha memberikan respon yang cepat, solusi yang tepat dan informasi yang bermanfaat bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja.

Awalnya grup ini bernama “Rekon Gorontalo” yang khusus melayani konsultasi masalah rekonsiliasi. Namun mengingat respon yang luar biasa dari satker, grup ini dikembangkan bukan sekadar melayani masalah rekonsiliasi namun juga melayani konsultasi lain, seperti layanan strategi penyerapan anggaran, ketepatan waktu penyampaian data kontrak, garansi bank, penyampaian LPJ, dan penyampaian RPD.

Setiap anggota grup bisa berkontribusi dengan memberikan jawaban, solusi dan informasi atas permasalahan yang dikemukakan di grup, juga sebagai sarana untuk *sharing knowledge* dan pengalaman. Dengan adanya grup ini diharapkan tercipta suatu kondisi dimana satuan kerja dapat saling *support* dan saling mengingatkan.

Gambar 3.2

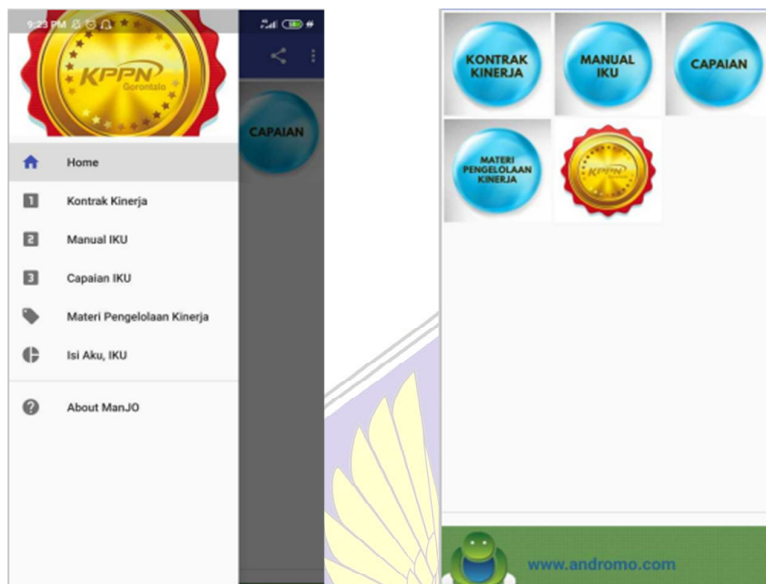
Aplikasi Telegram



b) Aplikasi “Manjo”

Inovasi layanan yang digunakan oleh KPPN Gorontalo untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan kinerja KPPN Gorontalo, yaitu aplikasi “Manjo”.

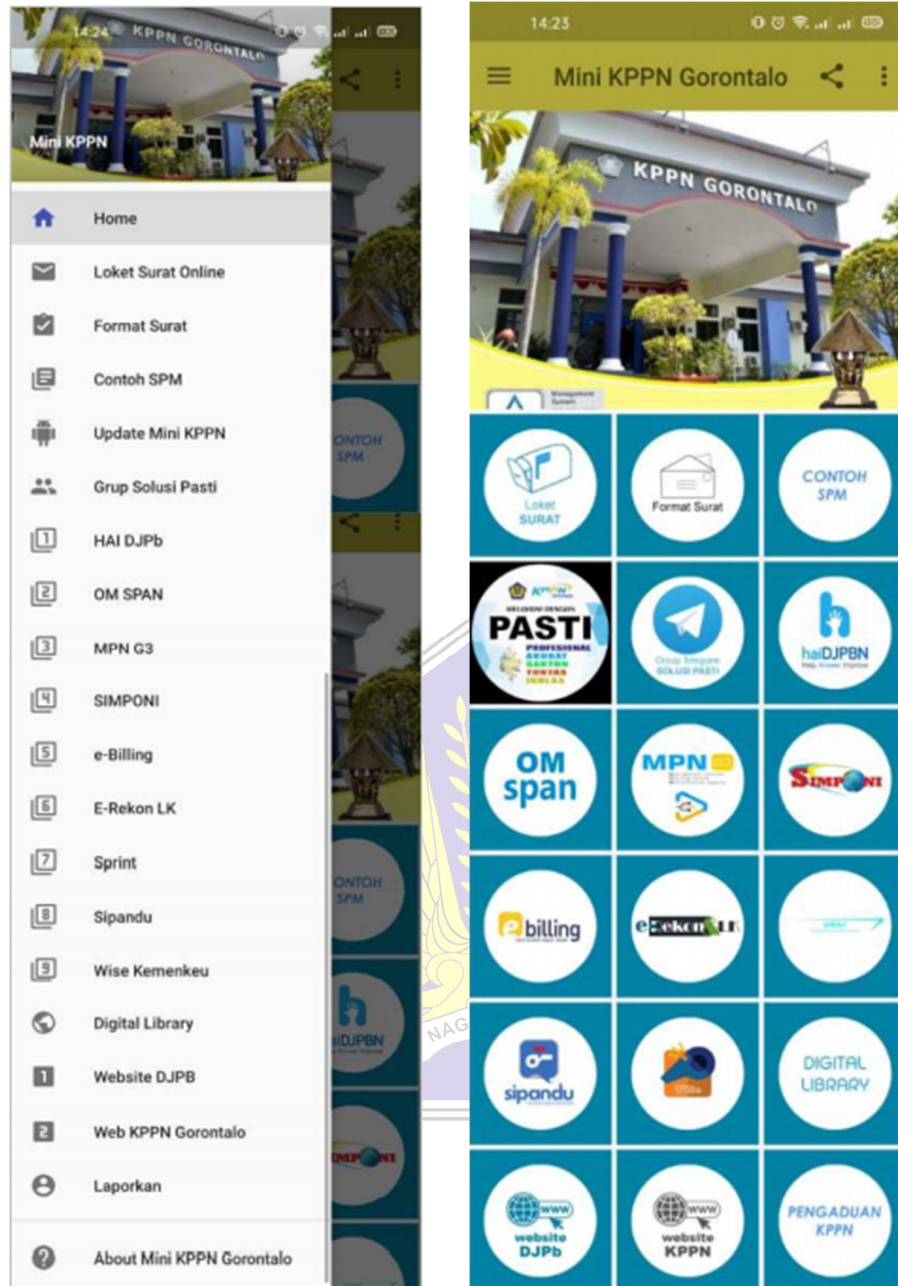
Gambar 3.3 dan 3.4
Aplikasi Manjo



c) Aplikasi “Mini KPPN”

Inovasi layanan lainnya yang digunakan oleh KPPN Gorontalo untuk membantu pekerjaan dan informasi KPPN Gorontalo, yaitu aplikasi “Mini KPPN”. Mini KPPN merupakan aplikasi berbasis android yang memberikan kemudahan dalam mengakses aplikasi-aplikasi penting dalam format satu halaman tampilan.

Gambar 3.5 dan 3.6
Aplikasi Mini KPPN



d) Saling Mengenal Antar Pegawai dan Keluarga (SiWeruh)

Salah satu cara meningkatkan pemantauan terhadap integritas pegawai dan kinerja organisasi adalah dengan mengenali para pegawainya (*know your employee*), untuk itu diperlukan ajang untuk saling mengenal antar pegawai sebagai salah satu bentuk pengawasan secara tidak langsung terhadap pegawai apabila ada indikasi ketidakwajaran. Manfaat utama dari inovasi ini adalah meningkatkan kesadaran khususnya di kalangan

pegawai dan *stakeholder* pada umumnya untuk menjaga nilai-nilai integritas dan selalu merasa diawasi oleh orang lain sehingga terhindar dari pelanggaran.

Gambar 3.7

Si Weruh



e) Inovasi Jaga Agar Aman (Si Jaga)

Salah satu cara untuk menjaga dan memelihara aset serta menghindari kemungkinan terhentinya layanan karena gangguan alam adalah dengan pro aktif melakukan mitigasi atas potensi kejadian yang dapat berdampak pada terganggunya pencapaian visi dan misi organisasi. KPPN Gorontalo selalu proaktif dalam usaha memitigasi risiko gangguan alam misalnya kebakaran. Manfaat utama dari inovasi ini adalah meningkatkan kesadaran khususnya di kalangan pegawai akan pentingnya ketangkasan dalam menghadapi bencana, setiap pegawai harus dibekali kemampuan minimum untuk menghadapi kejadian tidak terduga. Misalnya terjadinya kebakaran, dll.

Gambar 3.8

Si Jaga

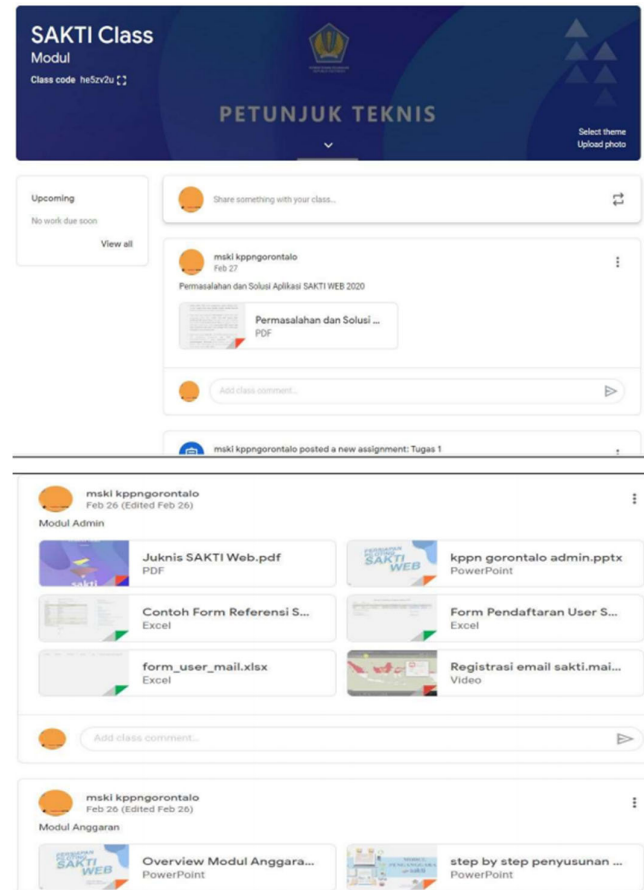


f) Treasury Classroom KPPN Gorontalo

Sebagaimana Kemenkeu Learning Center (KLC) menyediakan berbagai materi terkait keuangan negara, Treasury Classroom KPPN Gorontalo Classroom turut hadir menyediakan materi-materi terkait perbendaharaan seperti materi tentang Bendahara, Aplikasi SAS, SAKTI, Pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Dengan tampilan yang user friendly, Treasury classroom KPPN Gorontalo juga dapat memberikan tugas untuk pengguna yang mengikuti salah satu kelas. Proses pembelajaran yang mudah terjangkau akan membuat stakeholder mudah dan lebih bersemangat dalam mempelajari aspek-aspek teknis Perbendaharaan yang pada gilirannya akan mempermudah tugas KPPN dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran satker. Inovasi ini terus berkelanjutan dengan selalu mengupdate materi-materi pengelolaan keuangan dan aplikasi. Inovasi ini mudah direplikasi karena sifat aplikasinya yang terbuka difasilitasi oleh google. content dalam treasury classroom KPPN Gorontalo juga terkait dengan hal-hal teknis perbendaharaan sehingga bisa berfungsi sebagai media pembelajaran dengan materi yang sangat diperlukan namun sama untuk semua pengelola keuangan di seluruh Indonesia.

Gambar 3.9

Treasury Classrom KPPN Gorontalo



g) Konfirmasi Penerimaan Negara Online (KOPEN)

Satuan kerja dapat mengirimkan pengajuan konfirmasi setoran penerimaan negara secara online melalui formulir online yang telah dibuat oleh KPPN Gorontalo. Melalui formulir tersebut, satuan kerja mengisi kontak yang dapat dihubungi, nomor surat, hasil scan surat permohonan beserta lampiran dan arsip data computer (ADK). Petugas di KPPN akan mengecek kelengkapan dokumen dan kesesuaian ADK. Jika sudah selesai, petugas KPPN akan melakukan konfirmasi penerimaan setoran negara melalui aplikasi OMSPAN. Petugas di KPPN akan memberikan informasi kepada satuan kerja melalui kontrak yang telah diisi melalui formulir. Jika masih terdapat kesalahan diharuskan memperbaiki kesalahan dan menyampaikan kembali dokumen dan ADK yang salah.

Gambar 3.10
KOPEN

Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, Satuan Kerja menyampaikan Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara dilampiri Rekapitulasi Daftar Setoran Penerimaan Negara, Bukti Penerimaan Negara dan Arsip Data Komputer (ADK).

The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Not mski.kppngorontalo@gmail.com? [Switch account](#)

* Required

Email address *

Your email

Kode Satker *

Your answer

Nomor IIP *

Your answer

Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, Rekapitulasi Daftar Setoran Penerimaan Negara, Bukti Penerimaan Negara & Arsip Data Komputer (Format ZIP) *

h) Laporan Saldo Rekening Online (SAREO)

Satuan kerja dapat mengirimkan laporan saldo rekening secara online melalui formulir yang sudah dibuat oleh KPPN Gorontalo, melalui formulir tersebut, satuan kerja mengisi data rekening dan mengunggah hasil scan laporan saldo rekening dan rekening koran.

Gambar 3.11

SAREO

Laporan Saldo Rekening

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/KM.K.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, KPA/Kepala Satuan Kerja/Timpinan BLU wajib melaporkan saldo seluruh rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Not mski.kppngorontalo@gmail.com? [Switch account](#)

* Required

Email address *

Your email

Kode Satker *

Your answer

Nomor Rekening *

Your answer

Nama Rekening *

i) Saling Bertukar Pikiran Antar Pegawai (Rombukiya)

Sebagai bentuk nyata upaya untuk selalu menjaga institusi dari adanya pelanggaran kode etik/kode perilaku oleh pegawai, maka KPPN Gorontalo menginisiasi pelaksanaan kegiatan bertukar pikiran untuk saling menasihati dan meneguhkan kembali komitmen untuk menjaga nilai-nilai etika sebagai ASN. Kepada setiap pegawai juga dibekali dengan buku saku kode etik pegawai sebagai pengingat untuk selalu menjaga kode etik dan kode perilaku. Selain itu, sebagai bentuk pengingat juga dipasang banner dalam bahasa lokal yang berisi seruan untuk menjaga integritas.

Gambar 3.12 dan 3.13
Rombukiya



j) **LOSDOL (Layanan Online Satker KPPN Gorontalo)**

Inovasi ini masuk pada saat munculnya Pandemi Covid-19. Seluruh Proses Bisnis yang ada di KPPN Gorontalo harus dilakukan secara online. Padahal, dengan mekanisme online ini, satker pasti mengalami kesulitan yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Namun, KPPN Gorontalo berinisiatif untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan wadah berupa layanan zoom/google meeting bagi satker yang ingin berkonsultasi secara online

setiap harinya, yang dimulai pukul 09.00 s.d. 17.00 WITA. Pegawai KPPN Gorontalo yang ada di zoom tersebut akan standby melayani satker dengan berbagai kendala yang dialaminya. Inovasi ini pun pada mulanya muncul secara spontan. Hal ini karena pada saat itu sedang trend lagu LOSDOL yang dibawa oleh Denny Caknan. Akhirnya Inovasi ini mengambil nama dari judul lagu tersebut dan harapannya agar seluruh kendala yang dialami satker bisa tertangani.

Gambar 3.14

LosDol

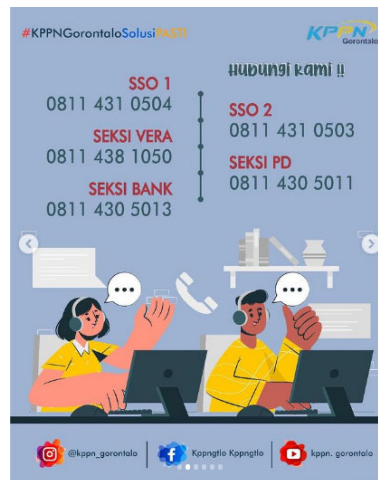


k) **Call Me KPPN Gorontalo : Contact Person Masing masing Seksi + SSO**

Inovasi ini muncul dari kebingungan satker apabila ada kendala yang dialami, tapi masih belum ada jawaban dari Pihak KPPN Gorontalo. Kemudian, KPPN Gorontalo menyediakan saluran resmi, seluruh seksi KPPN Gorontalo sesuai dengan bagian tugasnya, sehingga tentu saja akan lebih memudahkan satker untuk langsung bertanya ke pihak KPPN yang menangani atas pekerjaan yang mereka kirimkan.

Gambar 3.15

Call Me KPPN Gorontalo



l) Motivasi Pagi Gorontalo Pasti

Inovasi ini muncul dari inisiatif Kepala KPPN Gorontalo untuk memberikan semangat bagi seluruh Pegawai KPPN Gorontalo. Rutin setiap Senin dan Rabu dalam setiap minggu, dalam briefing pagi pegawai KPPN Gorontalo, ada jadwal khusus yang diberikan bagi pegawai KPPN Gorontalo secara bergantian, untuk memberikan motivasi pagi, yang bentuk nya bermacam-macam, mulai dari narasi, puisi, pantun dan lain lain. Inovasi ini tentu saja memberi dampak positif bagi seluruh pegawai KPPN Gorontalo dengan tentunya membakar semangat untuk mengawali pekerjaan di pagi hari.

Gambar 3.16
Motivasi Pagi Gorontalo Pasti



2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

a) Penandatanganan Pakta Integritas

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian juga dalam hal pemberantasan korupsi. KPPN Gorontalo telah melakukan inisiatif pemberantasan korupsi dengan

melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dengan antara kepala KPPN dengan semua pegawai baik PNS maupun PPNNP dan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja mitra KPPN Gorontalo.

Hal ini diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk lebih bekerja secara profesional, bersih, dan beritikad baik dalam melakukan pengelolaan keuangan negara demi nusa dan bangsa.

Gambar 3.17

Penandatanganan Pakta Integritas



3. Penghargaan

Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa terbaik

Di tahun 2021 Dana Desa dan Dana BOS yang disalurkan melalui KPPN Gorontalo, langsung disalurkan ke rekening desa dan rekening sekolah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat realisasi belanja guna mendukung percepatan pembangunan yang menyeluruh. Dengan disalurkan Dana Desa dan Dana Bos langsung ke tujuan, desa maupun sekolah dapat langsung menggunakan dana tersebut sesuai dengan rencana kegiatan maupun pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN Gorontalo selama tahun 2021 tergolong sangat baik dan menorehkan prestasi diantaranya adalah KPPN Gorontalo memperoleh predikat sebagai KPPN dengan Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa terbaik untuk kategori KPPN Besar se-Indonesia pada acara Treasury Award 2021. Selain itu, Penyaluran Dana Desa oleh KPPN Gorontalo ke rekening Desa di kabupaten Gorontalo Utara pada Januari 2021 juga tercatat sebagai salah satu penyaluran Dana Desa tercepat di seluruh Indonesia.

Gambar 3.18

Perolehan Penghargaan Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Terbaik



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPPN Gorontalo tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021 sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum maka KPPN Gorontalo harus senantiasa memelihara, mengamankan, dan melaksanakan semua kebijaksanaan pemerintah agar APBN dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Selain itu mewujudkan implementasi SPAN agar peran strategis KPPN Gorontalo menjadi lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tidak terdapat capaian kinerja KPPN Gorontalo tahun 2021 yang lebih rendah dari target yang direncanakan. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun selanjutnya, KPPN Gorontalo akan tetap mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

Untuk mengoptimalkan kinerja dan kemitraan dengan satker mitra kerja, KPPN Gorontalo terus melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat dan pegawai tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai serta pedoman/peraturan yang dapat dijadikan landasan/acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, di samping memanfaatkan sarana teknologi informasi sehingga masyarakat atau siapapun yang berhubungan/ berkepentingan dengan KPPN Gorontalo akan merasa sangat senang dan puas karena telah terlayani dengan cepat, cermat, dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku serta memahami visi dan misi Kementerian Keuangan dalam penerapan kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2008.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja 2021 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan maupun kepada semua pihak yang terkait sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo pada periode berikutnya.

LAMPIRAN



KONTRAK KINERJA
NOMOR : 050/PB.38/2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
GORONTALO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
GORONTALO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	1a-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,64 (skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5
		4b-N Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30%
		4c-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	82%
		5b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (skala 4)
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		6b-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
		6c-N Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	7a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
		7b-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%
8.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		8c-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82
		9c-N Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%
10.	Sistem informasi dan teknologi yang andal	10a-N Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%

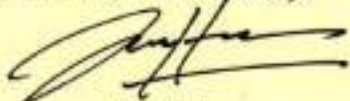
Program/Kegiatan

1. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan resiko
2. Dukungan manajemen

Anggaran
Rp. 324.222.000,00

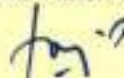
Rp. 1.988.468.000,00

Atasan Pimpinan Unit Kerja,



Iwan Handoko
NIP 197401011994021001

Gorontalo, 29 Januari 2021
Pimpinan Unit Kerja,



Toni Rediyansyah
NIP 197311161994031003

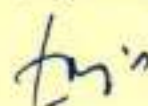
RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
GORONTALO
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Kode SS/ IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y
I	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel							
1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	-	-	-	-	-	94	94
II	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien							
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	4,64 (skala 5)	4,64 (skala 5)	-	4,64 (skala 5)	-	4,64 (skala 5)
III	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel							
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%
IV	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan							
4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	87,5	87,5	-	87,5	87,5	87,5
4b-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	-	15%	15%	-	15%	30%	30%
4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	13%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
V	Pengelolaan kas yang optimal							
5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)
VI	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien							
6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	89	89	89	89	89	89
6b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	90	90	90	90	90	90

Kode SS/ IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y
6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89	89	89	89	89	89	89
VII	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu							
7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%
7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
VIII	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi							
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	84	84
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	83	83
8c-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	-	-	-	-	-	78	78
IX	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel							
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	82	82
9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	-	30%	30%	-	30%	100%	100%
X	Sistem informasi dan teknologi yang andal							
10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	-	30%	30%	-	30%	80%	80%

Gorontalo, 29 Januari 2021

PNS yang dinilai,



Toni Rediyansyah
NIP 197311161994031003

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Iwan Handoko	1	Nama	Toni Rediyansyah
2	NIP	197401011994021001	2	NIP	1973111161994031003
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina (IV/a)	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina / (IV/a)
4	Jabatan	Plt. Kepala Kantor	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo

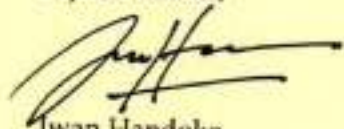
No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mewujudkan nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	-	94	100	12 bln	-
2	Mewujudkan kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	4,64 (skala 5)	100	12 bln	-
3	Menyelesaikan SP2D secara tepat waktu	-	99,4%	100	12 bln	-
4	Mewujudkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	87,5	100	12 bln	-
5	Melaksanakan implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	-	30%	100	12 bln	-
6	Melaksanakan implementasi Aplikasi SAKTI	-	100%	100	12 bln	-
7	Mewujudkan akurasi perencanaan kas	-	82%	100	12 bln	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
8	Mewujudkan pengelolaan pengeluaran kas yang efektif	-	3,15 (skala 4)	100	12 bln	-
9	Meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	-	89	100	12 bln	-
10	Memenuhi nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	-	90	100	12 bln	-
11	Meningkatkan partisipasi pelaporan data capaian output satker	-	89	100	12 bln	-
12	Mewujudkan rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	-	98,1%	100	12 bln	-
13	Mewujudkan LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	-	98%	100	12 bln	-
14	Memenuhi nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	84	100	12 bln	-
15	Mewujudkan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang baik	-	83	100	12 bln	-
16	Mewujudkan nilai rata - rata <i>hard competency</i> pegawai KPPN yang baik	-	78	100	12 bln	-
17	Mewujudkan pelaksanaan anggaran di KPPN yang berkualitas	-	95,5%	100	12 bln	(2.312.690.000)

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
18	Memenuhi nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	82	100	12 bln	-
19	Meningkatkan kualitas pengelolaan BMN	-	100%	100	12 bln	-
20	Melaksanakan implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	-	80%	100	12 bln	-

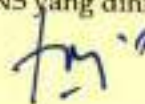
Gorontalo, 29 Januari 2021

Pejabat Penilai,



Iwan Handoko
NIP 197401011994021001

PNS yang dinilai,



Toni Rediyansyah
NIP 197311161994031003

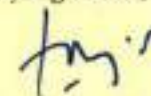
INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	SS: Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i> pada Unit Kerja	Pemenuhan indikator-indikator pengukuran tingkat implementasi <i>Learning Organization</i> dengan metode <i>self assessment</i> Target: Pemenuhan minimal masing-masing indikator <i>self assessment</i> 80%	Q2: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q2: 40%	Januari s.d. Desember 2021	Kepala Kantor	-
				Q3: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q3: 60%			
				Q4: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q4: 80%			
2.	SS: Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan IKU: Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Optimalisasi transaksi pembayaran non tunai di tingkat KPPN	Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan transaksi pembayaran non tunai tingkat KPPN Target: Minimal 100 transaksi melalui <i>marketplace</i> pada tahun 2021	Q1: Pendampingan kepada satker	Q1: Transaksi melalui <i>marketplace</i>	Januari s.d. Desember 2021	Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal	-
				Q2: Pendampingan kepada satker	Q2: Transaksi melalui <i>marketplace</i>			
				Q3: Pendampingan kepada satker	Q3: Transaksi melalui <i>marketplace</i>			

				Q4: Pendampingan kepada satker	Q4: Transaksi melalui marketplace			
3.	SS: Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien IKU: Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Laporan Monev penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Target: Transfer ke Daerah dan Dana Desa kabupaten/kota wilayah kerja KPPN Gorontalo tersalur 100%	Q1: Monitoring dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Q2: Monitoring dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Q3: Monitoring dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Q4: Monitoring dan evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Q1: Laporan monev Q2: Laporan monev Q3: Laporan monev Q4: Laporan monev	Januari s.d Desember 2021	Seksi Bank	Rp7.000.000.000,00

Gorontalo, 29 Januari 2021

PNS yang dinilai,



Toni Rediyansyah
NIP 197311161994031003

Sasaran Kinerja Pegawai

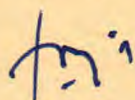
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
NEGARA TIPE A1 GORONTALO

PERIODE PENILAIAN:
01 JULI SD 31 DESEMBER 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Toni Rediyansyah	NAMA	Sugiyarto
NIP	197311161994031003	NIP	197003211995011002
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor	JABATAN	Kepala Kantor
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	1a-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94
2.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.4%
3.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87.5
		4b-N Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30%
		4c-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
4.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	82%
		5b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15 (skala 4)
5.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		6b-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90

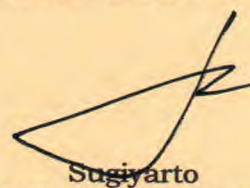
		6c-N Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89
6.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.1%
		7b-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%
7.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
		8c-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
8.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.5%
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82
		9c-N Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%
9.	Sistem informasi dan teknologi yang andal	10a-N Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%

Pegawai yang Dinilai,



Toni Rediyansyah
197311161994031003

Gorontalo, 01 Juli 2021
Pejabat Penilai Kinerja,



Sugiyarto
197003211995011002

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi Eseleon III : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	1a-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,64 (skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5
		4b-N Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30%
		4c-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	82%
		5b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (skala 4)
6.		6a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6b-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
		6c-N Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	7a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
		7b-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%
8.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
		8c-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82
		9c-N Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%
10.	Sistem informasi dan teknologi yang andal	10a-N Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%

Program/Kegiatan

1. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan resiko
2. Dukungan manajemen

Anggaran

Rp. 324.222.000,00

Rp. 1.988.468.000,00

Prinsipan Unit Kerja,



Tont Rediyansyah

NIP. 197311161994031003

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KPPN GORONTALO TAHUN 2021

Unit Organisasi Eselon III
Tahun Anggaran

: KPPN GORONTALO
: TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94	99.379	105.72
2	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.64	4.73	101.94
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40%	99.95%	100.55
4	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87.50	92.29	105.47
		4b-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30.00%	30.23%	100.77
		4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100.00%	100.00%	100
5	Pengelolaan kas yang optimal	5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	82.00%	100.00%	120
		5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	4	120
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89.00	93.28	104.67
		6b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	99.64	110.64
		6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89.00	98.60	110.78
7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10%	100%	101.94
		7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00%	100%	102.04
8	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84.00	88.30	105.12
		8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83.00	91.56	110.31
		8c-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78.00	86.30	110.64
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50%	98.36%	101.67
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82.00	92.86	113.24
		9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100.00%	104.76%	104.76
10	Sistem informasi dan teknologi yang andal	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80.00%	100.00%	120

Jumlah Anggaran Program Tahun 2021 (Setelah revisi)

1. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan resiko
2. Dukungan manajemen

Rp 35.648.000
Rp 1.834.317.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2021

1. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan resiko
2. Dukungan manajemen

Rp 34.958.551
Rp 1.833.251.396



Kepala Kantor,

Jan Rediarysyah

MATRIKS CASCADING KEMENKEU-THREE KPPN GORONTALO 2021

Unit Pemilik IKU: KPPN Gorontalo

Kemenkeu-Three					Kemenkeu-Four						Kemenkeu-Five							
Sasaran Strategis		Kode IKU	Nama IKU	Target	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU	UIC	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target	Jenis Cascading IKU	Jenis Konsolidasi Lokasi	Validitas dan Kendali IKU
1	Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif	1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94	Vera	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94	CP	Average	Proxy, Moderate							
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.64	Umum, PD, MSKI, Bank, Vera	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.64	CP	Average	Exact, Moderate							
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%	PD, Bank	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%	CP	Average	Proxy, Moderate							
4	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87.5	MSKI	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87.5	CP	Average	Proxy, Moderate							
		4b-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30%	MSKI	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30%	CP	Average	Proxy, Moderate							
		4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	MSKI	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	CP	Raw Data	Proxy, Moderate							
5	Pengelolaan kas yang optimal	5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82%	MSKI	Pengelolaan kas yang optimal	Persentase akurasi perencanaan kas	82%	CP	Average	Proxy, Moderate							
		5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	PD, Bank	Pengelolaan kas yang optimal	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	CP	Raw Data	Proxy, Moderate							
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	MSKI	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	CP	Average	Proxy, Low							
		6b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	Bank, Vera	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	CP	Raw Data	Proxy, Moderate							
		6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89	MSKI	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89	CP	Raw Data	Proxy, Moderate							
7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10%	Vera	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10%	CP	Average	Proxy, Moderate							
		7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00%	Vera	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00%	CP	Average	Proxy, Moderate							
8	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84	Umum	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84	CP	Average	Proxy, Moderate							
		8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	MSKI	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	CP	Average	Proxy, Moderate							



		8c-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Umum, PD, MSKI, Bank, Vera	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	CP	Raw Data	Proxy, Moderate	Seluruh Pelaksana	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Nilai penguasaan terhadap hard competency	78	CP	Average	Proxy, High
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50%	Umum	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	Nilai kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	95.50%	CP	Average	Proxy, Moderate							
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82	Umum	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82	CP	Average	Proxy, Moderate							
		9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%	Umum	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%	CP	Average	Proxy, Moderate							
10	Sistem informasi dan teknologi yang andal	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%	Umum	Sistem informasi dan teknologi yang andal	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%	CP	Average	Proxy, Moderate							

Periode s.d. Bulan Desember Tahun 2021

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (25.00)								105.72
Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif								105.72
1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94.00	99.38	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	105.72
Customer (15.00)								101.94
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien								101.94
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.64	4.73	Maximize	Exact Moderate	21.00%	100.00%	101.94
Internal Process (30.00)								106.53
Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel								100.55
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40	99.95	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	100.55
Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan								101.77
4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87.50	91.50	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	104.57
4b-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30.00	30.23	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	100.77
4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	100.00
Pengelolaan kas yang optimal								120.00
5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien								108.33
6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89.00	93.27	Maximize	Proxy Low	19.00%	40.43%	104.79
6b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	99.58	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	110.64
6c-N	Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker	89.00	98.61	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	110.80
Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu								101.99
7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	101.94
7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	102.04
Learning and Growth (30.00)								111.85
Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi								108.68
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84.00	88.30	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	105.12
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83.00	91.56	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	110.31
8c-N	Nilai rata - rata hard competency pegawai	78.00	86.30	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	110.64
Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel								106.87
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50	98.01	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	102.63
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82.00	92.86	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	113.24
9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100.00	104.76	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	104.76
Sistem informasi dan teknologi yang andal								120.00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
10a-N	Sistem informasi dan teknologi yang andal	80.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00
NILAI KINERJA ORGANISASI								107.24

,

NIP.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
JABATAN : KEPALA KANTOR
PERIODE : TAHUN 2021

No.	Kode IKU	Uraian IKU	Q1		Q2		Smt I		Q3		s.d Q3		Q4		Y	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN											94	99.379	94	99.379
2	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN			4.64	4.73	4.64	4.73			4.64	4.73			4.64	4.73
3	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40%	99.79%	99.40%	100.00%	99.40%	99.90%	99.40%	100.00%	99.40%	99.90%	99.40%	100.00%	99.40%	99.95%
4	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi			87.50	90.7	87.50	90.70			87.50	90.70	87.50	93.88	87.50	92.29
5	4b-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan			15.00%	16.00%	15.00%	16.00%			15.00%	16.00%	15.00%	30.23%	30.00%	30.23%
6	4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	13.00%	18.00%	40.00%	38.60%	40.00%	38.60%	70.00%	78.00%	70.00%	78.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7	5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	82.00%	100.00%	82.00%	99.99%	82.00%	99.99%	82.00%	100.00%	82.00%	99.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8	5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	4.00	3.15	4	3.15	4	3.15	4	3.15	4	3.15	4	3.15	4
9	6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89.00	94.65	89.00	90.74	89.00	92.70	89.00	94.07	89.00	93.15	89.00	93.65	89.00	93.28
10	6b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	100	90.00	99.96	90.00	99.98	90.00	99.58	90.00	99.85	90.00	99.03	90.00	99.64
11	6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89.00	95.80	89.00	99.09	89.00	97.45	89.00	99.70	89.00	98.20	89.00	99.80	89.00	98.60
12	7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10%	100%	98.10%	N/A	98.10%	100%	98.10%	100%	98.10%	100%	98.10%	100%	98.10%	100%
13	7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00%	100%	98.00%	100%	98.00%	100%	98.00%	100%	98.00%	100%	98.00%	100%	98.00%	100%
14	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization											84.00	88.30	84.00	88.30
15	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal											83.00	91.56	83.00	91.56
16	8c-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai											78.00	86.30	78.00	86.30
17	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50%	99.94%	95.50%	98.14%	95.50%	99.04%	95.50%	98.26%	95.50%	98.78%	95.50%	97.09%	95.50%	98.36%
18	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB											82.00	92.86	82.00	92.86
19	9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN			30.00%	100.00%	30.00%	100.00%			30.00%	100.00%	100.00%	104.76%	100.00%	104.76%
20	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi			30.00%	55.56%	30.00%	55.56%			30.00%	55.56%	80.00%	100.00%	80.00%	100.00%

Mengetahui,
MMKO



Rahmat Kurniawan

Gorontalo, 10 Januari 2022
Kepala Kantor,



Toni Rediyansyah

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE : TRIWULAN IV TAHUN 2021

No.	Kode IKU	Uraian IKU	Target		Realisasi		Gap	
			TRIWULAN IV	s.d. TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	s.d. TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	s.d. TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94	94	99.379	99.379	5.379	5.379
2	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	4.64	-	4.73	-	0.09
3	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40%	99.40%	100.00%	100.00%	0.60%	0.60%
4	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87.50	87.50	93.88	92.29	6.38	4.79
5	4b-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30.00%	30.00%	30.23%	30.23%	0.23%	0.23%
6	4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
7	5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	82.00%	82.00%	100.00%	100.00%	18.00%	18.00%
8	5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	3.15	4	4	0.85	0.85
9	6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89.00	89.00	93.65	93.28	4.65	4.2775
10	6b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	90.00	99.03	99.64	9.03	9.64
11	6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89.00	89.00	99.80	98.59	10.8	9.59
12	7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10%	98.10%	100%	100%	1.90%	1.90%
13	7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00%	98.00%	100%	100%	2.00%	2.00%
14	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84	84	88.3	88.3	4.3	4.3
15	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	83	91.561	91.561	8.561	8.561
16	8c-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	78	86.3	86.3	8.3	8.3
17	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50%	95.50%	97.09%	98.36%	2%	2.9%
18	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82	82	92.86	92.86	10.86	10.86
19	9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100.00%	100.00%	104.76%	104.76%	0.0476	0.0476
20	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	20%	20%

Gorontalo, 10 Januari 2022

Kepala Kantor,



Toni Rediyansyah

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
JABATAN : KEPALA KANTOR
PERIODE : TAHUN 2021

No.	Kode IKU	Uraian IKU	Q1		Q2		Smt I		Q3		s.d Q3		Q4		Y	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN											94	99.379	94	99.379
2	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN			4.64	4.73	4.64	4.73			4.64	4.73			4.64	4.73
3	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40%	99.79%	99.40%	100.00%	99.40%	99.90%	99.40%	100.00%	99.40%	99.90%	99.40%	100.00%	99.40%	99.95%
4	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi			87.50	90.7	87.50	90.70			87.50	90.70	87.50	93.88	87.50	92.29
5	4b-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan			15.00%	16.00%	15.00%	16.00%			15.00%	16.00%	15.00%	30.23%	30.00%	30.23%
6	4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	13.00%	18.00%	40.00%	38.60%	40.00%	38.60%	70.00%	78.00%	70.00%	78.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7	5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	82.00%	100.00%	82.00%	99.99%	82.00%	99.99%	82.00%	100.00%	82.00%	99.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8	5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	4.00	3.15	4	3.15	4	3.15	4	3.15	4	3.15	4	3.15	4
9	6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89.00	94.65	89.00	90.74	89.00	92.70	89.00	94.07	89.00	93.15	89.00	93.65	89.00	93.28
10	6b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	100	90.00	99.96	90.00	99.98	90.00	99.58	90.00	99.85	90.00	99.03	90.00	99.64
11	6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89.00	95.80	89.00	99.09	89.00	97.45	89.00	99.70	89.00	98.20	89.00	99.80	89.00	98.60
12	7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10%	100%	98.10%	N/A	98.10%	100%	98.10%	100%	98.10%	100%	98.10%	100%	98.10%	100%
13	7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00%	100%	98.00%	100%	98.00%	100%	98.00%	100%	98.00%	100%	98.00%	100%	98.00%	100%
14	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization											84.00	88.30	84.00	88.30
15	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal											83.00	91.56	83.00	91.56
16	8c-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai											78.00	86.30	78.00	86.30
17	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50%	99.94%	95.50%	98.14%	95.50%	99.04%	95.50%	98.26%	95.50%	98.78%	95.50%	97.09%	95.50%	98.36%
18	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB											82.00	92.86	82.00	92.86
19	9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN			30.00%	100.00%	30.00%	100.00%			30.00%	100.00%	100.00%	104.76%	100.00%	104.76%
20	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi			30.00%	55.56%	30.00%	55.56%			30.00%	55.56%	80.00%	100.00%	80.00%	100.00%

Mengetahui,
MMKO



Rahmat Kurniawan

Gorontalo, 10 Januari 2022
Kepala Kantor,



Toni Rediyansyah

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE : TRIWULAN IV TAHUN 2021

No.	Kode IKU	Uraian IKU	Target		Realisasi		Gap	
			TRIWULAN IV	s.d. TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	s.d. TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	s.d. TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94	94	99.379	99.379	5.379	5.379
2	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	4.64	-	4.73	-	0.09
3	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40%	99.40%	100.00%	100.00%	0.60%	0.60%
4	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87.50	87.50	93.88	92.29	6.38	4.79
5	4b-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30.00%	30.00%	30.23%	30.23%	0.23%	0.23%
6	4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
7	5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	82.00%	82.00%	100.00%	100.00%	18.00%	18.00%
8	5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	3.15	4	4	0.85	0.85
9	6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89.00	89.00	93.65	93.28	4.65	4.2775
10	6b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	90.00	99.03	99.64	9.03	9.64
11	6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89.00	89.00	99.80	98.59	10.8	9.59
12	7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10%	98.10%	100%	100%	1.90%	1.90%
13	7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00%	98.00%	100%	100%	2.00%	2.00%
14	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84	84	88.3	88.3	4.3	4.3
15	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	83	91.561	91.561	8.561	8.561
16	8c-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	78	86.3	86.3	8.3	8.3
17	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50%	95.50%	97.09%	98.36%	2%	2.9%
18	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82	82	92.86	92.86	10.86	10.86
19	9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100.00%	100.00%	104.76%	104.76%	0.0476	0.0476
20	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	20%	20%

Gorontalo, 10 Januari 2022

Kepala Kantor,



Toni Rediyansyah

RAW DATA IKU KEMENKEU-THREE KPPN GORONTALO
KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
1	1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb	99.379	Level 4 = 95-100 (Sangat Baik) Level 3 = 80-94 (Baik) Level 2 = 65-79 (Cukup) Level 1 = 0-64 (Kurang)
2	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	Indeks hasil survei kepuasan satker	4.73%	Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adalah sebagai berikut : 5 = Sangat Puas 4 = Puas 3 = Cukup Puas 2 = Kurang Puas
3	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	Σ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN	3524	$\frac{\Sigma \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN}}{\Sigma \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN}} \times 100\%$
			Σ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN	3524	
			Nilai	100.00%	
4	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Rata-rata Indeks Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	92.29	Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi $0 < x \leq 20$ = tidak efektif $20 < x \leq 40$ = kurang efektif $40 < x \leq 60$ = cukup efektif $60 < x \leq 80$ = efektif $80 < x \leq 100$ = sangat efektif
5	4b-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	Σ Sisa PPK/PPSPM tahun 2020 yang telah melakukan penilaian kompetensi	-	$\frac{\Sigma \text{Sisa PPK/PPSPM tahun 2020 yang telah melakukan penilaian kompetensi} + \Sigma \text{PPK/PPSPM tahun 2021 yang telah melakukan penilaian kompetensi}}{\Sigma \text{Sisa PPK/PPSPM tahun 2020 yang belum melakukan penilaian kompetensi}} \times 100\%$
			Σ PPK/PPSPM tahun 2021 yang telah melakukan penilaian kompetensi	56	
			TOTAL	56	
			Σ Sisa PPK/PPSPM tahun 2020 yang belum melakukan penilaian kompetensi	354	
			Nilai	16	
6	4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	Tahap 1	3%	$\frac{\text{Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2021}}{\text{X Proporsi Tahapan}} \times 100\%$
			Tahap 2	6%	
			Tahap 3	6%	
			Tahap 4	12%	
			Tahap 5	8%	
			Tahap 6	5%	
			Tahap 7	7.00%	

No	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
			Tahap 8	5%	
			Tahap 9	6%	
			Tahap 10	20%	
			Tahap 11	5%	
			Tahap 12	7%	
			Tahap 13	10%	
			Persentase	100.00%	
7	5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	Deviasi RPD Oktober	0	100% - (Rata - Rata Deviasi RPD harian per periode)
			Deviasi RPD November	0	
			Deviasi RPD Desember	0	
			Rata-Rata Deviasi RPD	0	
			Nilai	100	
8	5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	SP2D yang diterbitkan	79,915	$\frac{(70\% \times \text{nilai indeks A}) + (30\% \times \text{nilai indeks B})}{2}$
			SP2D yang diretur	592	
			Penyaluran SP2D yang akurat	4	
			SP2D pengganti sesuai indeks 1	-	
			SP2D pengganti sesuai indeks 2	-	
			SP2D pengganti sesuai indeks 3	-	
			SP2D pengganti sesuai indeks 4	592	
			Total SP2D pengganti	592	
			Kecepatan penyelesaian retur	4.00	
			Konversi Indeks A (70%)	2.80	
			Konversi Indeks B (30%)	1.20	
			Nilai Konversi	4.00	
9	6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	Hasil penilaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN	93.65	$IKPA = \sum (\text{Bobot} \times \text{Nilai Variabel}) \times 100$
10	6b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	SYARAT	9.23	$NKP \text{ TKDD} = [0,10 (\text{SYARAT}) + (0,20 (\text{PROYEKSI}) + 0,30 (\text{SPPSPM}) + 0,20 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA})] \times 100$
			PROYEKSI	20.00	
			SPPSPM	30.00	
			MONEV	20.00	
			LK UAKPA	19.80	
			NILAI	99.03	

No	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
11	6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	Jumlah Satker Yang Melaporkan data di open period reguler x 1,0	664	Tingkat Partisipasi Pelaporan Bulanan= [(Jumlah Satker Yang Melaporkan data di open period reguler x 1,0) + (Jumlah Satker yang Melaporkan data di open period tambahan x 0,5)] / Jumlah Satker yang Wajib Melaporkan Data Capaian Output.
			Jumlah Satker yang Melaporkan data di open period tambahan x 0,5	2	
			Jumlah Satker yang Wajib Melaporkan Data Capaian Output.	664	
			Nilai	99.70%	
12	7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu	669	$50\% \left(\frac{a}{c}\right) + 50\% \left(\frac{b}{c}\right)$
			Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas suspen	N/A	
			Jumlah satker aktif pada periode berkenaan	669	
			Nilai	100%	
13	7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	Σ LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	774	$\frac{\Sigma \text{LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu}}{\Sigma \text{LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN}} \times 100\%$
			Σ LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN	774	
			Nilai	100.00	
14	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb	88.3	Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb
15	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb	91.561	Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb
16	8c-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai KPPN	1122	Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai KPPN
			Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency	13	Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency
			Nilai	86.3	
17	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	Capaian IKPA Januari s.d September	97.09%	Capaian IKU PKPA Triwulan I : Capaian IKPA Januari s.d. Maret Capaian IKU PKPA Triwulan I : Capaian IKPA Januari s.d. Juni Capaian IKU PKPA Triwulan III : Capaian IKPA Januari s.d. September Capaian IKU PKPA Triwulan IV : 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART
18	10a-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB	92.86	Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB

No	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
19	9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	Nilai tingkat kualitas pengelolaan BMN	104.76	Nilai tingkat kualitas pengelolaan BMN
20	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Jumlah Checklist SMKI lingkup KPPN yang selesai dilaksanakan	9	$x = \frac{\sum \text{Checklist Rencana SMKI lingkup KPPN yang selesai dilaksanakan}}{\sum \text{Target Checklist Rencana SMKI lingkup KPPN}} \times 100\%$
			Jumlah Target Checklist rencana SMKI lingkup KPPN	9	
			Nilai	100.00%	

Keterangan:

*) Matriks perhitungan realisasi IKU terlampir.

Gorontalo, 10 Januari 2022

Kepala Kantor,



Tom REDIYANSYAH

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif						
Nama IKU		: Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	94.00	94.00	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	99.397	99.397	
Capaian	-	-	-	-	-	105.7%	105.7%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama: Nilai LK Kuasa BUN KPPN dipengaruhi oleh validitas data transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan. Target IKU ini terdapat di Triwulan IV.	-Pelaksanaan rekonsiliasi internal harian. -Monitoring data suspend atas penerimaan negara pada Aplikasi OM SPAN, dan menghubungi satker untuk melakukan perbaikan/koreksi penerimaan jika terdapat transaksi suspend. -Pelaksanaan analisis Neraca Percobaan dan Neraca lajur detil segmen satker. Memastikan tidak terdapat penggunaan akun/CoA yang salah pada transaksi di satker. -Membuat Nota Dinas ke Seksi terkait, jika di temukan kesalahan penggunaan akun/CoA		
	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Akar Masalah - Tingkat pemahaman satker terhadap penggunaan akun/CoA masih rendah. - Tingkat ketelitian satker terhadap pembebanan akun rendah sehingga menimbulkan selisih pada Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK), hal ini dapat mengurangi nilai LK BUN KPPN maupun Kanwil. - Masih terjadi kesalahan penginputan segmen-segmen CoA pada Aplikasi Simponi untuk penyetoran PNBPN sehingga menimbulkan data Suspend	-Pelaksanaan rekonsiliasi internal. - Monitoring data suspend atas penerimaan negara pada Aplikasi OM SPAN. -Membuat Nota Dinas ke Seksi terkait, jika di temukan kesalahan penggunaan akun/CoA.	Seksi Vera	Tahunan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
 PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien						
Nama IKU		: Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	4.64	4.64	-	4.64	-	4.64	Max/Take Last Known
Realisasi	-	4.73	4.73	-	4.73	-	4.73	
Capaian	-	101.93	101.93	-	101.93	-	101.93	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama : Tingkat kepuasan satker terhadap layanan KPPN tidak hanya ditentukan oleh kualitas layanan KPPN namun juga terkait berbagai aspek misalnya kehandalan sistem aplikasi dan kebijakan lain yang berada diluar wewenang KPPN, akibatnya tingkat kepuasan atas layanan KPPN juga dipengaruhi oleh kepuasan stakeholder atas kebijakan-kebijakan yang berada diluar kewenangan KPPN (misalnya kehandalan sistem SPAN, dll).	- Melakukan analisa atas hasil survey untuk memetakan kelemahan pelayanan dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan pada masing-masing unit. -Melakukan evaluasi terhadap hasil survei periode sebelumnya. -Melaksanakan/melengkapai sarana dan informasi sebagai tindakan perbaikan atas hasil survei periode sebelumnya yang masih kurang -Meminta konfirmasi/masukan dari satker atas hal-hal masih kurang dalam layanan sesuai hasil survey sebelumnya -Melakukan peningkatan layanan dengan memeriksa seluruh adk rekon yang sudah diupload di jam kerja. -Membantu satker dalam menghadapi permasalahan rekon.		
Akar Masalah - Adakalanya sistem aplikasi yang digunakan oleh satker mengalami gangguan, hal ini berada diluar kemampuan KPPN untuk menyelesaikannya tetapi satker akan menilai bahwa hal tersebut murni merupakan tugas KPPN.			
-KPPN selalu berusaha menjembatani	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
	- Melakukan Sosialisasi inovasi-inovasi pelayanan yang diberikan KPPN - Melakukan publikasi yang lebih intensif terkait kebijakan dan capaian kinerja KPPN.	Seksi MSKI	Triwulan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel						
Nama IKU		: Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	99.40%	99.40%	99.40%	99.40%	99.40%	99.40%	99.40%	Max/Average
Realisasi	99.79%	100%	99.90%	100%	99.93%	100%	99.93%	
Capaian	100.39%	100.60%	100.50%	100.60%	100.53%	100.6	100.53%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama : Capaian IKU Presentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu telah mencapai target yang ditentukan, namun demikian masih perlu dicermati ketika jumlah spm yang disampaikan overload. Implikasi : Apabila SPM yang masuk dalam jumlah banyak target IKU belum tentu akan tercapai	- Membangun komunikasi antar petugas terkait Pengumuman PPR di grup whatsapp kantor -Mengatur tahapan proses validasi SPM untuk memberikan waktu dalam proses penyelesaian SPM		
Akar Masalah	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
-Adanya perubahan prosedur pengajuan SPM secara online selama masa pandemi -Perlunya koordinasi dan manajemen waktu dalam penyelesaian SPM -Gangguan jaringan internet dan listrik	melakukan evaluasi atas pelaksanaan proses penyelesaian sp2d 1 jam untuk perbaikan ke depan.	Seksi PD dan Bank	Triwulan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
 PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan						
Nama IKU		: Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	87.50	87.50	-	87.50	87.50	87.50	Max/Average
Realisasi	-	90.70	90.70	-	90.70	93.88	92.29	
Capaian	-	103.65	103.65	-	103.65	107.29%	105.47%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama : Efektivitas edukasi dan komunikasi diukur melalui pengisian kuesioner atau pelaksanaan pretest dan post test pada saat dilaksanakan kegiatan sosialisasi ataupun bimtek. Hal tersebut menggambarkan efektif atau tidaknya edukasi dan komunikasi yang telah dilakukan. Sosialisasi maupun bimtek yang dilaksanakan oleh KPPN saat ini banyak ragam/jenisnya sehingga menyulitkan narasumber untuk fokus pada materi/bahasan tertentu sehingga kedalaman materi berkurang dan tingkat pemahaman peserta juga dikhawatirkan berkurang.	- Melakukan penyamaan persepsi atas bahan-bahan/materi yang akan disampaikan sebelum dilakukan sosialisasi atau bimtek melalui GKM/diskusi narasumber. - Memberikan diklat kepada pegawai terkait dengan pengembangan komunikasi melalui media online -Melakukan GKM yang narasumbernya dari setiap pegawai secara bergantian		
Akar Masalah	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Pelatihan di masa pandemic mayoritas menggunakan media online sehingga kesempatan berinteraksi agak berkurang dan menurun efektifitasnya; Peserta sosialisasi, bimtek, atau pelatihan online biasanya dilakukan sambil melaksanakan tugas yang lain, sehingga mereka kurang focus pada materi yang disampaikan.	- Pelatihan/GKM terkait komunikasi yang efektif kepada semua pegawai - Memberikan hadiah/souvenir kepada peserta yg mendapatkan hasil evaluasi terbaik saat pelatihan	Seksi MSKI	Semesteran

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan						
Nama IKU		: Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	15%	15%	-	15%	30%	30%	Max/TLK
Realisasi	-	16%	16%	-	16%	30.23	30.23	
Capaian	-	106.67%	106.67%	-	106.67%	100.77	100.77	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama : Standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan yaitu pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada satker pengelola APBN sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Baru diperkenalkan pada tahun 2020. Media pelatihan (khususnya PPSPM) yang menjadi syarat sertifikasi masih sangat terbatas. Implikasi : Banyak pejabat perbendaharaan yang belum bisa memenuhi syarat untuk di sertifikasi	Menyampaikan pengumuman setiap ada pembukaan pelatihan Pejabat perbendaharaan		
Akar Masalah	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Pelatihan PPSPM dan PPK jumlahnya masih sangat terbatas sehingga pejabat perbendaharaan di satker kesulitan untuk memenuhi syarat sertifikasi	- Proaktif mendampingi pejabat perbendaharaan saat pelatihan PPK dan PPSPM dibuka oleh BPPK/Kantor Pusat DJPb - Membuka layanan konsultasi online via Google meet terkait prosedur sertifikasi kompetensi pejabat perbendaharaan	MSKI	Semesteran

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan						
Nama IKU		: Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	13.00%	40.00%	40.00%	70.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Max/TLK
Realisasi	18.00%	38.60%	38.60%	78.00%	78.00%	100.00	100.00	
Capaian	138.46%	96.50%	96.50%	111.43%	111.43%	100.00	100.00	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama: Implementasi SAKTI merupakan salah satu upaya dalam rangka menjamin kondisi pelayanan prima kepada satker. Piloting implementasi SAKTI tahap V telah tertuang dalam KMK No 537/KMK.05/2020 sehingga harus dipastikan dapat berjalan sesuai tahapan/rencana. Implikasi: Dalam tahap-tahap selanjutnya harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai tahapan yang telah direncanakan	-Melakukan EUT SAKTI untuk semua Modul SAKTI kepada satker Piloting -Melaksanakan publikasi SAKTI kepada seluruh satker -Melakukan sosialisasi Tahap I mengenai Review SAKTI kepada seluruh satker sebagai salah satu bagian dalam Bimtek Aplikasi kepada satker -Training modul admin dan penganggaran SAKTI berbasis web -Melakukan publikasi dan komunikasi SAKTI tahap III untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK		
	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Akar Masalah - Kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahapan-tahapan tertentu harus menunggu instruksi dari Dit. SITP sehingga memungkinkan dapat menyebabkan tahapan tidak bisa dilaksanakan sesuai waktunya - Adanya pandemic yang mengakibatkan kegiatan tidak bisa berjalan secara normal - Adanya sedikit perubahan mekanisme pada implementasi SAKTI yang sebelumnya SAKTI desktop berubah menjadi SAKTI web sehingga dibutuhkan penyesuaian (adaptasi) satker User SAKTI	-Melakukan persiapan pelaksanaan pemdampingan SAKTI tahap berikutnya ke seluruh satker -Melaksanakan FGD SAKTI level eksekutif kepada satker-satker Mega.	MSKI	Triwulan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan						
Nama IKU		: Persentase akurasi perencanaan kas KPPN						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Max/Average
Realisasi	100%	99.90%	100%	100%	99.97%	100%	100%	
Capaian	121.95%	121.93%	122%	121.95%	121.91%	121.95%	121.92%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama: Ketepatan penyampaian RPD oleh satker wujud garansi kualitas perencanaan satuan kerja. Sesuai ketentuan baru tentang RPD (PMK 197/PMK.05/2017) penyampaian/pelaksanaan RPD telah banyak diberikan kemudahan kemudahan bagi satker, antara lain penyampaian SPM tanpa RPD namun dilengkapi adanya Surat Pernyataan KPA ttg penundaan pencairan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan RPD, baik di satker maupun KPPN Implikasi: RPD dapat lebih akurat	-Sosialisasi tentang ketentuan baru RPD (PMK 197/PMK.05/2017) -Sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2020, salah satu materinya terkait perencanaan kas -Sosialisasi dan bimtek secara intensif -Perlu dilakukan kegiatan pendampingan khususnya terhadap satker dengan pagu besar -Menyampaikan teguran kepada satker yang tidak memenuhi RPD sesuai yang telah disampaikan		
Akar Masalah	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
-Pemahaman teknis pelaksanaan anggran di satker perlu ditingkatkan, masih banyak kesalahan SPM yang menyebabkan deviasi pada RPD -Perencanaan kegiatan yang disusun oleh satker masih belum akurat -Banyaknya perubahan/revisi DIPA sebagai dampak pandemic COVID-19 -Adanya perubahan batas minimal transaksi yang menggunakan RPD membuat pengawasan atas RPD lebih mudah.	Secara aktif melakukan updating data perencanaan kas yg disampaikan oleh satker	Seksi MSKI	Triwulanan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Pengelolaan kas yang optimal						
Nama IKU		: Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	Max/Average
Realisasi	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
Capaian	126.98%	126.98%	126.98%	126.98%	126.98%	126.98%	126.98%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama: Masih banyaknya retur yang terjadi pada SPM yang diajukan satker. Implikasi: Penyaluran dana terlambat masuk ke rekening satker sehingga menghambat realisasi satker	- Menyampaikan upaya pencegahan SP2D retur kepada satuan kerja melalui baik melalui sarana rapat/sosialisasi atau pada saat satker melakukan konsultasi/koordinasi dengan KPPN - Mengirim surat pemberitahuan retur secara tepat waktu dan berkoordinasi dengan satker untuk mempercepat penyelesaian retur - Mendorong perbaikan SP2D retur oleh satker dilakukan sebelum jatuh tempo		
	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Akar Masalah - Tidak telitinya satker dalam melakukan penginputan nomor dan nama rekening pada SPM - Tidak dilakukan pengecekan rekening aktif	- Melakukan sosialisasi tentang alur retur SP2D kepada satker sebagai langkah preventif untuk tahun selanjutnya. - Melakukan One and One meeting bersama satker yang teridentifikasi sering menimbulkan retur SP2D	Seksi PD dan Bank	Triwulan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien						
Nama IKU		: Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	89	89	89	89	89	89	89	Max/Average
Realisasi	94.65	90.95	92%	87.92	91.17	93.65	91.79	
Capaian	106.35%	108.30%	103.59%	98.79%	102.44%	105.22%	103.14%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama: Kualitas kinerja satker yang dinilai dari aspek perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dengan variabel retur SP2D, aspek efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi perlu dijaga konsistensinya. IKPA K/L merupakan salah satu komponen dalam kinerja KPPN yang dapat mempengaruhi persepsi stakeholders dalam melakukan penilaian atas kinerja KPPN secara keseluruhan Implikasi: Persepsi penilaian stakehoklders, terutama Kantor Pusat DJPb kurang baik	- Melaksanakan reviu pelaksanaan anggaran setiap bulan -Mengadakan sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2020 diawal tahun - Sebagai pengganti Monev IKPA akan dibuat reminder bagi satker yang belum memaksimalkan IKPA -Membentuk task force untuk mengawal kinerja pelaksanaan anggaran satker -Reminder satker pada saat batas-batas akhir pengajuan SPM		
	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Akar Masalah -Masih terdapatnya bendahara/operator baru di satker yang baru terutama untuk mengelola DIPA baru dan belum memiliki skill yang memadai. -Terbatasnya SDM Keuangan pada Satker. -Pemahaman pengelolaan anggaran pejabat terkait di satuan kerja masih belum maksimal - Kurangnya reward atas capaian IKPA membuat awareness satker pada IKPA juga belum maksimal	- Mengoptimalkan penggunaan Sosial Media KPPN Gorontalo dengan menyajikan informasi dan tutorial bagi satker - Aktif menyampaikan pentingnya pengelolaan anggaran yang baik yg diukur dari capaian IKPA	Seksi MSKI	Triwulan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien						
Nama IKU		: Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	Max/Average
Realisasi	100	99.69	99.85	99.58	99.76	99.03	99.58	
Capaian	111.1%	110.77%	110.94%	110.94%	110.84%	110.03%	110.64%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama: - Terdapat retur pada dana bos (dak non fisik) karena kesalahan rekening dari dinas - Masih ada kontrak yang berjalan sehingga belum bisa dilakukan proses penginputan SP2D bud dak fisik oleh dinas/opd Implikasi: - Masih ada dana bos yang belum tersalur ke rekening sekolah - Lambatnya proses penginputan SP2D bud untuk mengetahui realisasi dan sebagai syarat penyaluran dak fisik tahun berikutnya	- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dit PA dan SITP untuk penyelesaian retur bos - Berkoordinasi dengan pemda dan dinas untuk penginputan SP2D BUD		
	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Akar Masalah - Proses perbaikan data supplier penerima BOS dilakukan oleh Kantor Pusat (DJPb dan Kemendikbud), KPPN tidak memiliki kewenangan untuk mengubah, sehingga proses penyelesaian retur dipengaruhi oleh pihak eksternal - Proses kontrak yang lambat karena adanya perubahan aturan penyaluran yang disebabkan pandemi covid	- Aktif berkoordinasi dengan Dit. PA, Dit. SITP, dan Pemerintah Daerah - Mempush pemda dan opd untuk selalu mengupdate kontrak yang sudah selesai	Seksi Bank & Vera	Triwulan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien						
Nama IKU		: Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	Max/Average
Realisasi	96.51	99.09	97.80	99.70	98.43	99.80	98.78	
Capaian	108%	111.34%	109.89%	112.02%	110.60%	112.13%	110.98%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama : -Redesain sistem penganggaran membuat satker belum familier dengan nomenklatur rincian output -Banyak satker yang belum melakukan pencairan anggaran sehingga belum ada realisasi RO -Target RO pada DIPA banyak yang tidak rasional (kualitas perencanaan nya perlu diperbaiki) Implikasi : -Banyak satker belum berhasil melakukan pengisian data capaian RO -Terjadi misspersepsi bahwa realisasi anggaran nol tidak wajib menyampaikan data capaian RO - Menyulitkan pada saat akan dilakukan perhitungan capaian RO	-Sosialisasi mekanisme penyampaian data capaian RO -Melakukan money penyampaian data capaian RO		
	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Akar Masalah -Satker banyak yang belum memahami teknis pengisian data capaian RO -Satker menganggap kalau belum ada realisasi maka tidak wajib menyampaikn data capaian RO	Menyampaikan surat kepada KPA untuk lebih aware dengan pelaporan data capaian output	MSKI	Triwulanan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu						
Nama IKU		: Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	98.10%	98.10%	98.10%	98.10%	98.10%	98.10%	98.10%	Max/Average
Realisasi	100%	N/A	100.00	100%	100%	100%	100%	
Capaian	101.94%	N/A	101.94%	101.94%	101.94%	101.94%	101.94%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama : Masih terdapat satker yang kurang paham/tidak tahu jadwal periode open dan closed period upload e-rekon SAIBA Implikasi: Keterlambatan akan berpengaruh pada capaian IKU	-Penerbitan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat meng-upload data e-rekon SAIBA . -Mengingatkan kepada satker melalui surat, telepon, dan telegram mengenai batas waktu / open period upload data e-rekon SAIBA bulan berkenaan		
	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Akar Masalah -Operator satker bersifat pasif sehingga mengakibatkan lebih sering menunggu untuk diingatkan upload SAIBA -Kurang koordinasi antara operator SAIBA, operator persediaan dan operator SAS sehingga masih saling menunggu data.	- Melakukan monitoring dan evaluasi kepada satker	Vera	Triwulan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu						
Nama IKU		: Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	Max/Average
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	102.04%	102.04%	102.04%	102.04%	102.04%	102.04%	102.04%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama: Masih ada beberapa satker yang terlambat menyampaikan LPJ Bendahara Implikasi: Berpengaruh kepada capaian IKU.	- Penerbitan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat menyampaikan LPJ ke KPPN. -Mengingatkan kepada satker melalui surat dan telegram mengenai penegasan kewajiban satker dalam penyampaian LPJ Bendahara		
	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Akar Masalah -Adanya pergantian bendahara satker. -Kualitas SDM satker/operator SILABl yang belum merata	Melakukan monitoring dan evaluasi kepada satker	Vera	Triwulan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi						
Nama IKU		: Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	84	84	Max/Take Last Known Value
Realisasi	-	-	-	-	-	88.30%	88.30%	
Capaian	-	-	-	-	-	105.12%	105.12%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama: Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di KPPN Gorontalo dilakukan langkah-langkah peningkatan kualitas kinerja. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas kinerja di lingkungan ditjen perbendaharaan, kantor pusat ditjen perbendaharaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit-unit masing-masing.	Pelaksanaan dialog kinerja organisasi dan individu -Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan matriks SFO		
	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Akar Masalah Masih ada beberapa pegawai yang kurang peduli terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi dan individu.	Merutinkan pelaksanaan dialog kinerja organisasi.	Subbagum	Tahunan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
 PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi						
Nama IKU		: Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	83.00	83.00	Max/Take Last Known Value
Realisasi	-	-	-	-	-	91.561	91.561	
Capaian	-	-	-	-	-	110.31%	110.31%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama: Pelaporan/evaluasi atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern bersifat dinamis sehingga penyesuaian-penyesuaian terkait dengan format, mekanisme dan periode harus segera dilakukan secara konsisten karena akan berdampak pada hasil penilaian evaluasi. Penilaian hasil evaluasi penerapan PPI dilakukan oleh Kanwil DJPb.	- Menyusun laporan PPI dengan format baru sesuai KMK 940 -Menyusun laporan dan menyampaikannya secara tepat waktu. -Melakukan update ketentuan terkait pemantauan pengendalian intern		
	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Akar Masalah Penyusunan laporan PPI dengan format sesuai KMK 940 baru sehingga laporan yang disusun belum dapat dipastikan ketepatan penyusunannya.	Membuat kalender pelaporan KI	MSKI	Tahunan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
 PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi						
Nama IKU		: Nilai rata-rata hard competency pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	78	78	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	86.3	86.3	
Capaian	-	-	-	-	-	110.64%	110.64%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama: Kurangnya pemahaman proses bisnis dan aturan secara merata/menyeluruh bagi pegawai di satu seksi dapat mengakibatkan rendahnya capaian IKU ini.	- Penyelenggaraan GKM secara periodik dan intensif. -Mempelajari aturan yang berlaku pada masing-masing seksi		
	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Akar Masalah Kurang meratanya kemampuan dan pengetahuan pegawai terhadap keseluruhan proses bisnis dan aturan yang terkait dalam satu seksi.	- Mengadakan diskusi dan sharing sessions secara berkala di satu seksi untuk membahas aturan dan SOP serta review soal-soal tahun sebelumnya sebagai bahan referensi pembelajaran. - Meningkatkan pengetahuan untuk mendapatkan nilai yang memenuhi standar IKU.	Seluruh Seksi & Subbagum	Tahunan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel						
Nama IKU		: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	Max/Average
Realisasi	99.94%	98.14%	99.04%	98.26%	98.78%	98.01%	98.59%	
Capaian	104.65%	102.76%	103.71%	102.89%	103.43%	102.63%	103.23%	

Isu Utama dan Implikasi		Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama: Capaian IKU ini mencerminkan capaian output terkait kinerja pelaksanaan anggaran KPPN sebagai satker. Unsur yang diukur pada IKU ini dilihat dari penilaian komponen hasil dari SMART dan komponen proses dari IKPA. Implikasi: Capaian output, kinerja anggaran serta realisasi satker sesuai yang direncanakan dan optimal.		-Menyusun rencana kegiatan tahunan satker selama tahun 2021 - Melaksanakan dan mengontrol realisasi satker sesuai RPD Halaman III DIPA		
		Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Akar Masalah - Kurang selarasnya kebijakan penyerapan anggaran dengan efisiensi birokrasi - Terbatasnya periode waktu revisi anggaran untuk perbaikan RPD (maksimal 1 x per triwulan) sehingga mempengaruhi penyerapan		Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dalam rangka kontrol kesesuaian RPD dan	Subbagian Umum	Triwulan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021

Nama Sasaran Strategis		: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel						
Nama IKU		: Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	82	82	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	92.86	92.86	
Capaian	-	-	-	-	-	113.24%	113.24%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama: Salah satu indikator kualitas Laporan Keuangan yang akuntabel adalah mewujudkan penyajian seluruh transaksi keuangan yang mempengaruhi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah. Sebagaimana kondisi perekonomian global tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, banyak negara di dunia yang terkena dampaknya termasuk Indonesia.. Oleh karena itu, perlu penyajian informasi atas kebijakan keuangan yang dilakukan dimasa Pandemi Covid-19	- Melakukan revisi anggaran untuk pengalokasian akun penanganan Covid-19 (bulan Maret 2021) -Menyajikan informasi pada CALK atas penggunaan belanja Covid-19 beserta format lampirannya pada Laporan Keuangan TA 2021		
	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Akar Masalah Terdapat belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 yang pembebanan akunnya tidak bisa langsung direalisasikan karena masih memerlukan revisi anggaran	Melakukan monitoring atas belanja penanganan covid	Subbagian Umum	Tahunan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE PELAPORAN : KPPN GORONTALO

Nama Sasaran Strategis		: Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel						
Nama IKU		: Tingkat kualitas pengelolaan BMN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	30%	30%	-	30%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	100%	100%	-	100%	104.76%	104.76%	
Capaian	-	333.33%	333.33%	-	333.33%	104.7600%	104.7600%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama: Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak. Strategi pengelolaan BMN secara optimal berpedoman pada SE-32/PB/2016.	- Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap BMN yang ada sehingga menjadi sesuai dengan standar serta memastikan bahwa pengadaan BMN di masa yang akan datang telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. -Telah dilakukan penginputan pada aplikasi RP4 untuk penghapusan BMN yang rusak berat. Penghapusan dilakukan secara bertahap, mulai tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.		
	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Akar Masalah Terdapat BMN yang rusak berat namun belum dilakukan penghapusan serta terdapat BMN yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena BMN yang ada merupakan BMN yang sudah lama, pengadaan sebelum tahun 2016 tetapi masih digunakan / belum dihapus.	-Perbaikan dan penyesuaian atas BMN yang tidak sesuai dengan standar jika dimungkinkan, dan penghapusan untuk BMN yang rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan upgrade. Sesuai dengan RP4, penghapusan atas barang tersebut akan diusulkan secara bertahap pada tahun 2021, 2022 dan 2023. -Pengadaan BMN sesuai standar	Subbagian Umum	Tahunan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE PELAPORAN : KPPN GORONTALO

Nama Sasaran Strategis		: Sistem informasi dan teknologi yang andal						
Nama IKU		: Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	30%	30%	-	30%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	-	55.56%	55.56%	-	55.56%	100%	100%	
Capaian	-	185.20%	185.20%	-	185.20%	125.00%	125.00%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan		
Isu Utama: Untuk mengukur tingkat penerapan keamanan informasi di lingkungan Kanwil DJPb dan KPPN dengan berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-1/PB/2021 tentang Kebijakan SMKI di lingkungan DJPb.	Telah dilakukan perbaikan terhadap genset tersebut namun belum maksimal, mengingat keterbatasan tehknisi yang cukup handal bisa menangani genset tersebut .		
	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Akar Masalah Salah Satu Komponen Pengendalian yaitu Keamanan Fisik dan Lingkungan dengan Kegiatan melakukan ujicoba fungsi perangkat pendukung (Genset dan UPS). Salah satu Genset mengalami gangguan (rusak) mengingat usia genset yang sudah tua	Upaya perbaikan akan terus dilaksanakan	Subbagian Umum	Tahunan

SS/IKU	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi
IS	Tingkat Implementasi Learning Organization pada Unit Kerja
Periode IS	Januari – Desember 2021
Output	Pemenuhan Indikator

Progres s.d. Triwulan IV	Selesai	
Penjelasan IS ini digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pegawai berupa kompetensi-kompetensi teknis dan non teknis melalui pendekatan-pendekatan kemitraan, melibatkan proses kreatif guna memaksimalkan potensi pegawai. Coaching dilakukan dengan metode/teknik mendengarkan, bertanya dan menggali agar individu/pegawai menemukan potensi dalam dirinya untuk mencapai tujuan tertentu. Counseling diperlukan dalam konteks untuk memelihara/menjaga hubungan yang serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan yang berorientasi pada masalah-masalah psikologis (bersifat pribadi) yang mengganggu kinerja pegawai, dengan teknik-teknik mendengarkan, bertanya, menggali masa lalu, dan memberikan solusi untuk peningkatan kinerja pegawai. Capaian triwulan IV = 91.3% Kendala/Akar Masalah Masih kurangnya kesadaran pegawai untuk melakukan pengisian CnC di aplikasi training setelah kegiatan coaching and counselling dilaksanakan Output Pemenuhan indikator-indikator pengukuran tingkat implementasi Learning Organization dengan metode self assessment		

Anggaran	
Pagu	Realisasi
Target Q3 LO 80%	Capaian LO 91.3%

Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Menyusun jadwal dan materi CnC untuk triwulan berkenaan	Kepala Kantor	Januari- Desember 2021

SS/IKU	Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan
IS	Optimalisasi transaksi pembayaran non tunai di tingkat KPPN
Periode IS	Januari – Desember 2021
Output	Transaksi melalui marketplace

Progres s.d. Triwulan IV	Selesai	
Penjelasan		
Implementasi kebijakan non tunai di tingkat KPPN masih menemui kendala, diantaranya rendahnya realisasi pembayaran non tunai oleh satker dikarenakan belum adanya pemahaman yang memadai tentang prosedur transaksi dan kekhawatiran atas keamanan transaksi non tunai. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan melalui pelaksanaan bimtek dan sosialisasi. Sosialisasi terkait regulasi perpajakan untuk transaksi non tunai yang baru juga perlu untuk segera disosialisasikan.		
Capaian triwulan IV = 12 transaksi		
Kendala/Akar Masalah		
Kurangnya pengetahuan terkait proses transaksi non tunai dan keamanan transaksi non tunai		
Output		
Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan transaksi pembayaran non tunai tingkat KPPN		

Anggaran	
Pagu	Realisasi
-	-

Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
-Sosialisasi keamanan penggunaan transaksi non tunai '-Pendampingan transaksi melalui aplikasi marketplace untuk satker	MSKI	Januari- Desember 2021

IV

SS/IKU	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien
IS	Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Periode IS	Januari s.d. Desember 2021
Output	Laporan Monev

Progres s.d. Triwulan IV	Selesai	
Penjelasan Pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik (BOS) dan Dana Desa diarahkan pada penyediaan informasi dan hambatan pelaksanaan penyaluran, penyediaan data analisis, identifikasi permasalahan dan rekomendasi atas permasalahan guna dapat menyusun kebijakan selanjutnya yang lebih efektif dan efisien.		
Kendala/Akar Masalah Pemerintah daerah tidak menginformasikan rencana pengajuan penyaluran DAK Fisik, Non Fisik (BOS) dan Dana Desa sehingga menimbulkan kesulitan penyusunan proyeksi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik (BOS) dan Dana Desa Penyaluran Dana BOS oleh KPPN selaku KPA Penyalur sangat bergantung kepada rekomendasi dan pembaruan data supplier yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat Kemendikbud dan Kemenkeu cq. Dit. SITP DJPb		
Output Laporan monev yang tepat waktu		

Anggaran		
Pagu	Realisasi	
7.000.000	450,000	

Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
-Aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan data laporan monev '-Memaksimalkan kegiatan monev melalui koordinasi dan konsultasi baik secara online maupun on the spot	Seksi Bank	Januari s.d Desember 2021

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE : TRIWULAN III TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Target Waktu Penyelesaian	Status	Keterangan
1	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Tingkat Implementasi Learning Organization pada Unit Kerja	Pemenuhan indikator-indikator pengukuran tingkat implementasi Learning Organization dengan metode self assessment	Satu Tahun	Selesai	Menyusun jadwal dan materi CnC untuk triwulan berkenaan
2	Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan	Optimalisasi transaksi pembayaran non tunai di tingkat KPPN	Transaksi melalui marketplace	Satu Tahun	Selesai	-Sosialisasi keamanan penggunaan transaksi non tunai -Pendampingan transaksi melalui aplikasi marketplace untuk satker
3	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Laporan Movev	Satu Tahun	Selesai	-Aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan data laporan -Memaksimalkan kegiatan movev melalui koordinasi dan konsultasi baik secara online maupun on the spot

Mengetahui,



Toni Rediansyah

Gorontalo, 6 Januari 2022
MMKO


Rahmat Kurniawan

SS/IKU	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi
IS	Tingkat Implementasi Learning Organization pada Unit Kerja
Periode IS	Januari – Desember 2021
Output	Pemenuhan Indikator

Progres s.d. Triwulan IV	Selesai	
Penjelasan IS ini digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pegawai berupa kompetensi-kompetensi teknis dan non teknis melalui pendekatan-pendekatan kemitraan, melibatkan proses kreatif guna memaksimalkan potensi pegawai. Coaching dilakukan dengan metode/teknik mendengarkan, bertanya dan menggali agar individu/pegawai menemukan potensi dalam dirinya untuk mencapai tujuan tertentu. Counseling diperlukan dalam konteks untuk memelihara/menjaga hubungan yang serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan yang berorientasi pada masalah-masalah psikologis (bersifat pribadi) yang mengganggu kinerja pegawai, dengan teknik-teknik mendengarkan, bertanya, menggali masa lalu, dan memberikan solusi untuk peningkatan kinerja pegawai. Capaian triwulan IV = 91.3% Kendala/Akar Masalah Masih kurangnya kesadaran pegawai untuk melakukan pengisian CnC di aplikasi training setelah kegiatan coaching and counselling dilaksanakan Output Pemenuhan indikator-indikator pengukuran tingkat implementasi Learning Organization dengan metode self assessment		

Anggaran	
Pagu	Realisasi
Target Q3 LO 80%	Capaian LO 91.3%

Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Menyusun jadwal dan materi CnC untuk triwulan berkenaan	Kepala Kantor	Januari- Desember 2021

SS/IKU	Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan
IS	Optimalisasi transaksi pembayaran non tunai di tingkat KPPN
Periode IS	Januari – Desember 2021
Output	Transaksi melalui marketplace

Progres s.d. Triwulan IV	Selesai	
Penjelasan		
Implementasi kebijakan non tunai di tingkat KPPN masih menemui kendala, diantaranya rendahnya realisasi pembayaran non tunai oleh satker dikarenakan belum adanya pemahaman yang memadai tentang prosedur transaksi dan kekhawatiran atas keamanan transaksi non tunai. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan melalui pelaksanaan bimtek dan sosialisasi. Sosialisasi terkait regulasi perpajakan untuk transaksi non tunai yang baru juga perlu untuk segera disosialisasikan.		
Capaian triwulan IV = 12 transaksi		
Kendala/Akar Masalah		
Kurangnya pengetahuan terkait proses transaksi non tunai dan keamanan transaksi non tunai		
Output		
Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan transaksi pembayaran non tunai tingkat KPPN		

Anggaran	
Pagu	Realisasi
-	-

Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
-Sosialisasi keamanan penggunaan transaksi non tunai '-Pendampingan transaksi melalui aplikasi marketplace untuk satker	MSKI	Januari-Desember 2021

IV

SS/IKU	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien
IS	Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Periode IS	Januari s.d. Desember 2021
Output	Laporan Monev

Progres s.d. Triwulan IV	Selesai	
Penjelasan Pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik (BOS) dan Dana Desa diarahkan pada penyediaan informasi dan hambatan pelaksanaan penyaluran, penyediaan data analisis, identifikasi permasalahan dan rekomendasi atas permasalahan guna dapat menyusun kebijakan selanjutnya yang lebih efektif dan efisien.		
Kendala/Akar Masalah Pemerintah daerah tidak menginformasikan rencana pengajuan penyaluran DAK Fisik, Non Fisik (BOS) dan Dana Desa sehingga menimbulkan kesulitan penyusunan proyeksi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik (BOS) dan Dana Desa Penyaluran Dana BOS oleh KPPN selaku KPA Penyalur sangat bergantung kepada rekomendasi dan pembaruan data supplier yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat Kemendikbud dan Kemenkeu cq. Dit. SITP DJPb		
Output Laporan monev yang tepat waktu		

Anggaran		
Pagu	Realisasi	
7.000.000	450,000	

Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
-Aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan data laporan monev '-Memaksimalkan kegiatan monev melalui koordinasi dan konsultasi baik secara online maupun on the spot	Seksi Bank	Januari s.d Desember 2021

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE : TRIWULAN III TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Target Waktu Penyelesaian	Status	Keterangan
1	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Tingkat Implementasi Learning Organization pada Unit Kerja	Pemenuhan indikator-indikator pengukuran tingkat implementasi Learning Organization dengan metode self assessment	Satu Tahun	Selesai	Menyusun jadwal dan materi CnC untuk triwulan berkenaan
2	Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan	Optimalisasi transaksi pembayaran non tunai di tingkat KPPN	Transaksi melalui marketplace	Satu Tahun	Selesai	-Sosialisasi keamanan penggunaan transaksi non tunai -Pendampingan transaksi melalui aplikasi marketplace untuk satker
3	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Laporan Movev	Satu Tahun	Selesai	-Aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan data laporan -Memaksimalkan kegiatan movev melalui koordinasi dan konsultasi baik secara online maupun on the spot

Mengetahui,



Toni Rediyansyah

Gorontalo, 6 Januari 2022
MMKO


Rahmat Kurniawan

RAW DATA IKU KEMENKEU-THREE KPPN GORONTALO
KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
1	1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb	99.379	Level 4 = 95-100 (Sangat Baik) Level 3 = 80-94 (Baik) Level 2 = 65-79 (Cukup) Level 1 = 0-64 (Kurang)
2	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	Indeks hasil survei kepuasan satker	4.73%	Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adalah sebagai berikut : 5 = Sangat Puas 4 = Puas 3 = Cukup Puas 2 = Kurang Puas
3	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	Σ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN	3524	$\frac{\Sigma \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN}}{\Sigma \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN}} \times 100\%$
			Σ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN	3524	
			Nilai	100.00%	
4	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Rata-rata Indeks Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	92.29	Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi $0 < x \leq 20$ = tidak efektif $20 < x \leq 40$ = kurang efektif $40 < x \leq 60$ = cukup efektif $60 < x \leq 80$ = efektif $80 < x \leq 100$ = sangat efektif
5	4b-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	Σ Sisa PPK/PPSPM tahun 2020 yang telah melakukan penilaian kompetensi	-	$\frac{\Sigma \text{Sisa PPK/PPSPM tahun 2020 yang telah melakukan penilaian kompetensi} + \Sigma \text{PPK/PPSPM tahun 2021 yang telah melakukan penilaian kompetensi}}{\Sigma \text{Sisa PPK/PPSPM tahun 2020 yang belum melakukan penilaian kompetensi}} \times 100\%$
			Σ PPK/PPSPM tahun 2021 yang telah melakukan penilaian kompetensi	56	
			TOTAL	56	
			Σ Sisa PPK/PPSPM tahun 2020 yang belum melakukan penilaian kompetensi	354	
			Nilai	16	
6	4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	Tahap 1	3%	$\frac{\text{Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2021}}{\text{X Proporsi Tahapan}} \times 100\%$
			Tahap 2	6%	
			Tahap 3	6%	
			Tahap 4	12%	
			Tahap 5	8%	
			Tahap 6	5%	
			Tahap 7	7.00%	

No	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
			Tahap 8	5%	
			Tahap 9	6%	
			Tahap 10	20%	
			Tahap 11	5%	
			Tahap 12	7%	
			Tahap 13	10%	
			Persentase	100.00%	
7	5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	Deviasi RPD Oktober	0	100% - (Rata - Rata Deviasi RPD harian per periode)
			Deviasi RPD November	0	
			Deviasi RPD Desember	0	
			Rata-Rata Deviasi RPD	0	
			Nilai	100	
8	5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	SP2D yang diterbitkan	79,915	$\frac{(70\% \times \text{nilai indeks A}) + (30\% \times \text{nilai indeks B})}{2}$
			SP2D yang diretur	592	
			Penyaluran SP2D yang akurat	4	
			SP2D pengganti sesuai indeks 1	-	
			SP2D pengganti sesuai indeks 2	-	
			SP2D pengganti sesuai indeks 3	-	
			SP2D pengganti sesuai indeks 4	592	
			Total SP2D pengganti	592	
			Kecepatan penyelesaian retur	4.00	
			Konversi Indeks A (70%)	2.80	
			Konversi Indeks B (30%)	1.20	
			Nilai Konversi	4.00	
9	6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	Hasil penilaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN	93.65	$IKPA = \sum (\text{Bobot} \times \text{Nilai Variabel}) \times 100$
10	6b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	SYARAT	9.23	$NKP \text{ TKDD} = [0,10 (\text{SYARAT}) + (0,20 (\text{PROYEKSI}) + 0,30 (\text{SPPSPM}) + 0,20 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA})] \times 100$
			PROYEKSI	20.00	
			SPPSPM	30.00	
			MONEV	20.00	
			LK UAKPA	19.80	
			NILAI	99.03	

No	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
11	6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	Jumlah Satker Yang Melaporkan data di open period reguler x 1,0	664	Tingkat Partisipasi Pelaporan Bulanan= [(Jumlah Satker Yang Melaporkan data di open period reguler x 1,0) + (Jumlah Satker yang Melaporkan data di open period tambahan x 0,5)] / Jumlah Satker yang Wajib Melaporkan Data Capaian Output.
			Jumlah Satker yang Melaporkan data di open period tambahan x 0,5	2	
			Jumlah Satker yang Wajib Melaporkan Data Capaian Output.	664	
			Nilai	99.70%	
12	7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu	669	$50\% \left(\frac{a}{c}\right) + 50\% \left(\frac{b}{c}\right)$
			Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas suspen	N/A	
			Jumlah satker aktif pada periode berkenaan	669	
			Nilai	100%	
13	7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	Σ LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	774	$\frac{\Sigma \text{LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu}}{\Sigma \text{LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN}} \times 100\%$
			Σ LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN	774	
			Nilai	100.00	
14	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb	88.3	Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb
15	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb	91.561	Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb
16	8c-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai KPPN	1122	Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai KPPN
			Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency	13	Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency
			Nilai	86.3	
17	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	Capaian IKPA Januari s.d September	97.09%	Capaian IKU PKPA Triwulan I : Capaian IKPA Januari s.d. Maret Capaian IKU PKPA Triwulan I : Capaian IKPA Januari s.d. Juni Capaian IKU PKPA Triwulan III : Capaian IKPA Januari s.d. September Capaian IKU PKPA Triwulan IV : 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART
18	10a-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB	92.86	Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB

No	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
19	9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	Nilai tingkat kualitas pengelolaan BMN	104.76	Nilai tingkat kualitas pengelolaan BMN
20	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Jumlah Checklist SMKI lingkup KPPN yang selesai dilaksanakan	9	$x = \frac{\sum \text{Checklist Rencana SMKI lingkup KPPN yang selesai dilaksanakan}}{\sum \text{Target Checklist Rencana SMKI lingkup KPPN}} \times 100\%$
			Jumlah Target Checklist rencana SMKI lingkup KPPN	9	
			Nilai	100.00%	

Keterangan:

*) Matriks perhitungan realisasi IKU terlampir.

Gorontalo, 10 Januari 2022

Kepala Kantor,



Tom REDIYANSYAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN PERBENDAHARAAN 08

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO 528281

Kode Lap : LRA.F.S

Tanggal : 09/01/22 9:37 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	13,601,475	(13,601,475)	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	13,601,475	(13,601,475)	0	0	0	0	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	369,600,000	369,597,000	3,000	100	332,380,000	331,209,000	1,171,000	100
	BELANJA BARANG	1,464,365,000	1,462,681,947	1,683,053	100	1,673,543,000	1,652,065,073	21,477,927	99
	BELANJA MODAL	36,000,000	35,931,000	69,000	100	191,664,000	191,557,000	107,000	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,869,965,000	1,868,209,947	1,755,053	100	2,197,587,000	2,174,831,073	22,755,927	100
C	PEMBIAYAAN				0				0



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,376,508,000 1,376,104,262 (99.97%)	36,000,000 35,931,000 (99.81%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,412,508,000 1,412,035,262 (99.97%)
		SISA	0	403,738	69,000	0	0	0	0	0	0	472,738
2	4718 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	PAGU REALISASI	0 0.00%	7,359,000 6,788,960 (92.25%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	7,359,000 6,788,960 (92.25%)
		SISA	0	570,040	0	0	0	0	0	0	0	570,040
3	4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM	PAGU REALISASI	369,600,000 369,597,000 (100.00%)	44,850,000 44,830,174 (99.96%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	414,450,000 414,427,174 (99.99%)
		SISA	3,000	19,826	0	0	0	0	0	0	0	22,826
4	4803 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	PAGU REALISASI	0 0.00%	2,224,000 2,190,000 (98.47%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,224,000 2,190,000 (98.47%)
		SISA	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
5	6212 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	10,356,000 10,098,551 (97.51%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	10,356,000 10,098,551 (97.51%)
		SISA	0	257,449	0	0	0	0	0	0	0	257,449
6	6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	PAGU REALISASI	0 0.00%	21,718,000 21,470,000 (98.86%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	21,718,000 21,470,000 (98.86%)
		SISA	0	248,000	0	0	0	0	0	0	0	248,000
7	6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,300,000 1,200,000 (92.31%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,300,000 1,200,000 (92.31%)
		SISA	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000



8	6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	PAGU REALISASI	0 0.00%	50,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	50,000 (0.00%)
		SISA	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	369,600,000 369,597,000 (100.00%)	1,464,365,000 1,462,681,947 (99.89%)	36,000,000 35,931,000 (99.81%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,869,965,000 1,868,209,947 (99.91%)
		SISA	3,000	1,683,053	69,000	0	0	0	0	0	1,755,053